



**BNPB**



**MASKERMU MELINDUNGIKU  
MASKERKU MELINDUNGIMU**



**LAPORAN KINERJA  
TAHUN 2020**



“Penanggulangan Bencana Urusan  
Bersama”

**DONI MONARDO**

**KEPALA BNPB**

## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja BNPB Tahun 2020 dapat diselesaikan. Tahun 2020 diwarnai dengan berbagai jenis bencana yang terjadi di Indonesia, mulai dari bencana alam seperti banjir dan longsor, Indonesia juga menghadapi bencana non alam seperti pandemi virus Covid-19. Dalam mengatasi penyebaran virus Covid-19, Pemerintah telah mengambil beberapa langkah seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan menerapkan 3 M yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Untuk kejadian bencana alam di Indonesia pada tahun 2020 tercatat sebanyak 2.952 bencana yang didominasi oleh bencana banjir, puting beliung dan tanah longsor.

Laporan Kinerja tahun 2020 merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban atas kinerja capaian sasaran strategis di Tahun 2020. Laporan kinerja ini merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis BNPB Tahun 2020-2024. Adapun penyusunan Laporan Kinerja BNPB mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Riviur atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Rencana Strategis BNPB Tahun 2020-2024, dan Perka BNPB No 1 Tahun 2020 tentang Sistem Akuntansi Kinerja Pemerintah.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas atas pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja dan wujud transparansi BNPB serta pertanggungjawaban kepada masyarakat. Kinerja BNPB diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran

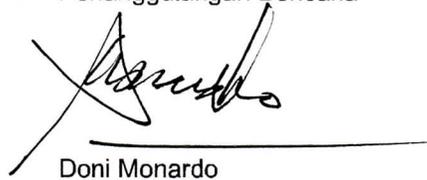
LAPORAN KINERJA TAHUN 2020

strategis sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja BNPB Tahun 2020.

Secara umum capaian kinerja telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, tentu hal ini merupakan komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur Negara, masyarakat, dan dunia usaha sebagai bagian dalam penanggulangan bencana.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja BNPB Tahun 2020 ini, diharapkan dapat menjadi bahan optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan BNPB pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja BNPB secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Jakarta, Februari 2021  
Kepala Badan Nasional  
Penanggulangan Bencana



Doni Monardo

## **RINGKASAN EKSEKUTIF**

Strategi BNPB 2020-2024 diarahkan untuk Penguatan Sistem, Regulasi, dan Tata Kelola Bencana dan Proyek Prioritas Nasional, Integrasi Kerjasama Kebijakan dan Penataan Ruang Berbasis Risiko Bencana. Indikator kinerja BNPB Tahun 2020 sebagai berikut:

<b>No</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja Utama</b>	<b>Target</b>	<b>Capaian</b>	<b>%</b>
1	Menurunnya risiko bencana di daerah rawan bencana	Indeks Risiko Bencana	141, 14	141,65	99,64
2	Terselamatkannya sebanyak mungkin jiwa pada saat keadaan darurat bencana	Rata-rata angka kematian akibat bencana saat keadaan darurat per 100.000 jiwa.	2.5	3,6	56
3	Terpulihkannya sarana dan prasarana, social, ekonomi dan produktivitas sumber daya alam pada daerah terdampak pascabencana.	Rata-rata Kenaikan Indeks Pemulihan Pascabencana.	5	5,22	104,4
4	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional, akuntabel dan transparan	Indeks Reformasi Birokrasi	76	Belum ada hasil penilaian dari KemenPAN RB	-

Dari keempat sasaran strategis diatas,dapat terlihat bahwa masih perlu perbaikan terhadap capaian indikator kinerja BNPB. Bencana yang terus terjadi di Indonesia seperti bencana alam dan pandemi virus Covid-19 menjadi tantangan tersendiri bagi BNPB dalam mencapai kinerja yang lebih baik.

Selain itu, BNPB juga mendukung satu agenda prioritas nasional sesuai Rencana Kerja Pemerintah tahun 2020 yaitu “Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan Lingkungan Hidup”.

Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung prioritas tersebut antara lain:

1. Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana di 19 lokasi;
2. Desa Tangguh Bencana di 120 lokasi;
3. Layanan Pendampingan Pemulihan Pascabencana Bidang Fisik di 6 lokasi;

4. Layanan Pemulihan Pascabencana Bidang Sosial Ekonomi dan SDA di 18 lokasi;
5. Pendampingan Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (Jitupasna) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana sebanyak 120 personil;
6. Layanan Budaya Sadar Bencana di 81 lokasi;
7. Literasi Kebencanaan di 43 lokasi;
8. Satuan Pendidikan Aman dari Bencana (SPAB) di 8 lokasi;
9. Sistem Peringatan Dini di 6 lokasi
10. Pengelola Infrastruktur Darurat sebanyak 100 personil;
11. Pendampingan penanganan korban dan pengungsi sebanyak 570 orang;
12. Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana dan Keposkoan sebanyak 105 orang;
13. Pemenuhan Logistik dan Peralatan PB di 144 lokasi.

Untuk mewujudkan target yang tertuang dalam perjanjian kinerja tersebut terangkum dalam 3 (tiga) program penanggulangan bencana menggunakan alokasi anggaran yang tercantum dalam DIPA awal sebesar Rp700,6 miliar sebagaimana DIPA Nomor: DIPA-103.01.1.648521/2020 tanggal 12 November 2019 dan pagu akhir BNPB menjadi sebesar Rp12,7 triliun. Penambahan pagu BNPB sepanjang tahun 2020 disebabkan adanya wabah *Corona Virus Disease* (Covid-19) yang terus meningkat dan meluas, sehingga BNPB mendapatkan tambahan dana untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp10 triliun dan dana penanganan bencana alam sebesar Rp2 triliun:

No	Program	Pagu Awal (Rp)	Pagu Akhir (Rp)
1	Program Penanggulangan Bencana	478.113.700.000	12.489.393.367.000
	2.1 Dana Rutin	228.113.700.000	206.848.722.000
	2.2 Dana Siap Pakai (DSP) Bencana Alam	250.000.000.000	2.081.400.000.000
	2.3 DSP Covid-19		10.092.372.374.000
	2.4 Hibah		108.772.271.000

## BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

No	Program	Pagu Awal (Rp)	Pagu Akhir (Rp)
2	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BNPB	8.924.900.000	8.924.900.000
3	Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNPB	213.608.214.000	215.174.419.000
	<b>Total</b>	<b>700.646.814.000</b>	<b>12.713.492.686.000</b>

Capaian anggaran BNPB tahun 2020 sebagai berikut

No	Program	Pagu	Realisasi	%
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNPB	215.174.419.000	213.083.573.087	99,03%
2	Program Penanggulangan Bencana	12.489.393.367.000	11.535.604.942.755	92,36%
	2.1 Dana Rutin	206.848.722.000	200.889.786.739	96,79%
	2.2 Dana Siap Pakai (DSP) Bencana Alam	2.081.400.000.000	2.046.350.743.387	98,32%
	2.3 DSP Covid-19	10.092.372.374.000	9.180.269.886.231	90,96%
	2.4 Hibah	108.772.271.000	108.094.526.398	99,38%
3	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BNPB	8.924.900.000	8.863.445.309	99,31%
<b>TOTAL</b>		<b>12.713.492.686.000</b>	<b>11.757.551.961.151</b>	<b>92,48%</b>

Realisasi anggaran BNPB pada tahun 2020 mencapai 92,48, dengan realisasi data rutin untuk program penanggulangan bencana sebesar 96,79%, realisasi DSP Bencana Alam sebesar 98,32% dan penanganan Covid-19 sebesar 90,96% dan realisasi penyaluran hibah sebesar 99,38%. Pada tahun 2020, BNPB berupaya menanggulangi bencana dimana tidak hanya bencana alam namun juga bencana pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia hingga seluruh dunia.

Kedepannya, BNPB beserta jajarannya akan terus berupaya optimal dalam kegiatan penanggulangan bencana baik bencana alam maupun bencana non alam dengan tantangan dilapangan yang tidak mudah namun tetap menjaga optimisme dalam setiap kesempatan.

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1.Latar Belakang .....	1
A.    Maksud dan Tujuan .....	2
B.    Tugas dan Fungsi BNPB .....	3
C.    Sumber Daya Manusia .....	4
1.2.Isu Strategis .....	8
1.3.Sistematika Penyajian Laporan Kinerja .....	15
<b>BAB 2 PERENCANAAN KINERJA .....</b>	<b>17</b>
2.1.Rencana Strategis .....	17
2.2.Prioritas Nasional Tahun 2020.....	18
2.3.Penetapan Kinerja BNPB Tahun 2020 .....	19
<b>BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA.....</b>	<b>22</b>
3.1.Capaian Kinerja Organisasi .....	22
3.2.Capaian Indikator Kinerja Utama .....	24
Sasaran Strategis 1. Menurunnya Risiko Bencana Di Daerah Rawan Bencana	24
Sasaran Strategis 2. Terselamatkannya Sebanyak Mungkin Jiwa Pada Saat Keadaan Darurat Bencana .....	65
Sasaran Strategis 3. Pulihnya Kehidupan Dan Penghidupan Yang Lebih Baik, Lebih Aman Dan Berkelanjutan Di Daerah Pascabencana .....	92
Sasaran Strategis 4. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Yang Profesional, Akuntabel Dan Transparan .....	98

**BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA**

3.3. Realisasi Agenda Prioritas .....	113
3.4. Realisasi Anggaran Tahun 2020 .....	123
<b>BAB 4 PENUTUP .....</b>	<b>125</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>127</b>
Lampiran 1. Perjanjian Kinerja .....	128
Lampiran 2. Nilai IRBI per kab/kota di Indonesia tahun 2020.....	130
Lampiran 3. 120 kab/kota yang memberikan hasil penilaian IKD kepada BNPB ...	145
Lampiran 4. Proses Perhitungan IRBI 2020.....	147
Lampiran 5. Lokasi pelaksanaan Ekspedisi Desa Tangguh Bencana Tsunami 2020 .....	153
Lampiran 6. Angka Kematian .....	162
Lampiran 7. Daftar Bantuan Logistik dan Peralatan di Tiap BPBD Tahun 2020.....	170

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Struktur Organisasi BNPB.....	6
Gambar 1.2. Komposisi SDM berdasarkan Jenis Kelamin .....	8
Gambar 1.3. Komposisi SDM berdasarkan Pendidikan.....	8
Gambar 1.4. Peta Indeks Risiko Bencana Indonesia .....	9
Gambar 1.5. Infografis Bencana Alam 31 Desember 2020 .....	10
Gambar 1.6 Kaleidoskop Covid-19 di Indonesia .....	12
Gambar 1.7. Infografis Bencana Covid-19 .....	13
Gambar 3.1 Penyusunan Kajian Risiko Bencana.....	25
Gambar 3.2 Hubungan antara frekuensi kejadian dan ketersediaan peringatan dini	25
Gambar 3.3 Indeks Risiko Bencana Rata-rata Nasional 2015-2020.....	28
Gambar 3.4 IRB di 136 kab/kota prioritas .....	28
Gambar 3.5 IRB skala Nasional 2015-2019 .....	29
Gambar 3.6 IRB skala Nasional 2015-2020 .....	30
Gambar 3.7 Pelaksanaan Penyusunan RPB.....	33
Gambar 3.8 Bimtek “Perempuan Guru Kesiapsiagaan Bencana dan Rumah Sebagai Sekolah” .....	35
Gambar 3.9 Workshop Rancang Bangun Sistem Literasi Sejarah Kebencanaan.....	36
Gambar 3.10 Review KRB jabodetabekpunjur .....	41
Gambar 3.11 Lokakarya Penilaian Kab/Kota Tangguh Bencana Kota Semarang ....	42
Gambar 3.12 FGD Pengembangan Sistem InaRisk.....	43

## BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

Gambar 3.13 Pemasangan Instrumentasi FEWS, di Kab. Belitung .....	45
Gambar 3.14 Pemasangan Instrumentasi LFEWS, di Kota Semarang .....	45
Gambar 3.16 Sebaran LEWS dan FEWS BNPB.....	46
Gambar 3.15 Sistem Peringatan Dini .....	46
Gambar 3.17 Lokasi Destana di Pulau Sumatera .....	51
Gambar 3.18 Alur Progres Kegiatan Ekspedisi Destana Tsunami .....	52
Gambar 3.19. Pertemuan koordinasi penyusunan rencana kerja.....	53
Gambar 3.20 Koordinasi & Sosialisasi di Desa/Kelurahan .....	53
Gambar 3.21 Pengumpulan dan Validasi Penilaian Ketangguhan Desa .....	55
Gambar 3.22 Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana .....	57
Gambar 3.23 Forum Pengurangan Risiko Bencana di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta .....	58
Gambar 3.24 Koordinasi & Dukungan Temu Relawan PB, Mojokerto 27-29 November 2020.....	59
Gambar 3.25 Sinergitas Relawan PB dalam menghadapi bencana, Bekasi 20 November 2020 .....	60
Gambar 3.26 Rakor Lintas sektor & Forum PRB, Babel 8 Desember 2020.....	60
Gambar 3.27. Video Edukasi Kebencanaan Rico The Series .....	63
Gambar 3.28 Durasi keadaan darurat Bencana Tahun 2020 .....	69
Gambar 3.29 Bencana Banjir di Kota Bekasi .....	71
Gambar 3.30 Pengerahan bantuan logistik dan peralatan di Kab Bondowoso .....	73
Gambar 3.31 Realisasi DSP Tahun 2020 .....	76
Gambar 3.32 Kegiatan Pendampingan dan Penyelamatan evakuasi bencana banjir	76
Gambar 3.33 Kegiatan SKPDB dan Keposkoan .....	77

Gambar 3.34 Rapat Teknis Dukungan Infrastruktur Darurat .....	78
Gambar 3.35 Tingkat Kesembuhan di Indonesia .....	79
Gambar 3.36 Kaleidoskop Penanganan Covid-19 Bidang Kesehatan.....	81
Gambar 3.37 Daftar Kegiatan Pemantauan Covid-19 .....	81
Gambar 3.38 Alur Integrasi Pelaporan Covid-19.....	83
Gambar 3.39 Kebijakan Publik dan Perubahan Perilaku .....	86
Gambar 3.40 Tingkat Kepatuhan Masyarakat.....	87
Gambar 3.41 Pihak yang Terlibat dalam Perekrutan Duta Perubahan Perilaku .....	89
Gambar 3.42 Akun Youtube Satgas Covid-19 Perubahan Perilaku.....	90
Gambar 3.43 Tantangan Penanganan Covid-19 di Tahun 2020 .....	91
Gambar 3.44 Tahapan dalam perhitungan Ina-PDRI .....	94
Gambar 3.45 Nilai RB BNPB 2017-2019.....	98
Gambar 3.46 JDIH .....	103
Gambar 3.47 Aplikasi BLC.....	106
Gambar 3.48 Capaian Penguatan Akuntabilitas Kinerja BNPB Tahun 2020 .....	107
Gambar 3.50 Pegawai yang Lapor LHKPN.....	108
Gambar 3.50 Pegawai yang Lapor LHKASN.....	108

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1 Prioritas Nasional BNPB Tahun 2020.....	19
Tabel 2.2. Penetapan Kinerja BNPB Tahun 2020 .....	20
Tabel 2.3 Perbandingan Pagu Awal dan Pagu Akhir.....	21
Tabel 3.1. Capaian Kinerja BNPB Tahun 2020 .....	22
Tabel 3.2. Perbandingan Capaian BNPB Tahun 2019 dan Capaian Tahun 2020 ....	23
Tabel 3.3. Lokasi Pelaksanaan Implementasi SPAB 2020 .....	62
Tabel 3.4 Derajat Keparahan Suatu Bencana dan Kriteria Angka Kematiananya .....	67
Tabel 3.5 Satgas Covid-19.....	80
Tabel 3.6 Jumlah Anggota Duta Perubahan Perilaku.....	88
Tabel 3.7 Indeks Pemulihan Pascabencana 2019-2020 .....	97
Tabel 3.8 Realisasi Anggaran tahun 2020 .....	124

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Bencana telah menjadi suatu perhatian khusus, baik di mata dunia pada umumnya maupun di Indonesia pada khususnya. Diawal tahun 2020, Indonesia sudah diguncang berbagai bencana alam di berbagai wilayah. Hal tersebut mengakibatkan dampak kerusakan yang dirasakan diberbagai sektor bidang, seperti bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan. Oleh karena itu, dalam perspektif yang lebih luas, bencana harus dapat dikelola dengan baik agar dampak yang ditimbulkan dapat ditekan hingga seminimal mungkin. Arah kebijakan umum penanggulangan bencana dalam RPJMN 2020 – 2024 adalah Membangun lingkungan hidup, Meningkatkan ketahanan bencana, dan Perubahan iklim yang dilaksanakan melalui strategi :

1. Penguatan data, informasi, dan literasi bencana;
2. Penguatan sistem, regulasi dan tata kelola bencana;
3. Penguatan rencana pengurangan risiko bencana melalui rencana aksi secara nasional dan daerah yang diintegrasikan dengan rencana aksi adaptasi perubahan iklim;
4. Peningkatan sarana prasarana mitigasi dan penanggulangan bencana;
5. Integrasi kerja sama antar daerah terkait kebijakan dan penataan ruang berbasis risiko bencana dan implementasi penanggulangan bencana;
6. Penguatan penanganan darurat bencana;
7. Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah terdampak bencana;
8. Penguatan sistem mitigasi multi ancaman bencana terpadu, terutama melalui penguatan sistem peringatan dini (INATEWS/*Indonesia Tsunami Early Warning System* dan MHEWS/*Multi Hazard Early Warning System*);

9. Penguatan kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana melalui sosial *re-engineering* ketahanan bencana multilevel terutama level keluarga, komunitas maupun desa;
10. Peningkatan pengembangan dan inovasi skema alternatif pembiayaan penanggulangan bencana.

Strategi BNPB tahun 2020-2024 diarahkan untuk Penguatan Sistem dan Tata Kelola Bencana dan Proyek Prioritas Nasional serta Integrasi Kerjasama Kebijakan dan Penataan Ruang Berbasis Risiko Bencana. BNPB akan semakin mengoptimalkan penyusunan peta risiko bencana tematik berbasiskan kewilayahan. BNPB juga mengoptimalkan pembuatan kajian teknis, dan memberikan dukungan teknis pada perencanaan baik di level nasional maupun provinsi/ kabupaten/kota.

#### **A. Maksud dan Tujuan**

Sebagai Lembaga Pemerintah yang anggarannya menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maka BNPB wajib menyampaikan Laporan Kinerja kepada Pemangku Kepentingan. Penyusunan laporan kinerja mengacu kepada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 Tahun 2020 tentang Sistem Akuntansi Kinerja Pemerintah. Maksud penyusunan laporan kinerja tahun 2020 merupakan bentuk pertanggungjawaban Kepala BNPB atas pelaksanaan program dan kegiatan serta pengelolaan anggaran yang dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan. Tujuan penyusunan Laporan Kinerja ini adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan sasaran BNPB selama tahun 2020. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan, akan dibuat rumusan kesimpulan yang akan dijadikan salah satu bahan masukan dan referensi dalam menetapkan kebijakan dan strategi tahun berikutnya.

## **B. Tugas dan Fungsi BNPB**

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 01 tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Peraturan BNPB Nomor 4 Tahun 2019, disebutkan bahwa BNPB adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang dipimpin oleh Kepala setingkat menteri yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Dalam hal ini BNPB mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan dalam bidang Penanggulangan Bencana, yaitu meliputi:

1. memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan keadaan darurat bencana, rehabilitasi, dan rekonstruksi secara adil dan setara;
2. menetapkan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
3. menyampaikan informasi kegiatan penanggulangan bencana kepada masyarakat;
4. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Presiden setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
5. menggunakan dan mempertanggungjawabkan sumbangan/bantuan nasional dan internasional;
6. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
8. menyusun pedoman pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana tersebut di atas, BNPB menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan dan penetapan norma, standar, prosedur, kriteria, serta persyaratan dan prosedur perizinan dan/atau rekomendasi penyelenggaraan penanggulangan bencana.
2. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat serta efektif dan efisien; dan

3. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

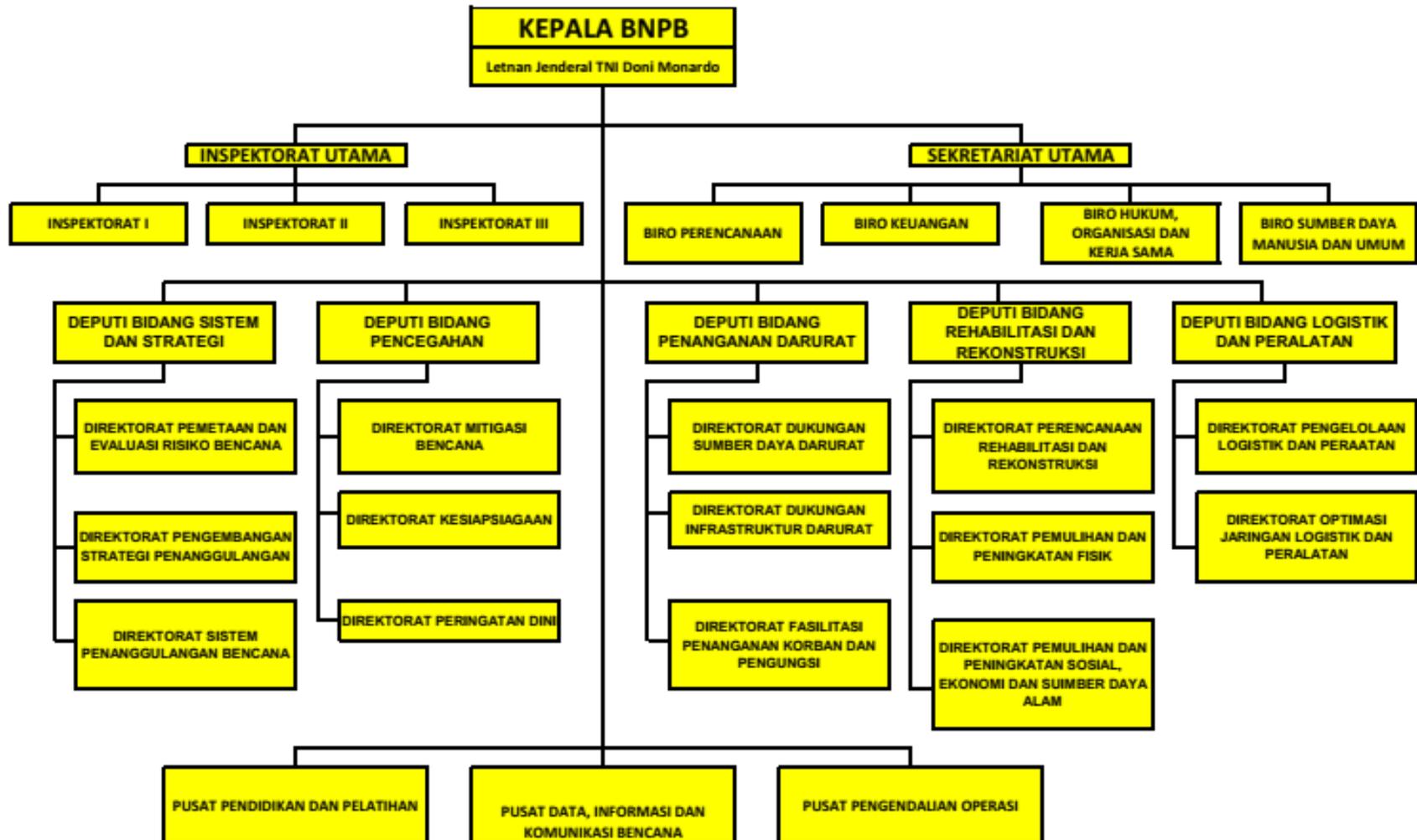
### C. Sumber Daya Manusia

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana, telah ditetapkan Peraturan Badan nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Unit kerja Eselon I di lingkup BNPB yakni:

1. **Sekretariat Utama (Sestama)** berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala dan bertugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Susunan organisasi Sestama terdiri dari: Biro Perencanaan; Biro Keuangan, Biro Umum dan SDM, dan Biro Hukum, Organisasi, dan Kerjasama.
2. **Deputi Bidang Sistem dan Strategi** berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala dan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang sistem dan strategi penanggulangan bencana. Susunan organisasi Deputi Bidang Sistem dan Strategi terdiri dari Direktorat Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana; Direktorat Pengembangan Strategi Penanggulangan Bencana; dan Direktorat Sistem Penanggulangan Bencana.
3. **Deputi Bidang Pencegahan** berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala dan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan. Susunan organisasi Deputi Bidang Pencegahan terdiri dari Direktorat Mitigasi Bencana; Direktorat Kesiapsiagaan; dan Direktorat Peringatan Dini.
4. **Deputi Bidang Penanganan Darurat** berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala dan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan keadaan darurat, meliputi

penyelenggaraan siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan. Susunan organisasi Deputi Bidang Penanganan Darurat terdiri dari Direktorat Dukungan Sumber Daya Darurat; Direktorat Dukungan Infrastruktur Darurat; dan Direktorat Fasilitasi Penanganan Korban dan Pengungsi.

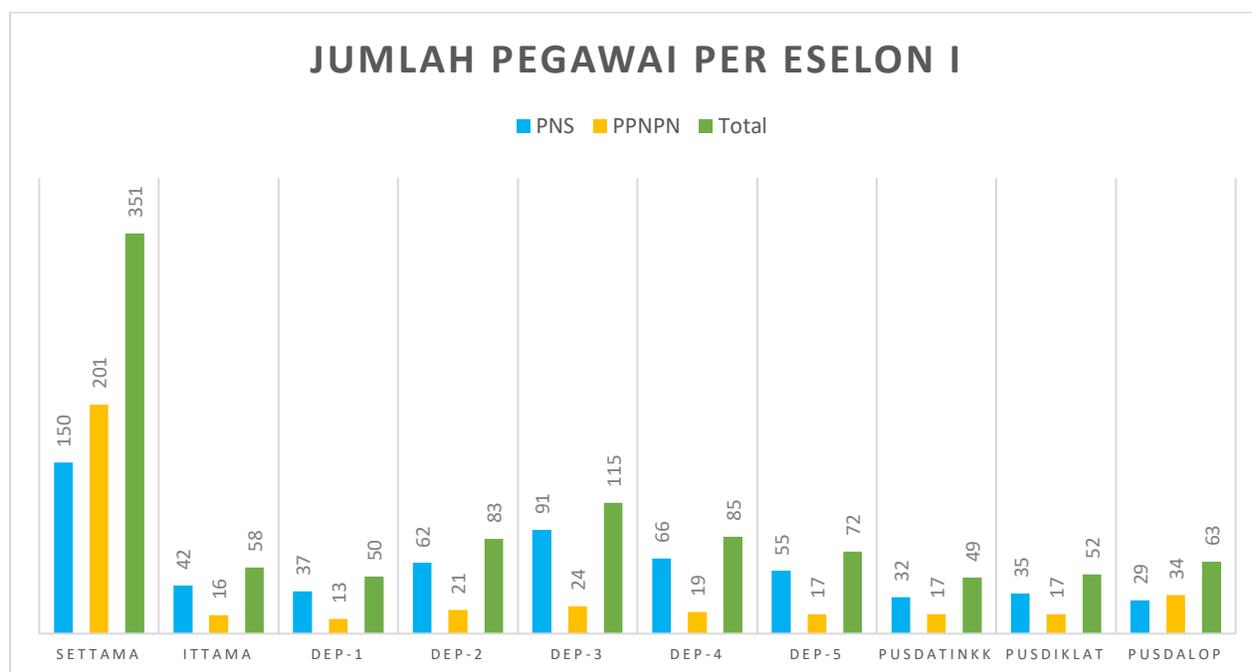
5. **Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi** berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala dan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi. Susunan organisasi Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi terdiri dari Direktorat Perencanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi; Direktorat Pemulihan dan Peningkatan Fisik; dan Direktorat Pemulihan dan Peningkatan Sosial, Ekonomi, dan Sumber Daya Alam.
6. **Deputi Bidang Logistik dan Peralatan** berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala dan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang logistik dan peralatan penanggulangan bencana. Susunan organisasi Deputi Bidang Logistik dan Peralatan terdiri dari Direktorat Pengelolaan Logistik dan Peralatan; dan Direktorat Optimasi Jaringan Logistik dan Peralatan.
7. **Inspektorat Utama** berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala dan mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan internal di lingkungan BNPB. Susunan organisasi Inspektorat Utama terdiri dari Inspektorat I; Inspektorat II, dan Inspektorat III.
8. **Pusat** dipimpin oleh Kepala Pusat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala melalui Sekretaris Utama dan mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BNPB untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis BNPB. Susunan organisasi Pusat terdiri dari Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan; Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana; dan Pusat Pengendalian Operasi.



Gambar 1.1. Struktur Organisasi BNPB

### Jumlah Pegawai Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Pada tahun 2020, jumlah pegawai BNPB mencapai 1.070 pegawai yang terdiri atas 599 pegawai ASN, 379 pegawai PPNPN, dan 92 CPNS yang akan masuk di tahun 2021. Pegawai tersebut tersebar pada 7 Unit eselon I dan 3 Pusat dengan komposisi pegawai sebagai berikut: Sekretariat Utama (35,9%), Inspektorat Utama (5,9%), Deputi Bidang Sistem dan Strategi (5,1%), Deputi Bidang Pencegahan (8,5%), Deputi Bidang Penanganan Darurat (11,8%), Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi (8,7%), Deputi Bidang Logistik dan Peralatan (7,4%), PusdatinKK (5%), Pusdiklat (5,3%), dan Pusdalop (6,4%). Keragaman SDM BNPB tahun 2020 berdasarkan jumlah pegawai per unit kerja seperti pada diagram berikut:

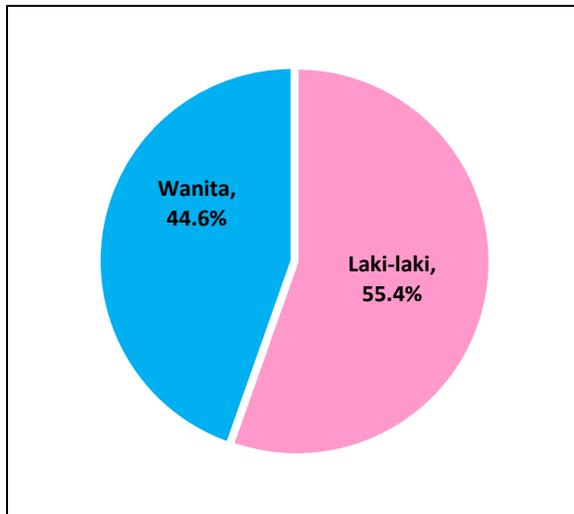


Keterangan:

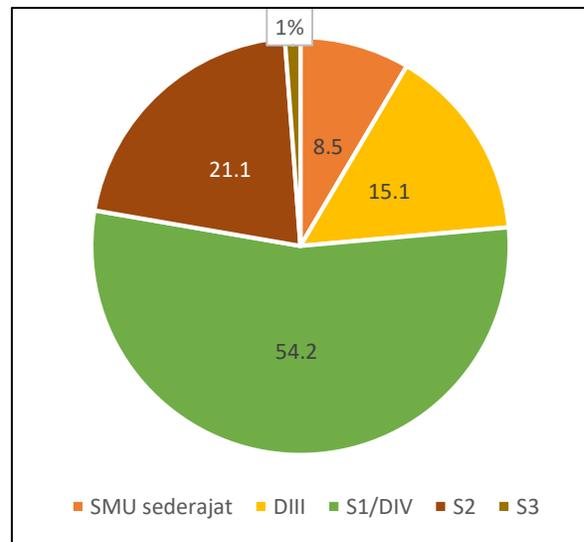
1. Sekretariat Utama (Settama)
2. Inspektorat Utama (Ittama)
3. Deputi Bidang Sistem dan Strategi (Dep-1)
4. Deputi Bidang Pencegahan (Dep-2)
5. Deputi Bidang Penanganan Darurat (Dep-3)
6. Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Dep-4)
7. Deputi Bidang Logistik dan Peralatan (Dep-5)

- 8. Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan (PusdatinKK)
- 9. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana (Pusdiklat)
- 10. Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalop)

Sedangkan keragaman ASN BNPB menurut golongan adalah sebagai berikut: Golongan IV sebanyak 73 orang, Golongan III sebanyak 401, dan Golongan II sebanyak 124 orang. Jabatan fungsional di BNPB terdiri atas 65,1% jabatan fungsional umum dan 34,9% fungsional tertentu dengan klasifikasi pendidikan dan jenis kelamin sebagai berikut:



**Gambar 1.2.**  
Komposisi SDM berdasarkan Jenis Kelamin



**Gambar 1.3.**  
Komposisi SDM berdasarkan Pendidikan

### 1.2. Isu Strategis

Negara Indonesia terkenal didunia karena memiliki posisi strategis secara geografis. Terletak di antara dua benua yaitu Benua Asia dan Benua Australia dan diantara dua samudera yaitu Samudra Hindia dan Samudera Pasifik. Hal ini menjadikan Indonesia berada di sepanjang jalur pelayaran dan perdagangan utama dunia seperti perdagangan Negara-negara industry dan Negara-negara yang sedang berkembang. Untuk itu, Indonesia perlu memaksimalkan keuntungan posisi Indonesia baik dari darat, udara,

## BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

maupun lautan dalam menunjang dan mendukung jalur pelayaran dan perdagangan dunia secara penuh.

Disisi lain, secara geologis dan geografis Indonesia memiliki risiko bencana yang tinggi karena berada pada pertemuan empat lempeng utama yaitu Eurasia, Indo Australia, Filipina dan Pasifik sehingga menjadikan Indonesia rawan bencana gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung api. Hasil perhitungan Indeks Risiko Bencana Tahun 2018 yang telah diterbitkan dalam buku Indeks Resiko Bencana Tahun 2018 menunjukkan 16 provinsi berada pada kelas risiko bencana tinggi dan 18 provinsi berada pada risiko bencana sedang.



**Gambar 1.4.** Peta Indeks Risiko Bencana Indonesia

Gambar di atas terlihat bahwa seluruh wilayah Indonesia memiliki indeks risiko bencana yang tinggi sampai sedang. Frekuensi kejadian bencana alam terus meningkat tiap tahunnya, baik yang merupakan bencana hidrometeorologi maupun bencana geologis, tetap menjadi ancaman yang serius. Meningkatnya frekuensi kejadian bencana alam, baik yang merupakan bencana hidrometeorologi maupun bencana geologis, tetap menjadi ancaman yang serius. Namun demikian ancaman bencana kedepan tentunya tidak hanya ancaman bencana alam saja, akan tetapi bencana non alam perlu menjadi perhatian pula seperti kegagalan teknologi dan wabah/epidemi penyakit, sebagai contoh

adanya bencana akibat pandemi Covid 19 yang terjadi di akhir tahun 2019 hingga memasuki tahun 2020. Sehingga manajemen penyelenggaraan penanggulangan bencana kedepan perlu dirancang pula untuk dapat mengakomodir upaya-upaya antisipasi terhadap kemungkinan kejadian bencana yang diakibatkan faktor non alam tersebut.

Karakteristik Indonesia yang memiliki risiko bencana tinggi ditambah dengan adanya pengaruh perubahan iklim dapat menimbulkan dampak bencana berupa kehilangan, kerugian dan kerusakan yang lebih besar di masa mendatang apabila tidak diantisipasi dan dikelola dengan baik.

Sampai dengan 31 Desember 2020 tercatat 2.952 kejadian bencana alam yang didominasi bencana hidrometeorologi. Banjir, puting beliung, tanah longsor, dan kebakaran hutan dan lahan berturut-turut menjadi bencana yang sering terjadi di tahun 2020. Korban yang ditimbulkan akibat bencana alam yaitu 370 orang meninggal dunia dan 6.450.903 orang menderita dan mengungsi, serta 536 jiwa luka-luka.



Gambar 1.5. Infografis Bencana Alam 31 Desember 2020

Selain bencana alam, masih ada bencana nonalam berupa kebakaran, kecelakaan, dan kejadian luar biasa. Di akhir tahun 2019, dunia dihadapi bencana non alam yaitu *pandemi Covid-19* yang berasal dari Wuhan, Provinsi Hubei, Republik Rakyat Cina (RRC). Penanganan *Coronavirus disease 2019* atau COVID-19 di Indonesia telah dimulai sejak 31 Januari 2020 dengan memulangkan WNI di Wuhan ke tanah air. Pada tanggal 29 Januari 2020, BNPB melakukan inisiasi pertemuan koordinasi membahas persiapan Indonesia dalam menghadapi ancaman COVID-19. Pertemuan melibatkan kementerian/lembaga, TNI, Polri, BUMN, pakar dan dunia usaha, seperti Sritex. BNPB meminta pengetatan di pintu-pintu masuk negara di setiap Pelabuhan dan bandara, serta dukungan Sritex untuk APD. Kasus pertama Covid-19 terdeteksi masuk ke Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 dimana BNPB bersama instansi terkait langsung melakukan koordinasi dengan pakar usaha. Pandemi Covid-19 telah mempengaruhi lini kehidupan masyarakat, dan masih belum sepenuhnya bisa dibatasi. Pemerintah telah melakukan langkah-langkah strategis Kebijakan-kebijakan penanganan Covid-19 telah dikeluarkan oleh Satgas Covid-19 diantaranya Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), realokasi anggaran Kementerian/Lembaga dalam rangka percepatan penanggulangan Covid-19.

Hingga akhir tahun 2020, Pemerintah Indonesia telah mengupayakan pembelian vaksin Covid-19 dari Negera Tiongkok yaitu vaksin Sinovac. Vaksin ini selanjutnya akan diberikan kepada seluruh rakyat Indonesia secara gratis pada tahun 2021.



Gambar 1.6 Kaleidoskop Covid-19 di Indonesia

Sampai dengan 31 Desember 2020, kasus bencana non alam tercatat 743.198 orang positif COVID-19 dan 22.138 orang meninggal dunia. Penyebaran COVID-19 didunia cenderung terus meningkat dari waktu ke waktu, menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang lebih besar, dan telah berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.



**Gambar 1.7. Infografis Bencana Covid-19**

Setiap bencana menimbulkan korban jiwa yang tidak sedikit. Selain itu, bencana menimbulkan kerusakan dan kerugian berupa harta benda (materi) dan gangguan psikologis (nonmateri) serta menghambat pembangunan nasional. Penanganan bencana tidak hanya mengandalkan aspek kesehatan namun juga operasi kemanusiaan. Kearifan local yang berisi nilai-nilai kebaikan dapat membantu masyarakat tumbuh bangkit kembali. Penguatan ketahanan berkelanjutan (*sustainable resilience*) perlu dilakukan, mengingat ancaman bencana masih terus akan terjadi. Mengingat tingginya tingkat risiko bencana di Indonesia, upaya penanggulangan bencana menjadi tantangan yang sangat berat bagi seluruh pemangku kepentingan. Membangun resiliensi bangsa adalah jalan keluar agar kita mampu menghadapi dan keluar dari kesulitan setiap bencana datang.

Indonesia dan negara-negara dunia pada tahun 2015 telah menyepakati *Sendai Framework for Disaster Risk Reduction yang menggantikan Hyogo Framework for Action*. *Sendai Framework* memiliki tujuh tujuan global, yaitu:

- a. Secara substansial mengurangi angka kematian akibat bencana global pada tahun 2030, dengan tujuan menurunkan rata-rata per 100.000 angka kematian global pada decade 2015-2030 dibandingkan dengan periode 2005-2015.
- b. Secara substansial mengurangi jumlah orang yang terkena dampak secara global pada tahun 2030, bertujuan untuk menurunkan angka global rata-rata per 100.000 pada dekade 2015-2030 dibandingkan dengan periode 2005-2015.
- c. Mengurangi kerugian ekonomi akibat bencana langsung terkait dengan produk domestik bruto global (PDB) pada tahun 2030.
- d. Secara substansial mengurangi kerusakan bencana pada infrastruktur kritis dan gangguan layanan dasar, di antaranya fasilitas kesehatan dan pendidikan, termasuk melalui pengembangan ketahanan terhadap bencana pada tahun 2030.
- e. Secara substansial meningkatkan jumlah negara dengan strategi pengurangan risiko bencana nasional dan lokal pada tahun 2020.
- f. Secara substansial meningkatkan kerja sama internasional dengan negara-negara berkembang melalui dukungan yang memadai dan berkelanjutan untuk melengkapi tindakan nasional dalam implementasi Kerangka Pengurangan Risiko Bencana pada tahun 2030.
- g. Secara substansial meningkatkan ketersediaan dan akses ke sistem peringatan dini multi-bahaya dan informasi dan penilaian risiko bencana kepada masyarakat pada tahun 2030.

Pencapaian tujuan ini dicanangkan dalam empat aksi prioritas, yaitu: (1) memahami risiko bencana, (2) memperkuat tata kelola risiko bencana, (3) berinvestasi dalam pengurangan risiko bencana untuk ketahanan, dan (4) meningkatkan kesiapsiagaan bencana untuk respon yang efektif dan untuk “Membangun Kembali dengan Lebih Baik dan Lebih Aman” dalam pemulihan pasca bencana melalui rehabilitasi dan rekonstruksi.

Dalam mewujudkan upaya pencapaian Agenda Pembangunan Global dengan mengaitkan sebagian besar target dan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*-SDGs) ke dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional. Pembangunan berkelanjutan merupakan paradigma pembangunan masa depan yang diharapkan oleh bangsa-bangsa di dunia untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan memuat 3 (tiga) isu utama, yaitu: (1) Ekonomi hijau dalam konteks pembangunan berkelanjutan dan pengentasan kemiskinan, (2) Pengembangan kerangka kelembagaan pembangunan berkelanjutan, serta (3) Kerangka aksi dan instrumen pelaksanaan pembangunan berkelanjutan.

Pemerintah Indonesia telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Terdapat 7 (tujuh) agenda pembangunan dari RPJMN ke IV tahun 2020-2024 yang merupakan amanat RPJPN 2005-2025 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir. Ke 7 agenda pembangunan tersebut di dalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas. Tujuan RPJMN IV tahun 2020 - 2024 telah sejalan dengan Sustainable Development Goals (SDGs). Targettarget dari 17 tujuan (goals) dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) beserta indikatornya telah ditampung dalam 7 agenda pembangunan nasional.

### **1.3. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja BNPB Tahun 2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

#### **Bab I   Pendahuluan**

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, tugas dan fungsi, isu strategis dan sistematika penyajian;

#### **Bab II  Perencanaan dan Perjanjian Kinerja**

Menjelaskan Rencana Strategis BNPB selama tahun 2020-2024, Rencana Kinerja Tahun 2020 dan Penetapan Kinerja tahun 2020;

### Bab III Akuntabilitas Kinerja

Menjelaskan analisis pencapaian kinerja BNPB selama tahun 2020 dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis.

### Bab IV Penutup

Menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja selama tahun 2020 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja dimasa mendatang.

## BAB 2

# PERENCANAAN KINERJA

### 2.1. Rencana Strategis

Dalam upaya mencapai agenda pembangunan yang telah disusun dalam RPJMN 2020-2024. BNPB turut berkontribusi pada fokus prioritas **“membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim”**. Oleh karena itu, visi BNPB sejalan untuk mendukung visi Presiden tahun 2020-2024:

Visi BNPB 2020-2024 adalah:

***“BNPB yang andal dan profesional mewujudkan Indonesia tangguh bencana untuk mendukung terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-Royong”***

RPJMN 2020-2024 memberikan sasaran utama mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Untuk dapat mewujudkan pembangunan berkelanjutan demi mencapai masyarakat Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong, dibutuhkan masyarakat Indonesia yang tangguh bencana. Indonesia tangguh bencana adalah Indonesia yang seluruh elemennya, mulai dari bagian terkecil pada tingkat keluarga dan desa hingga pemerintah daerah dan pemerintah, memiliki kesadaran terhadap risiko bencana, memiliki pengetahuan dan keterampilan terkait manajemen penanggulangan bencana, dan berketahanan dalam menghadapi keadaan darurat bencana serta mampu pulih menjadi lebih baik dan lebih aman pada pascabencana.

Arah kebijakan dan strategi BNPB 2020-2024 dijalankan searah dengan RPJMN 2020-2024. Arah kebijakan BNPB 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan sistem dan strategi Penanggulangan Bencana yang andal, inovatif, kolaboratif dan implementatif.

2. Peningkatan kesiapsiagaan pemerintah/pemerintah daerah, lembaga usaha, masyarakat, perguruan tinggi dan media yang terkoordinasi dalam menghadapi bencana.
3. Peningkatan layanan darurat bencana yang cepat, tepat, efektif dan terkoordinasi.
4. Peningkatan layanan pendampingan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana guna mendukung pencapaian kehidupan dan penghidupan masyarakat di wilayah terdampak bencana yang berkualitas.
5. Penyediaan logistik dan peralatan penanggulangan bencana serta pengembangan jaringan sesuai standar kebutuhan minimal dan karakteristik wilayah.
6. Penguatan tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional dan inklusif.

Strategi BNPB 2020-2024 diarahkan untuk Penguatan Sistem, Regulasi, dan Tata Kelola Bencana dan Proyek Prioritas Nasional, Integrasi Kerjasama Kebijakan dan Penataan Ruang Berbasis Risiko Bencana.

Sejalan dengan visi, misi, dan tujuan BNPB 2020-2024, sasaran strategis BNPB 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Menurunnya risiko bencana di daerah rawan bencana;
2. Terselamatkannya sebanyak mungkin jiwa pada saat keadaan darurat bencana;
3. Terpulihkannya sarana dan prasarana, social, ekonomi dan produktivitas sumber daya alam pada daerah terdampak pascabencana;
4. Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang professional, akuntabel dan transparan.

## **2.2. Prioritas Nasional Tahun 2020**

Kementerian PPN/Bappenas merumuskan Prioritas Nasional pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020 yang dijabarkan dalam Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas. RKP Tahun 2020 telah menyepakati Prioritas Nasional yang meliputi: (1) Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan; (2) Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah; (3) Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi,

## **BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA**

dan Kesempatan Kerja; (4) Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan Lingkungan Hidup; (5) Stabilitas Pertahanan dan Keamanan. BNPB mendukung Prioritas Nasional nomor 4 yang diwujudkan dalam proyek prioritas dan menjadi *output* Renja Tahun 2020 yang dijabarkan pada table berikut di bawah ini:

**Tabel 2.1 Prioritas Nasional BNPB Tahun 2020**

<b>No.</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Target</b>
1	Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana	19 Lokasi
2	Desa Tangguh Bencana	120 Lokasi
3	Layanan Pendampingan Pemulihan Pascabencana Bidang Fisik	6 Lokasi
4	Layanan Pemulihan Pascabencana Bidang Sosial Ekonomi dan SDA	18 Lokasi
5	Pendamping Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (Jitupasna) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana	120 Personil
6	Layanan Budaya Sadar Bencana	81 Lokasi
7	Literasi Kebencanaan	43 Lokasi
8	Satuan Pendidikan Aman dari Bencana (SPAB)	8 Lokasi
9	Sistem Peringatan Dini	6 Lokasi
10	Pengelola Infrastruktur Darurat	100 Personil
11	Pendamping penanganan korban dan pengungsi	570 Orang
12	Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana dan Keposkoan	105 Orang
13	Pemenuhan Logistik dan Peralatan PB	144 Lokasi

### **2.3. Penetapan Kinerja BNPB Tahun 2020**

Untuk mendukung terwujudnya visi dan misi BNPB Tahun 2020-2024, maka ditetapkan sasaran strategis dan indikator kinerja utama sebagaimana penetapan kinerja BNPB tahun 2019, secara rinci sebagai berikut:

Tabel 2.2. Penetapan Kinerja BNPB Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1	Menurunnya risiko bencana di daerah rawan bencana	Indeks Risiko Bencana	141.14
2	Terselamatkannya sebanyak mungkin jiwa pada saat keadaan darurat bencana	Rata-rata angka kematian akibat bencana pada saat keadaan darurat per 100.000 penduduk wilayah terdampak (% penurunan rata-rata angka kematian)	2.5
3	Terpulihkannya sarana dan prasarana, sosial, ekonomi dan produktivitas sumber daya alam pada daerah terdampak pascabencana	Indeks Pemulihan Pascabencana (% kenaikan indeks)	5
4	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional, akuntabel dan transparan	Indeks Reformasi Birokrasi	76

Untuk mewujudkan target yang tertuang dalam perjanjian kinerja tersebut terangkum dalam 3 (tiga) program penanggulangan bencana menggunakan menggunakan alokasi anggaran yang tercantum dalam DIPA awal sebesar Rp700 miliar sebagaimana DIPA Nomor: DIPA-103.01.1.648521/2020 tanggal 12 November 2019 dengan pagu akhir BNPB menjadi sebesar Rp12,7 triliun. Penambahan pagu BNPB sepanjang tahun 2020 disebabkan adanya wabah *Corona Virus Desease* (Covid-19) yang terus meningkat dan meluas, sehingga BNPB mendapatkan tambahan dana untuk penanganan Covid-19 dengan total sebesar Rp10 triliun dan dana penanganan bencana alam sebesar Rp2 triliun. Adapun rincian anggaran BNPB tahun 2020 adalah sebagai berikut:

## BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

Tabel 2.3 Perbandingan Pagu Awal dan Pagu Akhir

No	Program	Pagu Awal	Pagu Akhir
1	Program Penanggulangan Bencana	478.113.700.000	12.489.393.367.000,00
	2.1 Dana Rutin		206.848.722.000,00
	2.2 Dana Siap Pakai (DSP) Bencana Alam	250.000.000.000	2.081.400.000.000,00
	2.3 DSP Covid-19		10.092.372.374.000,00
	2.4 Hibah		108.772.271.000,00
2	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BNPB	8.924.900.000	8.924.900.000
3	Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNPB	213.608.214.000	215.174.419.000
	<b>Total</b>	<b>700.646.814.000</b>	<b>12.713.492.686.000,00</b>

## BAB 3

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### 3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja BNPB Tahun 2020 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator kinerja tersebut merupakan Indikator yang telah ditetapkan targetnya pada dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Kepala BNPB Tahun 2020.

**Tabel 3.1. Capaian Kinerja BNPB Tahun 2020**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Capaian	Realisasi %
1	Menurunnya risiko bencana di daerah rawan bencana	Indeks Risiko Bencana	141,14	141,65	99,64
2	Terselamatkannya sebanyak mungkin jiwa pada saat keadaan darurat bencana	Rata-rata angka kematian akibat bencana pada saat keadaan darurat per 100.000 penduduk wilayah terdampak (% penurunan rata-rata angka kematian)	2.5	3,6	56
3	Pulihnya kehidupan dan penghidupan yang lebih baik, lebih aman dan berkelanjutan di daerah pascabencana	Indeks Pemulihan Pascabencana (% kenaikan indeks)	5	5,22	104,4
4	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional, akuntabel dan transparan	Indeks Reformasi Birokrasi	76	Menunggu hasil KemenPAN RB	-

Jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2019, capaian kinerja tahun anggaran 2020. Perbandingan capaian kinerja dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 3.2.** Perbandingan Capaian BNPB Tahun 2019 dan Capaian Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2019	Capaian 2020
1	Menurunnya risiko bencana di daerah rawan bencana	Indeks Risiko Bencana	144,02	141,65
2	Terselamatkannya sebanyak mungkin jiwa pada saat keadaan darurat bencana	Rata-rata angka kematian akibat bencana pada saat keadaan darurat per 100.000 penduduk wilayah terdampak (% penurunan rata-rata angka kematian)	na	3,6
3	Pulihnya kehidupan dan penghidupan yang lebih baik, lebih aman dan berkelanjutan di daerah pascabencana	Indeks Pemulihan Pascabencana (% kenaikan indeks)	4,85%	5,22
4	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional, akuntabel dan transparan	Indeks Reformasi Birokrasi	64,01	Menunggu hasil KemenPANRB

Adapun perbandingan capaian kinerja BNPB dari tahun 2016-2018 adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2016	Capaian 2017	Capaian 2018
1	Indeks Risiko Bencana	150,58	148,82	145,85
2	Rata-rata angka kematian akibat bencana pada saat keadaan darurat per 100.000 penduduk wilayah terdampak (% penurunan rata-rata angka kematian)	na	na	na
3	Indeks Pemulihan Pascabencana (% kenaikan indeks)	na	na	3%
4	Indeks Reformasi Birokrasi	65,11	68,07	67,91

### 3.2. Capaian Indikator Kinerja Utama

Tahun 2020 terdapat empat Indikator Kinerja Utama (IKU) BNPB sebagai sasaran strategis dengan penjelasan sebagai berikut:

#### Sasaran Strategis 1. Menurunnya Risiko Bencana Di Daerah Rawan Bencana

Capaian kinerja sasaran strategis menurunnya risiko bencana di daerah rawan bencana dicapai sebagai berikut:

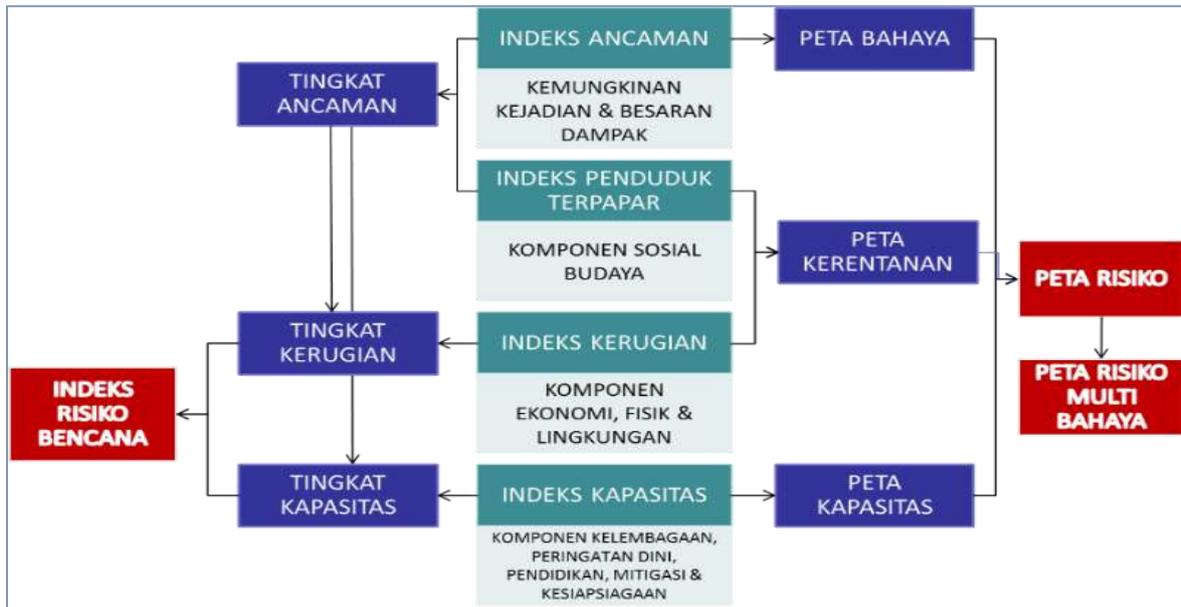
##### Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)

Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) merupakan gambaran tingkat risiko di tataran pemerintahan Kabupaten/Kota di Indonesia sesuai dengan bahaya (hazard) yang dimiliki dan gabungan dari bahaya (multi-hazard) dan menggambarkan perbandingan tingkat risiko dari suatu daerah dibandingkan dengan daerah yang lain.

Indeks risiko bencana berisi nilai indeks risiko bencana dan capaian penurunan indeks risiko bencana di tingkat kabupaten/ kota dan tingkat provinsi seluruh Indonesia. Kajian Risiko Bencana yang dilakukan dengan melakukan perhitungan pada komponen bahaya (hazard), kerentanan (vulnerability), dan kapasitas (capacity) di masing-masing provinsi dan kabupaten/ kota. Komponen bahaya adalah fenomena alam yang dapat menyebabkan bencana seperti gempa bumi, letusan gunung api, tsunami, banjir, dan lainnya. Komponen kerentanan adalah (1) kondisi fisik, (2) sosial budaya, (3) ekonomi, dan (4) lingkungan yang rentan terpapar bencana. Sementara komponen kapasitas adalah dari unsur ketahanan daerah seperti kebijakan dan kelembagaan; pendidikan dan pelatihan; logistik; kapasitas mitigasi, pencegahan, kesiapsiagaan dan penanganan darurat; dan kapasitas pemulihan.

Perhitungan indeks risiko bencana didasarkan pada hasil kajian risiko bencana (KRB) berdasarkan penilaian kemungkinan dan besarnya dampak yang diukur dari keterpaparan atau *exposure* (potensi jiwa terpapar, kerugian ekonomi, dan kerusakan

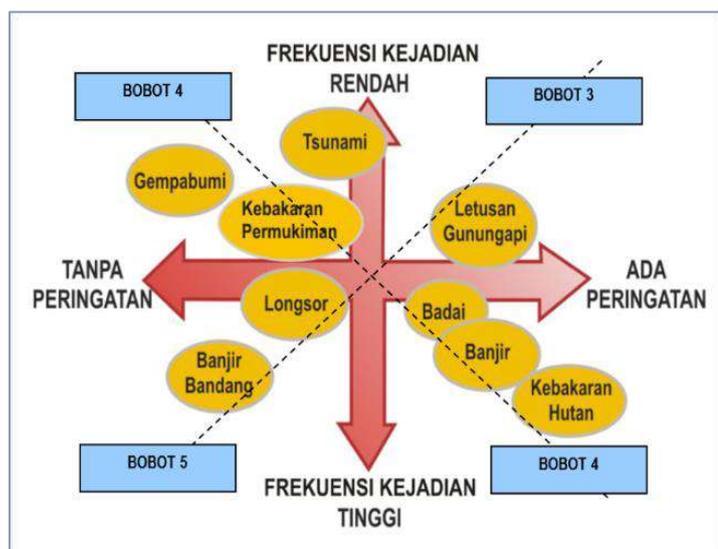
lingkungan) dan kapasitas (*capacity*) dari setiap bahaya (*hazard*) dan gabungan dari beberapa *hazard* yang terdapat pada daerah tersebut (*multi-hazards*).



**Gambar 3.1 Penyusunan Kajian Risiko Bencana**

Dari hasil KRB diperoleh informasi tingkat ancaman, kerentanan, dan kapasitas. Komponen-komponen ini digabungkan untuk menghasilkan IRBI dengan bobot tertentu sesuai tingkat masing-masing komponen.

Indeks risiko bencana multi bahaya disusun berdasarkan 9 jenis bahaya (gempabumi, tsunami, letusan gunungapi, banjir, tanah longsor, kekeringan, kebakaran lahan dan hutan, cuaca ekstrim dan gelombang pasang dan abrasi). Tingkat ancaman dari setiap bahaya tidak sama, tergantung pada frekuensi kejadian dan ada tidaknya peringatan dini dari ancaman tersebut. Untuk penggabungan ancaman dalam menyusun indeks risiko



**Gambar 3.2 Hubungan antara frekuensi kejadian dan ketersediaan peringatan dini**

multi bahaya digunakan bobot berdasarkan hubungan antara frekuensi kejadian dan adanya peringatan dini, seperti ditunjukkan pada Gambar diatas.

Nilai IRBI Nasional diperoleh berdasarkan nilai rata-rata dari IRBI Provinsi, sedangkan IRBI Provinsi diperoleh dari nilai rata-rata IRBI Kabupaten/Kota di dalam provinsi tersebut. Dengan demikian, secara tidak langsung IRBI Nasional merupakan nilai rata-rata dari IRBI Kabupaten/Kota. *Baseline* dihitung berdasarkan IRBI di 498 kabupaten/kota. Untuk konsistensi, nilai IRBI yang diperhitungkan untuk penurunan IRBI adalah IRBI dari kabupaten/kota yang sama dengan *baseline*. Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) ini dihitung berdasarkan pendekatan risiko berikut:

$$Risk = Hazard \times \frac{Vulnerability}{Capacity}$$

Di mana *Hazard* (bahaya) dihitung berdasarkan probabilitas spasial, frekuensi dan kekuatan (magnitude) dari suatu fenomena alam seperti gempa bumi, banjir, letusan gunung api, dan lainnya. *Vulnerability* (kerentanan) dihitung berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan. Komponen *Capacity* (kapasitas) dinilai dengan menggunakan pendekatan tingkat ketahanan daerah berdasarkan tujuh prioritas yaitu: (1) Perkuatan kebijakan dan kelembagaan; (2) Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu; (3) Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik; (4) Penanganan tematik kawasan rawan bencana; (5) Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana; (6) Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; dan (7) Pengembangan sistem pemulihan bencana.

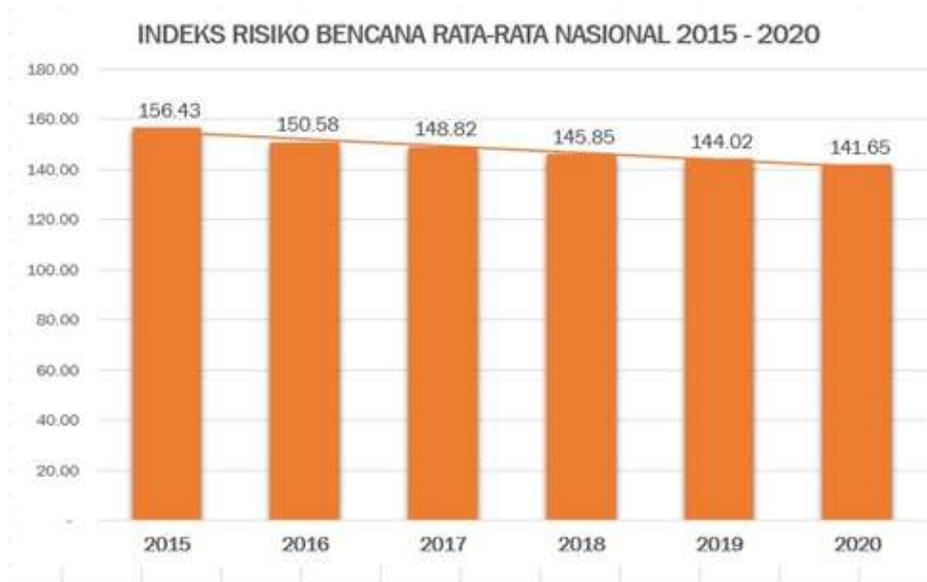
Tren risiko bencana diukur utamanya berdasarkan perubahan pada komponen kapasitas. Adapun komponen bahaya dan kerentanan mengacu kepada baseline (IRBI 2013). Indeks Risiko Bencana Indonesia dibatasi pada bahaya-bahaya yang ditimbulkan oleh faktor alam, yang mencakup sembilan jenis ancaman yaitu: Gempabumi, Tsunami, Letusan Gunung Api, Tanah Longsor, Banjir, Banjir Bandang, Kekeringan, Kebakaran Hutan dan Lahan, dan Gelombang Ekstrim dan Abrasi.

Hasil perhitungan indeks risiko bencana tahun 2020 menunjukkan 19 provinsi berada pada kelas risiko bencana tinggi dan 15 provinsi berada pada kelas risiko bencana sedang dan tidak ada provinsi yang berada pada risiko bencana rendah. Tiga provinsi yang berisiko paling tinggi yaitu Sulawesi Barat (skor 166,49), Bengkulu (skor 162,00), dan Kepulauan Bangka Belitung (skor 161,54). Sementara itu, tiga provinsi yang memiliki indeks risiko terendah pada kelas sedang adalah Papua (skor 122,90), Kepulauan Riau (skor 116,40), dan DKI Jakarta (skor 64,02).

Dari 514 Kabupaten kabupaten/ kota di Indonesia terdapat 237 kabupaten kota yang berada pada kelas indeks risiko tinggi dan 277 yang berada pada kelas indeks risiko sedang. Tiga kabupaten/ kota dengan skor yang paling tinggi adalah Maluku Barat Daya - Provinsi Maluku (skor 223,20), Majene - Provinsi Sulawesi Barat (skor 216,08), dan Kota Gunung Sitoli, Provinsi Sumatera Utara (skor 215,60). Sementara itu, tiga yang memiliki skor terendah (berada pada kelas sedang) adalah Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta (skor 52,18), Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah (skor 48,13), dan Mamberamo Tengah - Provinsi Papua (skor 44,80). Rincian nilai IRBI 2020 terlampir pada **lampiran 2**.

Indeks Risiko Bencana 2020 berisi gambaran kecenderungan (tren) indeks risiko bencana di kabupaten/ kota dari tahun 2015 hingga 2020. Pola ini dapat memberikan gambaran capaian program penanggulangan bencana yang sudah dilakukan di tingkat pusat dan daerah, berupa penurunan indeks risiko bencana.

IRBI Tahun 2020 ini diharapkan dapat memberikan gambaran capaian upaya penanggulangan bencana di tingkat provinsi dan kabupaten/ kota. Nilai yang tertera dapat menjadi panduan bagi para pengambil kebijakan di tingkat nasional dan daerah untuk menentukan prioritas upaya penanggulangan bencana di daerahnya masing-masing guna menurunkan indeks risiko bencana sebagai upaya meningkatkan ketangguhan masyarakat.



Gambar 3.4 Indeks Risiko Bencana Rata-rata Nasional 2015-2020



Gambar 3.3 IRB di 136 kab/kota prioritas

Dalam kurun waktu 2015-2019, BNPB telah melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mengoordinasikan penyelenggaraan penanggulangan bencana nasional. Berbagai target yang direncanakan telah dicapai melalui pelaksanaan kegiatan. Salah satunya adalah Indeks Risiko Bencana di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi berisiko tinggi bencana (136 kabupaten/kota) telah berhasil diturunkan sebesar 21,74% selama periode lima tahun (2015 -2019). Pada periode yang sama, Indeks risiko bencana secara nasional berhasil diturunkan sebesar 7,93%. Pada tahun 2015 nilai Indeks

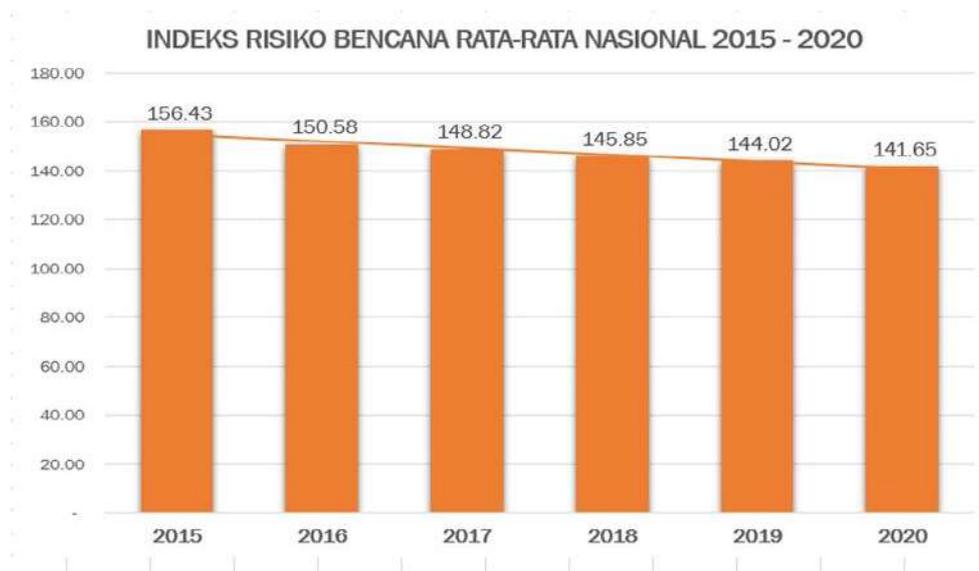
Risiko Bencana Indonesia (IRBI) rata-rata nasional pada tahun 2015 sebesar 156,43 dan tahun 2019 sebesar 144,02.



**Gambar 3.5 IRB skala Nasional 2015-2019**

Sementara itu dalam capaian sasaran strategis tahun 2020-2024, BNPB menargetkan penurunan IRBI Nasional sebesar 10 % selama lima tahun dari 514 kab/kota di Indonesia, yaitu dengan target skor IRBI Nasional sebesar 129,62 pada tahun 2024 dari kondisi existing baseline 144.02 (2019). Target pada tahun 2020 yaitu 141.14 dengan poin penurunan sebanyak 2.88 poin risiko bencana, akan tetapi target tersebut hanya tercapai penurunan 141.65 dari kondisi existing baseline 144.02. Hal tersebut disebabkan karena beberapa faktor, khususnya sebagai dampak pandemi Covid-19. Pandemi tersebut mengharuskan adanya *refocusing* anggaran di daerah untuk penanganan pandemi, sehingga partisipasi kabupaten/kota yang melakukan penilaian kapasitas mengalami penurunan. Dampaknya adalah capaian penanggulangan bencana pada tahun 2020 tidak dapat dinilai. Selain itu, pandemi menyebabkan terbatasnya aktivitas, sehingga kegiatan seperti pelatihan penanggulangan bencana, pemutakhiran kajian risiko bencana tidak bisa dilakukan.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Baseline	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Ket
Menurunnya risiko bencana di daerah rawan bencana	Indeks Risiko Bencana	144,02	141,14	138,26	135,38	132,50	129,62	Turun 10 %



**Gambar 3.6 IRB skala Nasional 2015-2020**

### **Penurunan Indeks Risiko Bencana**

Penurunan indeks risiko bencana sangat dipengaruhi oleh komponen penyusunnya yaitu komponen bahaya, kerentanan dan kapasitas. Penurunan indeks risiko bencana didekati dengan meningkatkan komponen kapasitas, sedangkan komponen risiko yang lainnya (bahaya dan kerentanan) dianggap konstan atau sama dengan *baseline*. Untuk mengukur kapasitas pemerintah daerah ini, digunakan perangkat indeks ketahanan daerah (IKD) atau juga dikenal dengan perangkat 71 Indikator sesuai dengan jumlah indikatornya. Sehingga, penilaian IKD secara berkala dapat digunakan untuk menghitung nilai IRBI. Dalam hal Kabupaten/Kota tidak melakukan penilaian IKD, maka digunakan nilai IRBI tahun sebelumnya.

### **Proses Perhitungan Indeks Risiko Bencana Indonesia Tahun 2020**

Perhitungan IRBI tahun 2020 dimulai dengan pengumpulan hasil penilaian IKD yang telah dilaksanakan oleh kab/kota. Terdapat 120 kab/kota yang memberikan hasil penilaian IKD kepada BNPB (**lampiran 3**). Seperti yang telah dijelaskan di atas, IKD merupakan *tools* untuk menghitung komponen kapasitas di dalam kajian risiko. Secara konsep, kajian risiko terdiri dari tiga komponen dengan persentase sebagai berikut:

**Table 1. Persentase komponen penyusun risiko**

No	Komponen	Persentase
1.	Bahaya	40%
2.	Kerentanan	30%
3.	Kapasitas	30%

Berdasarkan konsep di atas, maka nilai IKD memiliki dampak maksimal sebesar 30% terhadap pengurangan risiko yang ada di suatu kab/kota. IKD merupakan nilai indeks memiliki rentang nilai 0 sampai 1. Proses perhitungan dimulai dengan mengkonversi indeks yang ada pada IKD ke nilai kapasitas dengan cara mengkalikan IKD dan konstanta 3,1. Setelah itu, nilai konversi diinsersikan ke formula IRBI yang berupa pembobotan kelas bahaya dan kerentanan berdasarkan hasil kajian risiko bencana sebagaimana dijelaskan pada Bagian Metodologi Perhitungan IRBI di atas. Nilai perhitungan tersebut yang menjadi indeks risiko bencana pada setiap kab/kota. Langkah terakhir dalam perhitungan IRBI secara nasional adalah dengan meratakan seluruh indeks risiko yang ada di tiap-tiap kab/kota. Hasil dari perhitungan IRBI di setiap kab/kota yang menjadi dasar nilai IRBI nasional di tahun 2020 dapat dilihat pada lampiran 2. Berdasarkan hasil perhitungan, nilai IRBI Nasional adalah sebesar 141,65.

Pada Renstra BNPB Tahun 2020 – 2024 disebutkan bahwa target dalam penurunan IRBI adalah sebesar 2% atau 2.88 poin tiap tahunnya. Akan tetapi, pada tahun 2020, hasil IRBI nasional hanya turun sebesar 1.65 poin. Faktor yang menyebabkan ini adalah adanya pandemi Covid-19 yang mengharuskan kab/kota melakukan refocusing anggaran kepada kegiatan penanggulangan bencana non-alam tersebut. Terdapat beberapa daerah yang telah menganggarkan perhitungan IKD di awal tahun 2020, namun batal terlaksana karena sudah tidak memiliki anggaran untuk pelaksanaan kegiatan. Dampaknya adalah hanya 120 kab/kota yang memberikan hasil penilaian IKD ke BNPB, yang kemudian digunakan sebagai dasar perhitungan IRBI.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh BNPB dalam rangka memfasilitasi Kab/Kota untuk menurunkan risiko bencana di daerah bencana tahun 2020 yaitu :

1. Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana

Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) termasuk dalam pelayanan dasar sub urusan bencana bidang pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Permendagri 101/2018 Pasal 4). Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) atau perangkat daerah dalam menyusun dokumen perencanaan dan anggaran wajib memprioritaskan program dan kegiatan pemenuhan pelayanan dasar (Pasal 8 Permendagri 101 Tahun 2018).

Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) merupakan dokumen yang wajib dimiliki oleh Pemerintah Daerah, RPB sebagai bentuk pelayanan minimal yang berhak diterima masyarakat dalam bidang penanggulangan bencana. Oleh karenanya, BNPB berkepentingan untuk meningkatkan kapasitas Pemerintah Daerah agar dapat menyusun dokumen Rencana Penanggulangan Bencana dengan mengadakan Bimbingan Teknis Daring RPB.

Kegiatan Bimtek dilaksanakan dengan 2 timeline kegiatan yaitu Pra-bimtek dan Pelaksanaan Bimtek. Kegiatan Pra-Bimtek dilaksanakan 18 Juni 2020 jam 13.00-15.00 WIB. Agenda Pra-Bimtek yaitu peserta diberikan pengenalan kegiatan Bimtek, tujuan, pengenalan, cara penggunaan aplikasi zoom dan Google Classroom. Adapun kegiatan Bimtek dilaksanakan 22-26 Juni 2020 jam 09.00-14.00 WIB.

Materi pada Bimtek sesuai dengan modul kegiatan yaitu modul ini terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu: (1) Pengantar Manajemen Penanggulangan Bencana, (2) Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana, (3) Prioritas Risiko Bencana dan Isu Strategis Penanggulangan Bencana, (4) Penyusunan Program dan Rencana Aksi Penanggulangan Bencana, serta (5) Penutup.

Peserta Bimtek Daring RPB terdiri atas 40 Peserta dari perwakilan BAPPEDA dan BPBD Provinsi dan Kab/Kota yang terdiri atas 3 Provinsi yaitu Provinsi Lampung Provinsi Bali, Yogyakarta, dan 18 Kab/kota yaitu Kabupaten Subang, Kota Batu, Kota Cirebon, Kota Singkawang, Kabupaten Bengkulu Utara, Kota Palangkaraya, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Karo, Kabupaten

Sabu Raijua, Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Malang, Kabupaten Sigi, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Kaur, Kota Yogyakarta, dan Kabupaten Pangandaran.



**Gambar 3.7 Pelaksanaan Penyusunan RPB**

Secara keseluruhan kegiatan Bimtek Daring RPB berjalan dengan lancar dan antusiasme tinggi dari para peserta. Ini ditunjukkan dalam evaluasi penyelenggaraan oleh peserta dimana 71% menyebutkan bahwa kesiapan panitia dalam penyelenggaraan kegiatan sangat baik. Adapun 35% menyebutkan pembelajaran daring/jarak jauh adalah pengalaman belajar alternatif yang menyenangkan. Untuk pelaksanaan operasional zoom menyebutkan bahwa 53% merasa bahwa zoom dapat membantu peserta memahami materi.

2. Sosialisasi Dan Loklatih Daring Penilaian Ketangguhan Kabupaten Kota Di Provinsi Jawa Barat

Perangkat Pengukuran dan Penilaian *Scorecard* disusun sesuai “Sepuluh Langkah Mendasar untuk Membangun Kota Tangguh Bencana”. Perangkat ini pertama dikembangkan sebagai bagian dari Kerangka Aksi Hyogo (*Hyogo Framework for Action*) pada 2005, dan kemudian diperbarui untuk mendukung implementasi Kerangka Kerja Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana: 2015-2030 (*the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction: 2015-2030*).

Kegiatan sosialisasi dan loklatih penilaian ketangguhan kabupaten kota dalam menghadapi bencana ini dilaksanakan juga sebagai tindak lanjut dari deklarasi Jawa Barat Resilient yang diinisiasi oleh Gubernur Jawa Barat pada bulan

Januari 2020. Secara khusus, kegiatan ini melibatkan peserta yang berasal dari Bappeda dan BPBD dari Provinsi Jawa barat dan kabupaten kota di bawahnya, diantaranya adalah Kota Bandung, Kota Sukabumi, Cirebon, Majalengka, dan Sumedang. Salah satu materi utama dalam sosialisasi dan lokalatih ialah penggunaan perangkat penilaian ketangguhan yang disebut 10 langkah mendasar atau scorecard yang dikembangkan oleh UNDDR sejak tahun 2017.

Secara keseluruhan kegiatan sosialisasi dan lokalatih penilaian ketangguhan kabupaten kota dalam menghadapi bencana yang dilaksanakan secara daring ini berjalan dengan lancar dengan antusiasme tinggi dari para peserta. Selain itu daerah peserta lokalatih ini juga akan dibantu untuk menjadi bagian dari jejaring kampanye global mewujudkan kabupaten kota tangguh bencana (*Making City Resilient Campaign*) yang diinisiasi oleh UNDRR.

### 3. Bimbingan Teknis Gerakan Pengurangan Bencana Covid-19

Penyelenggaraan bimbingan teknis Bimbingan Teknis Gerakan Pengurangan Bencana Covid-19 dengan tema “Perempuan Guru Kesiapsiagaan Bencana dan Rumah Sebagai Sekolah” dilaksanakan secara tatap muka di kota Denpasar provinsi Bali akan berlangsung selama tiga hari, tanggal 3 – 5 November 2020 berjalan dengan lancar. Terdapat 56 Peserta yang mengikuti yang berasal dari 25 lembaga pemerintah, LSM, forum PRB, lembaga/organisasi perempuan.

Kegiatan Bimtek yang dilaksanakan selama 3 (tiga) hari dibuat dengan ceramah/pemaparan fasilitator, ceramah/paparan, tanya jawab, Ceramah (paparan), Tanya Jawab, Brainstorming, Kuis, Latihan Individu, Latihan Kelompok, Games, tugas dan evaluasi penyelenggaraan.

Secara keseluruhan Bimbingan Teknis Gerakan Pengurangan Bencana Covid-19 berjalan dengan lancar dan antusiasme tinggi dari para peserta. Ini ditunjukkan dalam evaluasi penyelenggaraan oleh peserta dimana 95% menyebutkan bahwa kesiapan, kesigapan panitia dalam penyelenggaraan kegiatan sangat baik. 90% menyebutkan pembelajaran di kelas memberikan pengalaman yang menyenangkan. 87% peserta menyebutkan bahwa modul mudah dipahami. 88% peserta menyatakan penjelasan fasilitator mudah

dipahami. 85% peserta mengatakan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan protokol Kesehatan dikalankan dengan baik dan tertib.

Evaluasi penyelenggaraan peserta menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan manajemen waktu harus diperbaiki dengan adanya time keeper di setiap materi. Usulan penambahan waktu pemberian materi dan mengupas lebih dalam modul atau materi yang diberikan sehingga peserta dapat mengimplementasikan modul tersebut dengan benar, karena mungkin ada peserta yang masih baru pertama atau belum pernah mengikuti sama sekali mengikuti program Bimtek ini.



**Gambar 3.8 Bimtek “Perempuan Guru Kesiapsiagaan Bencana dan Rumah Sebagai Sekolah”**

#### 4. Rancang Bangun Sistem Arsip/Literasi Kebencanaan

Dalam rangka mendukung output rancang bangun sistem, maka telah dilaksanakan koordinasi tim studi arsip/ literasi kebencanaan pada Senin, tanggal 9 Maret 2020 di Kantor GRAHA BNPB. Dalam kegiatan ini BNPB berkolaborasi dan bekerjasama dengan K/L terkait, akademisi, praktisi, lembaga non pemerintah, dan masyarakat yang memiliki kemampuan dan kapasitas yang baik, kaitannya dengan literasi kebencanaan. Tim yang terlibat dalam studi arsip yaitu PVMBG, ANRI, Perpunas RI, Universitas Syah Kuala Banda Aceh, dan U-Inspire, serta beberapa unit eselon 2 di BNPB.

Tujuan dari rancang bangun sistem studi arsip/ literasi kebencanaan ini adalah untuk mengidentifikasi kejadian bencana yang terjadi sejak masa lampau sampai saat ini. Kejadian bencana tersebut diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi bangsa Indonesia melalui kajian dari berbagai pengalaman, pengetahuan,

dan pemikiran yang tertuang dalam arsip kebencanaan. Keluaran yang diharapkan dari kegiatan ini adalah dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam menentukan kebijakan pemerintah terkait penanggulangan bencana di Indonesia. Selain itu, untuk meningkatkan kapasitas pemerintah, masyarakat maupun unit lainnya melalui komunikasi risiko yang baik sehingga menjadi salah satu kunci penting untuk mewujudkan keberhasilan penanggulangan bencana di Indonesia.



**Gambar 3.9 Workshop Rancang Bangun Sistem Literasi Sejarah Kebencanaan**

Untuk melakukan pembahasan rancang bangun arsip dan literasi kebencanaan, BNPB melaksanakan workshop secara hybrid (fisik dan virtual) di Yogyakarta pada 27 Agustus 2020 dengan melibatkan Museum Sonobudoyo, Perpustakaan RI, PVMBG, UI, UGM, BPBD Provinsi

Daerah Istimewa Yogyakarta beserta BPBD Kabupaten/Kota disekitarnya, BPBD Provinsi Maluku, UPN Veteran Yogyakarta, Tsunami Disaster Mitigation Research Center (TDMRC)/ Unsyiah, dan U-Inspire. Workshop ini dimaksudkan untuk penyiapan teknis, konsep, dan substansi portal. Selain itu, juga mendiskusikan mengenai roadmap pembangunan sistem arsip dan literasi kebencanaan.

Kegiatan Rancang Bangun Sistem Literasi Sejarah Kebencanaan yang dilaksanakan pada tahun 2020 menghasilkan :

- a. Platform “Portal Literasi Sejarah Bencana” sebagai wujud konkret knowledge management dengan alamat <http://sejarah.dibi.bnppb.go.id/>. “Portal Literasi
- b. Sejarah Bencana” versi 1.0 dikembangkan dengan konsep pengelolaan pengguna (user management)
- c. Naskah Akademis Rancang Bangun Sistem Literasi Sejarah Kebencanaan.

Naskah akademis ini menguraikan arah kebijakan, tujuan, strategi, kerangka regulasi dan kerangka Literasi Sejarah Kebencanaan tahun 2021-2024, serta program dan target pengelolaan. Harapannya dengan memahami sejarah kebencanaan di masa lalu dapat memberikan dampak positif dalam pengurangan risiko bencana di masa depan demi terwujudnya Indonesia tangguh bencana.

5. Workshop Penyusunan Standar Pengembangan Wilayah Aman Bencana

Workshop dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 2020 di Hotel Santika, BSD pararel melalui Zoom Meeting, yang dihadiri oleh analis di lingkungan Kedeputusan Sistem dan Strategi dan tim penulis. Tim penulis memaparkan latar belakang dan urgensi, maksud dan tujuan, dan pendekatan penyusunan Standar Pengembangan Wilayah Aman Bencana.

Workshop ini juga membahas terkait judul standar yang akan dibuat apakah akan menggunakan terminologi “Standar Pengembangan Wilayah Aman Bencana”, “Standar Pembangunan Daerah Aman Bencana”, “Standar Pembangunan Wilayah Aman Bencana”, ‘Standar Pembangunan Kawasan Aman Bencana’, “Standar Pengembangan Daerah Aman Bencana” atau “Standar Pembangunan Aman Bencana Berbasis Ekosistem”.

Kegiatan ini membahas persamaan konseptual antara IKD dan *Resilience scorecards for cities* antara lain penilaian mandiri, mengukur kapasitas pemerintah daerah, menilai capaian terkait pelaksanaan kebijakan, membutuhkan pendamping/fasilitator untuk menilai dan mengumpulkan alat bukti untuk memverifikasi hasil, tingkat kerelaan/partisipasi mandiri oleh daerah masih sangat rendah. Dalam perencanaan pembangunan daerah IKD sudah masuk dalam IKU namun masih pada tataran perencanaan penanggulangan bencana belum perencanaan pembangunan daerah (RPJMD/RTRW).

Hal yang diperlukan untuk membantu BPBD/Pemda untuk optimasi penggunaan IKD terhadap penyusunan dokumen perencanaan pembangunan adalah perlunya legalitas (Perban/Perka/Perpres) adanya *reward* dan *punishment* yang bijaksana terkait apa yang sudah dilaksanakan, eskalasi lebih luas dengan sosialisasi dan penguatan fasilitator dan mengawal pemerintah daerah untuk

menuangkan IKD dalam perencanaan pembangunan daerah, restrukturisasi indikator IKD untuk membantu pemda lebih optimal menggunakan IKD.

Indeks/konsep yang sebaiknya tim kajian pelajari untuk Menyusun SPWAB antara lain SDGs walaupun dalam scorecards sudah masuk SDGs dan SFDRR, untuk membuat IKD baru perlu diidentifikasi indikator lain yang inline dengan SDGs yang sudah ada Perpresnya.

#### 6. Penyusunan Kajian Risiko Bencana (KRB)

Penyusunan KRB ditahun 2020 diutamakan untuk rencana pemerintah memindahkan Ibu Kota Negara (IKN) dan Kawasan Pariwisata. Seiring dengan kebijakan pemerintah untuk memindahkan Ibu Kota Negara (IKN) dari Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta ke Kalimantan Timur, berbagai aspek perlu dipertimbangkan untuk mewujudkan pembangunan ibu kota yang berkelanjutan. Suatu investasi pembangunan dapat saja hilang akibat adanya kejadian bencana, terlebih lagi bencana dapat mengakibatkan kerugian jiwa, materi hingga ketahanan suatu bangsa. Untuk itu, bencana merupakan aspek yang sangat penting untuk dipertimbangkan dalam perencanaan pembangunan, termasuk dalam hal pemindahan IKN.

Lokasi yang dicanangkan sebagai kawasan IKN baru adalah wilayah administrasi Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kabupaten Kutai Kartanagara (Kukar). Secara spesifik, kawasan IKN berada di lima kecamatan di dua kabupaten tersebut, yaitu Kecamatan Sepaku (PPU), dan Kecamatan Samboja, Loa Kulu, Loa Janan, dan Muara Jawa (Kukar). Berdasarkan KRB tahun 2015, kawasan ini memiliki tingkat bahaya tinggi untuk ancaman kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, gelombang ekstrim dan abrasi, dan banjir bandang, serta memiliki kelas bahaya sedang untuk jenis ancaman longsor, cuaca ekstrim, dan banjir.

Beberapa hal berkaitan dengan kajian di atas adalah KRB merupakan kajian tingkat provinsi sehingga informasi yang ditampilkan adalah lebih umum, dan menunjukkan informasi risiko statis, yaitu informasi risiko pada tahun saat kajian tersebut dilaksanakan (existing) dan tentunya tidak memasukkan skenario pembangunan kawasan IKN. Terlebih, pembangunan IKN akan mendorong

pertumbuhan ekonomi, perpindahan penduduk, pembangunan infrastruktur dan pembangunan lainnya yang dapat menimbulkan dan menimbulkan risiko bencana baru.

Untuk mendukung perencanaan penanggulangan bencana dan upaya pengurangan risiko bencana, diperlukan kajian risiko yang lebih rinci yang dapat menggambarkan ancaman bencana yang lebih akurat dan menggambarkan risiko bencana di masa mendatang sesuai dengan skenario pemindahan ibukota.

Hasil KRB IKN adalah risiko sedang untuk gempa bumi dan banjir pada kawasan inti IKN. Kemudian, pada kawasan KSN, risiko yang dihitung adalah tinggi (tsunami, tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan / karhutla), sedang (gempa bumi, banjir, cuaca ekstrim, kekeringan) dan rendah (amblesan tanah, epidemi dan wabah penyakit);

Hambatan selama proses penyusunan kajian adalah lambatnya pengiriman data oleh K/L yang menjadi walidata peta bahaya dan kurang tersedianya data (selain dari kerjasama K/L) yang dapat memenuhi proses analisis bahaya dengan kedetailan skala 1:5.000;

Solusi yang dilakukan untuk mengatasi kendala adalah meningkatkan koordinasi antar K/L dengan menemukan aktor kunci yang dapat menjembatani akses data yang dibutuhkan dan melakukan penambangan data spasial (spatial data mining) melalui berbagai analisis dengan menggunakan data utama yang tersedia agar dapat dilakukan derivasi data yang dibutuhkan.

Sedangkan KRB Kawasan Pariwisata dilakukan untuk mengetahui kemungkinan dan besaran kerugian akibat bencana di daerah wisata sehingga perencanaan dan keterpaduan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah wisata tersebut menjadi lebih efektif. Tahun 2020, BNPB melakukan penyusunan KRB 3 destinasi wisata super prioritas yaitu Danau Toba (Provinsi Sumatera Utara); Borobudur (Provinsi Jawa Tengah); dan Likupang (Provinsi Sulawesi Utara)..

Tujuan koordinasi adalah sosialisasi kegiatan penyusunan kajian, penyepakatan batas deliniasi kajian dan pengambilan data primer dan sekunder yang dimiliki oleh stakeholder daerah. Peserta berasal dari perwakilan BPBD, Bappeda dan

Litbangda, Dinas PUPR, Dinas Kesehatan dan Dinas Pariwisata Kabupaten Magelang dan Pemerintah Provinsi.

Industri pariwisata memerlukan penanganan khusus terkait dengan bencana yang dipicu oleh faktor alam dan non-alam, salah satunya adalah dengan melakukan kajian risiko bencana. Kajian risiko bencana pada daerah wisata dilakukan untuk mengetahui kemungkinan dan besaran kerugian akibat bencana di daerah wisata sehingga perencanaan dan keterpaduan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah wisata tersebut menjadi lebih efektif.

#### 7. Pelaksanaan Asistensi Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi dan Kabupaten/ Kota

Kegiatan asistensi penyusunan KRB dilaksanakan dengan menyesuaikan jadwal pelaksanaan di daerah. Proses asistensi diawali dengan komunikasi dengan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota/Provinsi yang dalam hal ini diwakili oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Dalam komunikasi ini, BPBD dapat langsung berkonsultasi melalui telepon dan referensi-referensi yang dibutuhkan dikirim secara daring. Dalam hal diperlukan pertemuan tatap muka untuk memudahkan proses asistensi, melalui komunikasi ini ditentukan jadwal pertemuan. Berdasarkan prosedur ini, sudah dilakukan beberapa konsultasi dengan pemerintah daerah yaitu Kabupaten Banjar, Provinsi Banten, Kabupaten Tegal, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Kalimantan Selatan.

Beberapa model teknis KRB yang telah disusun, BNPB melakukan review kembali untuk disesuaikan. Modul KRB yang direview yaitu KRB Jabodetabekpunjur untuk bencana banjir dan longsor. Kegiatan review dilaksanakan secara daring pada tanggal 11 September 2020. Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan dari BNPB, BIG, PVMBG, ITB, dan IPB. Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah sosialisasi modul teknis penyusunan KRB banjir dan longsor, mendapatkan masukan dari K/L dan akademisi terkait modul tersebut, dan memastikan modul telah siap digunakan oleh peserta bimtek KRB.



**Gambar 3.10 Review KRB jabodetabekpunjur**

**8. Pelaksanaan Penilaian Ketangguhan Kabupaten/Kota Tangguh Bencana**

Dalam konteks kota, ketangguhan dapat dimaknai sebagai kemampuan kota untuk dapat bertahan dan bangkit kembali baik dari guncangan/shock maupun dari tekanan/Stress. Guncangan dapat bersifat alami maupun buatan manusia, seperti banjir, gempa bumi, badai, kebakaran hutan dan lahan, tumpahan kimia, dan kegagalan teknologi lainnya. Sedangkan tekanan/stress yang dihadapi sebuah kota biasanya terjadi dalam rentang waktu yang lebih lama, seperti menghilang atau berkurangnya air tanah, deforestasi, atau isu-isu sosio-ekonomi seperti krisis ekonomi dan pengangguran.

Ketangguhan bencana, dalam kaitannya dengan Perangkat Kerja Pengukuran dan Penilaian scorecard, akan membantu mengidentifikasi kemampuan sebuah kota untuk memahami risiko-risiko bencana yang mungkin dihadapinya. Selain itu perangkat ini juga membantu kota dalam memitigasi risiko-risiko tersebut dan untuk merespon bencana-bencana yang mungkin terjadi sehingga kerugian langsung maupun jangka panjang atas nyawa atau kerugian mata pencaharian, properti, infrastruktur, aktivitas ekonomi dan lingkungan dapat diminimalisasi.

Pada tahun 2020, sebagai upaya dalam mendukung penanganan Covid-19 yang sedang dilaksanakan oleh banyak pemerintah daerah di dunia, perangkat penilaian scorecard kembali disempurnakan dengan menambahkan komponen Struktur Penilaian Ketahanan Sistem Kesehatan Masyarakat. Penambahan ini kemudian diintegrasikan ke dalam komponen “Sepuluh Langkah Mendasar untuk Membangun Kota Tangguh Bencana” seperti pada perangkat penilaian aslinya sesuai dengan komponen Langkah mendasar yang relevan.



**Gambar 3.11 Lokakarya Penilaian Kab/Kota Tangguh Bencana Kota Semarang**

BNPB juga melakukan Sosialisasi dan Lokakarya Penilaian Kabupaten/Kota Tangguh Bencana yang bertujuan untuk memperkenalkan perangkat penilaian ketangguhan dan mendukung pemerintah dalam menyusun rencana aksi dalam rangka meningkatkan

ketangguhan di daerah. Selain itu, melalui lokakarya ini diharapkan muncul diskusi untuk menjangkau Identifikasi gap serta berbagai saran menyempurnakan perangkat scorecard yang secara khusus akan diimplementasikan di Indonesia. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah memberikan informasi dan mendorong pemerintah daerah untuk ikut serta dalam kampanye global mewujudkan kota Tangguh bencana. Mensosialisasikan Program Kota Tangguh serta perangkat penilaiannya. Mendukung pemerintah daerah dalam upaya penilaian serta perumusan rencana aksi untuk meningkatkan ketangguhan dalam menghadapi bencana. Locus kegiatan berlokasi di Kabupaten Badung, Kota Semarang, Kabupaten Lumajang, dan Kabupaten Badung.

#### 9. Pengembangan Sistem InaRisk

Kegiatan meliputi pertemuan fisik dan secara virtual dengan bahasan tentang persiapan sosialisasi aplikasi InaRISK personal versi 4.0 dengan melibatkan unit kerja BNPB serta narasumber.

Hasil yang dicapai dari rapat tersebut adalah adanya masukan dan kesepakatan tentang konsep video yang akan digunakan untuk sosialisasi InaRISK dan fitur Monev SPAB, portal literasi sejarah kebencanaan serta pembelajaran penanganan COVID-19 melalui KKN Tematik. Video launching untuk 3 produk tersebut akan ditayangkan pada saat peringatan bulan PRB 2020.

Dari hasil pertemuan akan dilakukan integrasi data dalam InaRisk dengan menggandeng Pusdatinkomben BNPB. Diharapkan dari sistem InaRisk ini dapat membangun rancang bangun sistem nasional untuk ketangguhan bangsa

menghadapi bencana. Selain itu, pengembangan sistem inarisk ke depannya agar lebih dapat optimal dan terarah. Dokumen yang dihasilkan sifatnya dinamis jadi bisa diperbaiki dan ditambahkan sesuai kebutuhan.



**Gambar 3.12 FGD Pengembangan Sistem InaRisk**

#### 10. Rancang Bangun Sistem KKN Tematik Covid 19

BNPB menyusun dokumen Rancang Bangun Sistem Penanggulangan Bencana Edukasi COVID-19 Berbasis Masyarakat, yang dapat menjadi media pembelajaran untuk seluruh pihak dalam mengedukasi masyarakat agar dapat beradaptasi pada kebiasaan baru yang produktif dan aman COVID-19.

Maksud dari Rancang Bangun Sistem Penanggulangan Bencana Edukasi COVID-19 Berbasis Masyarakat adalah untuk merumuskan sebuah konsep penanggulangan bencana pandemi berbasis pemberdayaan masyarakat melalui program KKN Tematik, dengan tujuan, Memetakan keterlibatan stakeholder dalam pelaksanaan upaya percepatan penanganan COVID-19 melalui program yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.

Pada pelaksanaan edukasi Covid-19 berbasis masyarakat melalui pelaksanaan KKN Tematik. Pelaksanaan KKN Tematik ini untuk mengaktifkan kembali peran perguruan tinggi dalam membantu pengurangan penyebaran COVID-19 serta

menciptakan masyarakat yang aman dan produktif melalui langkah percepatan dan kolaborasi pentahelix. BNPB melaksanakan monitoring kegiatan KKN Tematik di Cilincing (Jakarta).

#### 11. Sistem Peringatan Dini Bencana

Pada RPJMN 2020 s.d 2024 Direktorat Peringatan Dini memiliki sasaran untuk meningkatkan kualitas dan ketahanan infrastuktur terhadap bencana banjir, gempa bumi, letusan gunung berapi dan tanah longsor. Indikator keberhasilan sasaran tersebut adalah tersedianya sistem peringatan dini. Hal ini bertujuan agar terselenggaranya layanan peringatan dini kepada masyarakat. Hal tersebut juga Sejalan dengan kesepakatan dunia dan keberlanjutan dari Hyogo Framework for Action (HFA) yang telah selesai, maka diterbitkan acuan dalam bencana yaitu Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030. Tujuan dari kerangka ini adalah mengurangi risiko, mencegah dan menurunkan keterpaparan dan kerentanan serta meningkatkan ketangguhan melalui peningkatan kewaspadaan, tanggap dan pemulihan.

Pada tahun 2020 adalah dilaksanakannya pemasangan EWS di 6 Lokasi. Kegiatan ini dilaksanakan mengacu pada SNI 8840-1:2019 tentang Sistem Peringatan Dini Bencana dan ISO 22328:2019 tentang Sistem Peringatan Dini Multibencana Berbasis Pemberdayaan Masyarakat. Rincian lokasi pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut:

- a. Sistem Peringatan Dini Banjir/ *Flood Early Warning System* (FEWS) : Kab. Belitung, Provinsi Bangka Belitung ;





**Gambar 3.13 Pemasangan Instrumentasi FEWS, di Kab. Belitong**

- b. Sistem Peringatan Dini Longsor/ *Landslide Early Warning System* (LEWS):  
di Kawasan Patahan Kendeng (Kota Semarang di Provinsi Jawa Tengah);



**Gambar 3.14 Pemasangan Instrumentasi LFEWS, di Kota Semarang**

- c. Pemasangan Sirine Tsunami : KEK Mandalika, kab. Lombok Tengah Provinsi NTB, kawasan rawan tsunami di Kabupaten Kepulauan Mentawai Provinsi Sumatera Barat, kawasan rawan tsunami Selatan Jawa Timur di Kab. Banyuwangi, dan Kawasan Rawan Tsunami Nias di Kab Nias Selatan.

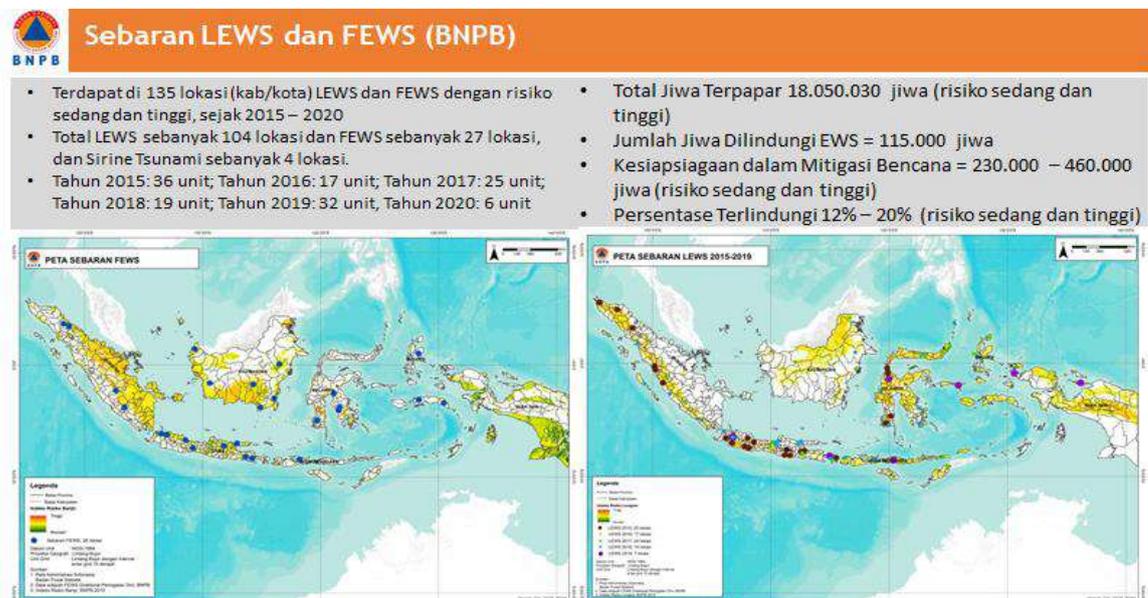
## Sistem Peringatan Dini



**Gambar 3.16 Sistem Peringatan Dini**

Sejak tahun 2015 – 2020, BNPB telah melaksanakan pemasangan EWS di 135 lokasi (kab/kota) LEWS dan FEWS dengan risiko sedang dan tinggi, Total LEWS sebanyak 104 lokasi, FEWS sebanyak 27 lokasi, dan Sirine Tsunami sebanyak 4 lokasi. Berikut ini gambaran sebaran pemasangan LEWS dan FEWS yang telah dilaksanakan oleh BNPB.

Beberapa kekurangan yang harus diperbaiki ke depannya, sehingga telah



**Gambar 3.15 Sebaran LEWS dan FEWS BNPB**

disusun untuk beberapa rekomendasi kedepan pelaksanaan pemasangan instrumentasi peringatan dini sebagai berikut:

- a. Perkuat dan perbaiki aspek perencanaan, pertimbangkan dan analisis kondisi eksisting di lapangan untuk (1) penentuan desa dan titik lokasi pemasangan alat, (2) pelaksanaan kegiatan sosialisasi, penyusunan SOP, pembentukan tim siaga dan gladi.
- b. Sinergikan program pemasangan instrumentasi sistem peringatan dini dengan destana. Fasilitator Desa (Fasdes) yang dibentuk pada kegiatan Destana, dapat membantu untuk persuasi ke masyarakat, agar mendukung dan kesadaran bersama untuk melakukan pemeliharaan kedepan.
- c. Langkah-langkah perbaikan terhadap konsep pelaksanaan pekerjaan :
  - Pembuatan alat perlu diseleksi ulang, apakah ada alternatif untuk dilakukan oleh pihak penyedia;
  - Pastikan kebutuhan koneksi jaringan di lapangan baik untuk jaringan utama dan backup. Perhatikan topografi wilayah dan jarak serta ketersediaan sumber daya jaringan komunikasi yang dimiliki BPBD;
  - Perkuat strategi membangun komitmen untuk pemangku kepentingan maupun kesadaran masyarakat, baik selama pelaksanaan kegiatan maupun setelah kegiatan (pemeliharaan dan keberlangsungan);
  - Perlu dipertimbangkan pengalaman universitas lokal, yang memiliki kompetensi lebih baik;
  - Penyusunan panduan/pedoman pelaksanaan untuk 6 subsistem. Selanjutnya lakukan pembekalan pedoman bagi personil tim Direktorat Peringatan Dini sebelum dilakukan pembekalan kepada fasdes atau tim siaga;
  - Perlu ditentukan mekanisme pelibatan ASN dalam keanggotaan Tim Siaga Bencana, apabila masyarakat disekitar pemasangan alat belum dapat mandiri.

Dalam mendukung seluruh kegiatan, dilaksanakan penyusunan Kebijakan Teknis sebagai dasar aktivasi sistem peringatan dini multi hazard di suatu lokasi dan juga untuk menyusun kebijakan terkait peran masing-masing pihak yang terlibat baik dalam bentuk peraturan badan, petunjuk pelaksanaan, ataupun standar operasional prosedur selain pedoman/panduan yang sudah ditetapkan. Penyusunan Dokumen Kebijakan Teknis berupa *Concept Note* kerangka regulasi Sistem Peringatan Dini.

Kegiatan pendukung dalam Sistem Peringatan Dini Bencana adalah pengintegrasian sistem peringatan dini yang dilakukan dengan pembuatan dashboard pencegahan. Tujuan pembuatan Dashboard pencegahan bencana ini agar dapat menyediakan informasi hasil analisis terpadu yang efektif, hasil koordinasi BNPB dengan Kementerian/Lembaga terkait, sebagai upaya dalam pencegahan bencana. Informasi yang dihasilkan dari dashboard ini dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam perencanaan tata ruang dan tata wilayah, serta pengambilan kebijakan-kebijakan lainnya di Indonesia.

Sebagai inisiatif awal penyusunan Dashboard Pencegahan tahun 2020 difokuskan dalam pengelolaan bencana di wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS). DAS menjadi fokus yang dipilih dikarenakan umumnya kejadian bencana dipengaruhi oleh kualitas Daerah Aliran Sungai (DAS). Bencana-bencana yang terjadi di DAS antara lain banjir, longsor, kekeringan, dan banjir bandang. Wilayah DAS Citarum dipilih menjadi inisiatif awal dalam penyusunan Rancang Sistem Dashboard Pencegahan karena menjadi DAS yang diprioritaskan untuk pemulihan. Kegiatan Koordinasi Pengintegrasian Sistem Peringatan Dini telah menghasilkan output yaitu dokumen Rancang bangun sistem Dashboard Pencegahan Tahun 2020 - 2024 dan Prototipe aplikasi Dashboard Pencegahan.

Salah satu bagian terpenting lainnya adalah kegiatan diseminasi dan evaluasi integrasi sistem peringatan dini bencana. Kegiatan ini juga merupakan kegiatan partisipatif dengan masyarakat untuk penyebaran informasi peringatan dini, memastikan upaya yang cepat dan tepat dalam merespon peringatan dini dan bertahan menghadapi kejadian bencana serta melakukan evaluasi sistem peringatan dini. Bentuk kegiatannya dengan metode sosialisasi yang efektif kepada masyarakat terkait Peringatan Dini kebencanaan. Selain itu proses diseminasi juga harus efektif, menjangkau lapisan masyarakat dan informasi bencana yang disampaikan dapat dimengerti. Kegiatan ini meliputi pemberian peringatan dan langkah kesiapsiagaan kepada daerah dan sebagai dasar pengambilan keputusan

bagi pejabat berwenang. Output Kegiatan ini adalah Rekomendasi atau himbauan kepada pemerintah daerah dan atau masyarakat.

Seluruh kegiatan yang menjadi bagian dari kegiatan pendukung tersebut memiliki peran yang penting dalam upaya pengurangan risiko bencana meskipun tidak masuk sebagai kegiatan prioritas nasional. Hal ini dikarenakan kegiatan – kegiatan tersebut memiliki tujuan untuk membangun dan meningkatkan kewaspadaan baik pemerintah maupun masyarakat terhadap bencana. Salah satunya adalah kegiatan sistem peringatan dini terintegrasi. Dalam kegiatan tersebut menjangkau lapisan masyarakat dan informasi bencana yang disampaikan dapat dimengerti.

## 12. Desa Tangguh Bencana

Untuk dapat mewujudkan peningkatan ketangguhan masyarakat ini, dibutuhkan keterlibatan berbagai sumberdaya atau pihak lainnya yang juga sejalan dengan visi dan misi ketangguhan bencana tersebut. Adapun sumberdaya yang terlibat merupakan beragam unsur seperti pemerintah daerah, organisasi non-pemerintah, organisasi social kemasyarakatan, akademisi, Lembaga usaha, masyarakat, dan media.

Upaya yang dilakukan oleh BNPB dalam meningkatkan ketangguhan masyarakat dalam penanggulangan bencana melalui Pengembangan dan penguatan Desa Tangguh Bencana (Destana). Destana merupakan program memberdayakan potensi masyarakat untuk dapat meningkatkan kapasitas dan ketangguhan mereka dalam menghadapi bencana di daerahnya. BNPB mulai melaksanakan program Desa Tangguh Bencana pada tahun 2012 seiring terbitnya Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Desa/Kelurahan Tangguh Bencana. Desa Tangguh Bencana adalah desa yang memiliki kapasitas untuk beradaptasi, menghadapi bahaya, dan pulih dalam waktu singkat dari bencana. Pada tahun 2020 ini, pelaksana Desa Tangguh Bencana yakni Direktorat Kesiapsiagaan.

Destana tahun 2020 bertemakan Ekspedisi Desa Tangguh Bencana Tsunami dan Covid-19 di sepanjang pesisir barat Pulau Sumatera yang membentang

dari Provinsi Aceh, Sumatera Utara, hingga Sumatera Barat. Adapun bentuk kegiatan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan penguatan desa tangguh bencana
- 2) Melaksanakan pembekalan fasilitator desa tangguh bencana multipihak
- 3) Fasilitasi penilaian ketangguhan desa (PKD)

Pelaksanaan ekspedisi Destana tahun ini membutuhkan adaptasi dan modifikasi dalam teknis pelaksanaannya. Hal ini karena mempertimbangkan situasi dan kondisi saat ini dalam masa pandemi Covid-19. Ekspedisi Destana Pesisir Pantai Barat Pulau Sumatera tahun 2020 terbagi dalam 3 segmen, 12 Kabupaten/Kota, dan 120 Desa/Kelurahan yaitu :

- 1) Segmen 1 ; Provinsi ACEH yang terdiri dari 7 KAB/KOTA, 10 DESA/KEL. (Banda Aceh, Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Aceh Singkil)
- 2) Segmen 2 ; SUMATRA UTARA yang terdiri dari 2 KAB/KOTA, 10 DESA/KEL (Mandailing Natal, Tapanuli Tengah, Nias)
- 3) Segmen 3 ; SUMATRA BARAT yang terdiri dari 3 KAB/KOTA, 10 DESA/KEL (Padang, Padang Pariaman, Pariaman, Mentawai)

Ekspedisi Destana Tsunami Sumatera 2020 merupakan kegiatan penilaian ketangguhan desa/kelurahan di kawasan rawan bencana tsunami pantai barat Sumatera. Inti dari kegiatan ini yakni menilai kesiapan suatu desa/kelurahan dalam menghadapi bencana tsunami dan sekaligus memulihkan diri dari dampaknya. Pemberian nilai tersebut menggunakan ukuran-ukuran (indikator) sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) Nomor 8357:2017, tentang Desa dan Kelurahan Tangguh Bencana.

Menghadapi pandemi Covid-19, penilaian ketangguhan ini diperluas hingga penilaian tingkat risiko Covid-19 dan penerapan protokol normal baru. Penilaian tingkat risiko Covid-19 mengacu pada Surat Edaran Menteri Desa PDTT Nomor 8 tahun 2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19. Penerapan protokol normal baru mengacu pada Surat Keputusan Kemendesa PDTT Nomor 63 Tahun 2020. Perluasan penilaian ini untuk mengukur tingkat

keberhasilan perwujudan masyarakat desa yang produktif dan aman dari penularan COVID-19, meningkatkan dukungan pemerintah desa dan segenap elemen masyarakat desa dalam pencegahan penularan COVID-19 serta menciptakan tata kelola desa dalam pencegahan penularan COVID-19 melalui adaptasi pola hidup bermasyarakat dalam tatanan normal baru.

Lokasi penyelenggaraan Ekspedisi Destana ini berada pada 12 kabupaten/kota dan 120 desa/kelurahan yang terletak di sepanjang pesisir barat Pulau Sumatera di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang berpotensi ancaman tsunami. Berikut ini gambaran lokasi kegiatan desa tangguh bencana tsunami tahun 2020 beserta table nama-nama desa/kelurahan sasaran program.



**Gambar 3.17 Lokasi Destana di Pulau Sumatera**

Adapun kegiatan-kegiatan secara keseluruhan program Desa Tangguh Bencana di tahun 2020 yaitu:

- A. Workshop Persiapan Pembekalan PKD
- B. Rekrutmen Manajer Area
- C. Rekrutmen Fasilitator Daerah
- D. Rekrutmen Fasilitator Desa
- E. Koordinasi Pra Pembekalan

- F. Pelatihan/Pembekalan (Manajer Area, Fasda, Fasdes)
- G. Pengumpulan Bahan Verifikasi
- H. Pelaksanaan Destana Tsunami
  - 1) Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja,
  - 2) Koordinasi & Sosialisasi di Desa/Kelurahan,
  - 3) Pengumpulan, Validasi, dan Penilaian Ketangguhan Desa,
  - 4) Pembentukan Forum PRB & Relawan Desa,
  - 5) Pemasangan Papan Informasi Bencana Tsunami,
  - 6) Seminar Akhir

Gambar di bawah ini menjelaskan alur kegiatan secara rinci mengenai kegiatan-kegiatan selama di desa/kelurahan.



Gambar 3.18 Alur Progres Kegiatan Ekspedisi Destana Tsunami

- 1) Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja

Tahap awal sebelum turun ke lapangan, Manajer Area, fasilitator daerah, dan fasilitator desa melakukan pertemuan koordinasi penyusunan rencana kerja selama 2,5 bulan ke depan. Pada pertemuan ini didata kembali nama-nama fasilitator daerah dan fasilitator desa yang terlibat di setiap kabupaten/kota dan desa/kelurahan. Hasil pertemuan ini berupa Rencana Kerja Fasilitator Daerah dan Desa dalam melakukan Ekspedisi Desa

Tanggung Bencana Tsunami dan Covid-19 di masing-masing daerah, yang disetujui oleh manajer area. Pertemuan ini diselenggarakan di masing-masing kabupaten/kota.



**Gambar 3.19. Pertemuan koordinasi penyusunan rencana kerja**

## 2) Koordinasi & Sosialisasi di Desa/Kelurahan

Setelah Rencana Kerja disusun dan disepakati, setiap kabupaten/kota menyelenggarakan pertemuan koordinasi dan sosialisasi kepada pemerintah dan masyarakat desa/kelurahan untuk memberikan pengenalan awal pada program Desa Tangguh Bencana Tsunami ini. Sosialisasi ini bertujuan agar perangkat dan masyarakat desa/kelurahan memahami, menerima, dan bekerja sama untuk menyelenggarakan program desa tangguh bencana secara sukarela yang akan didampingi oleh para fasilitator. Selain itu, agar perangkat desa/kelurahan turut partisipatif dalam pemberian data dan informasi yang ingin didapatkan dari pihak fasilitator. Hal ini untuk memudahkan fasilitator dalam bekerja dan berinteraksi dengan masyarakat selama di desa/kelurahan. Hasil dari pertemuan ini yakni perangkat dan masyarakat desa/kelurahan



**Gambar 3.20 Koordinasi & Sosialisasi di Desa/Kelurahan**

menyetujui bahwa desa/kelurahannya dijadikan program desa tangguh bencana.

### 3) Pengumpulan, Validasi, dan Penilaian Ketangguhan Desa

Kegiatan ini dilakukan oleh fasilitator daerah dan fasilitator desa/kelurahan. Fasilitator mendatangi perangkat desa/kelurahan di kantornya masing-masing guna mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan pada penilaian ketangguhan desa ini. Fasilitator menggunakan *tools* penilaian yang telah ditentukan BNPB yakni berupa modul penilaian ketangguhna desa (PKD), dan kemudian di input ke dalam data PKD agar langsung terlihat besaran nilai ketangguhan yang didapat dari setiap desa/kelurahan. Berikut ini cara pengumpulan dan validasi data yang digunakan untuk penilaian ketangguhan desa yang dilakukan oleh fasilitator;

- Fasda dan Fasdes melakukan rapat penentuan pembagian kerja untuk pengumpulan data
- Fasda dan Fasdes melakukan wawancara dengan lurah dan sekretaris lurah untuk ketersediaan data sebagai bahan verifikator
- Fasda dan fasdes mencari dan mengumpulkan dokumen dan foto yang terdapat di kelurahan terkait ketangguhan bencana dan risiko covid-19
- Fasda dan fasdes mencari data yang belum lengkap ke BPBD terhadap pengarsipan kegiatan yang pernah dilakukan di 10 desa/kelurahan
- Fasda dan Fasdes mencari data yang belum lengkap ke kelurahan dan kecamatan
- Fasda dan fasdes melakukan pertemuan dengan kelurahan terhadap hasil-hasil yang didapatkan di lapangan
- Fasda dan fasdes mengidentifikasi bangunan/fasilitas yang tersedia untuk bahan verifikasi ketangguhan bencana dan risiko bencana



**Gambar 3.21 Pengumpulan dan Validasi Penilaian Ketangguhan Desa**

- 4) Pembentukan Forum PRB & Relawan Desa,
  - 5) Pemasangan Papan Informasi Bencana Tsunami
  - 6) Seminar Akhir
  - 7) Hasil PK
13. Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana

Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) dan Rencana Kontingensi (Renkon) perlu disiapkan kebijakan untuk menaunginya sebagai pedoman bagi daerah dalam menyusun dokumen-dokumen tersebut. BNPB merancang Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang RPKB dan Renkon. Perlunya membuat Perban RPKB dan Renkon disebabkan belum adanya produk hukum terkait RPKB dan Renkon, belum adanya produk terkait RPKB, serta sebagai turunan perban diharapkan terbitnya pedoman teknis penyusunan Renkon sebagai acuan bagi Kabupaten/Kota (terkait SPM Permendagri No. 101 Tahun 2018).

Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, terdapat tahap prabencana yang meliputi kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam situasi tidak terjadi bencana dan terdapat potensi bencana. Pada situasi tidak terjadi bencana, salah satu upaya yang dilakukan adalah penguatan kesiapsiagaan dimana salah satu kegiatannya adalah menyusun sekaligus mengujicobakan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB). RPKB merupakan acuan bagi pelaksanaan penanggulangan bencana untuk dipakai sebagai doktrin yang dianut dalam menanggapi keadaan darurat. Penyusunannya dilakukan di saat situasi normal atau sebelum bencana terjadi oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah melalui fungsi koordinasi BNPB dan/atau BPBD.

Muatan RPKB adalah sebagai: (1) Lebih sebagai kerangka pikir/kerja; (2) kebijakan dan strategi yang menjadi acuan bagi perencanaan dan pelaksanaan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat; (3) Bersifat umum dan berlaku untuk jangka waktu yang cukup panjang; (4) tugas & tanggung jawab dari berbagai pihak baik saat sebelum dan saat tanggap darurat; (5) Multi bahaya atau ancaman; (6) Disusun secara terkoordinasi oleh BNPB dan/atau BPBD serta pemerintah daerah.

Secara umum jalannya penyusunan RPKB adalah sebagai berikut:

1. *Pembahasan Skenario*, dengan membagi menjadi 4 Kelompok untuk membahas potensi ancaman yang ada di wilayah kota Kediri berdasarkan Kajian Risiko Bencana yang ada. Dalam pembahasan ini disepakati bahwa benar ancaman yang ada di Kota Kediri adalah Bencana Banjir, Cuaca Ekstrem, Longsor, Gempabumi.
2. *Perencanaan Operasi*, dibagi menjadi 3 kelompok yakni fase Siaga Darurat, Tanggap Darurat dan Transisi Darurat Kepemulihan. Dalam tahap ini setiap fase menyimpulkan tindakan apa yang dilakukan pada saat siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan.
3. *Fungsi dan Tugas*, Dibagi tiga kelompok tematik yakni Bidang Komando dan Administrasi, Bidang Operasi dan Bidang Perencanaan dan Logistik. Tahap ini dihasilkan struktur organisasi dan juga siapa yang menduduki posisi pada struktur organisasi.
4. *Instruksi Koordinasi*, dilakukan secara pleno, membahas kebijakan yang akan dilakukan saat melakukan upaya penanggulangan bencana. Pada tahap ini dihasilkan draft awal Instruksi Koordinasi yang selanjutnya akan disempurnakan sesuai dengan kebutuhan.
5. *Perencanaan Logistik*, dilaksanakan secara Pleno yang membahas tiga pokok bahasan yakni Rencana Dukungan Anggaran, Rencana Perbekalan dan Estimasi Ketersediaan Sumber Daya.

6. *Jaring Komunikasi*, pada tahap ini dilakukan secara pleno membahas tentang jaring Komunikasi yang akan digunakan saat operasi penanggulangan bencana, disampaikan oleh Senkom dan Orari. Pada tahap ini disepakati Frekuensi frekuensi radio amatir yang akan digunakan serta mekanisme komunikasinya.



**Gambar 3.22 Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana**

#### 14. Pemberdayaan sumberdaya dan penguatan ketahanan masyarakat

Kegiatan pemberdayaan sumberdaya dan penguatan ketahanan masyarakat merupakan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk melakukan keterlibatan sumberdaya dalam upaya penanggulangan bencana, antara lain keterlibatan masyarakat, pemerintah daerah, organisasi social masyarakat, relawan, lembaga usaha, perguruan tinggi, dan lainnya. Sumberdaya-sumberdaya yang berpotensi ini juga dilakukan penguatan ketahanannya agar memiliki ketangguhan dalam menghadapi bencana secara menyeluruh dan mandiri. Sumberdaya ini dijadikan mitra BNPB dalam mewujudkan ketangguhan bencana.

Untuk mengubah paradigma masyarakat yang selama ini reaktif menjadi proaktif ke PRB diperlukan suatu media sosialisasi yang dapat memberikan

stimulus terlaksananya pemahaman tersebut. Oleh sebab itu perlu dibentuk Forum Pengurangan Risiko Bencana yang dapat mengakomodir kepentingan masyarakat terkait PRB. Forum PRB merupakan forum multi pihak di mana keanggotaannya (para pelaku) berasal dari berbagai unsur seperti pemerintah, dunia usaha, masyarakat, media massa, akademisi, organisasi sosial masyarakat/NGO.

BNPB terus berupaya “mengaktifkan” forum-forum di daerah yang berbasis pengurangan risiko bencana, baik itu membentuk forum baru ataupun forum yang sudah ada di daerah. Forum PRB nantinya akan menjadi modal dan tanggung jawab setiap daerah, dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, hingga ke desa/kelurahan. Pada tahun 2020 ini, Direktorat Kesiapsiagaan menargetkan pengembangan dan inisiasi pembentukan Forum PRB di 2 (dua) lokasi, yakni Provinsi Jawa Timur dan D.I. Yogyakarta.



**Gambar 3.23 Forum Pengurangan Risiko Bencana di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta**

Forum PRB bertugas memastikan pembangunan di daerah berbasis PRB, memastikan kebijakan yang ada tidak menimbulkan bencana baru, memastikan kelembagaan BPBD dapat bersinergi dengan baik antara OPD, pemda dan LU, memastikan anggaran PB cukup sesuai dengan kebutuhan daerah, memastikan pemberdayaan masyarakat di daerah tersebut, memastikan ketangguhan 7 objek vital seperti sekolah, pasar, kantor, terminal, dan lain-lain.

Tantangan besar yang harus dihadapi dalam penanggulangan bencana saat ini adalah pelaksanaan protocol kesehatan di tempat pengungsian agar tidak terjadi penyebaran covid-19. Selain itu disampaikan peran dari Forum PRB dalam melakukan diseminasi informasi kepada masyarakat setempat, Forum PRB bersinergi dengan unsur pemerintah untuk aktivasikan kembali pusdalops, serta memastikan pembangunan yang berkelanjutan di daerah harus berbasis pengurangan risiko bencana.

Dalam rangka menguatkan dan meningkatkan kapasitas relawan penanggulangan bencana, juga dilaksanakan pertemuan sinergitas untuk menyusun strategi dalam penanggulangan bencana di tengah kondisi pandemi covid-19 ini dengan meningkatkan sinergitas antar organisasi relawan dalam upaya penanggulangan bencana, serta peran serta relawan penanggulangan bencana di lapangan. Bersinergi tidak harus dilatarbelakangi oleh sebuah kesamaan namun dalam kebencanaan sinergi dapat dilakukan oleh semua pihak sampai ke grassroot dan tanpa sekat. Salah satu kunci untuk sinergi dalam aksi adalah ta'aruf atau saling mengenal satu sama lain.



**Gambar 3.24 Koordinasi & Dukungan Temu Relawan PB, Mojokerto 27-29 November 2020**



**Gambar 3.25 Sinergitas Relawan PB dalam menghadapi bencana, Bekasi 20 November 2020**



**Gambar 3.26 Rakor Lintas sektor & Forum PRB, Babel 8 Desember 2020**

Relawan harus bekerja berdasarkan panca dharma relawan yaitu: mandiri, professional, solidaritas, sinergi, dan akuntabel serta tetap menerapkan protocol kesehatan selama pandemi covid-19 ini. Relawan harus mampu menyelamatkan dirinya sendiri sebelum menyelamatkan orang lain.

Pentingnya sel-sel aktif relawan sampai di tingkat RT untuk dapat digerakkan dalam penanganan bencana, membangun ketangguhan mulai dari level akar rumput salah satunya dengan menggandeng tokoh agama karena dipercaya

oleh umatnya membangun generasi sadar bencana melalui pendidikan di sekolah aman dan penguatan kapasitas bagi relawan.

#### 15. Satuan Pendidikan Aman Bencana

Program Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) tercatat sebagai prioritas nasional di Tahun 2020. Implementasi program SPAB telah berjalan sejak tahun 2015 dengan berbagai strategi. Pada awalnya implementasi SPAB ini dilakukan secara langsung ke sekolah, warga sekolah tertentu mendapatkan bimbingan perihal bagaimana cara menerapkan SPAB di sekolah. Pada tahun 2020 ini BNPB menjalin Kerjasama dengan Muhammadiyah khususnya Hizbul Wathan (HW) dan Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) untuk melakukan implementasi SPAB di satuan pendidikan Muhammadiyah melalui gerakan kependuan HW. Keterlibatan Lembaga-lembaga tersebut bertujuan untuk menjadikan implementasi program SPAB menjadi sebuah program yang tidak hanya diinisiasi oleh BNPB, tetapi kemudian akan menjadi sebuah gerakan yang dilakukan secara masif.

Satuan Pendidikan Aman Bencana bertujuan melindungi nyawa (*save more life*), keselamatan warga sekolah, dan menjaga agar sekolah/madrasah dibangun sesuai dengan ketentuan keamanan dan keselamatan, serta dapat menjalankan fungsi sebagai sarana pendidikan pada saat tanggap bencana. Kegiatan sekolah aman dilakukan melalui peningkatan kapasitas seluruh warga sekolah termasuk komite sekolah, orang tua siswa dan pemerintah desa. Sasaran utama Satuan Pendidikan Aman Bencana adalah:

- 1) Memberikan perlindungan keselamatan Ketika terjadi bencana kepada murid sekolah, guru dan tenaga lainnya.
- 2) Memastikan keberlangsungan kegiatan belajar mengajar (KBM) di sekolah selama terjadinya bencana.
- 3) Melindungi investasi sektor Pendidikan.
- 4) Memperkuat ketahanan terhadap bencana melalui pendidikan dan perilaku cerdas iklim.

Rangkaian pelaksanaan Implementasi SPAB diawali oleh Bimbingan Teknis yang bertujuan untuk membekali pelatih Gerakan kependuan agar memiliki

wawasan terkait kebencanaan khususnya SPAB. Melalui bimbingan teknis ini, diharapkan pembina Gerakan kepanduan dapat menjadi fasilitator daerah yang kemudian dapat mengimplementasikan SPAB di daerahnya.

Dalam melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis, BNPB bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Gerakan Pramuka, Muhammadiyah *Disaster Management Center* (MDMC), dan Hizbul Wathan (HW). Keterlibatan Lembaga-lembaga tersebut bertujuan untuk menjadikan implementasi program SPAB menjadi sebuah program yang tidak hanya diinisiasi oleh BNPB, tetapi kemudian akan menjadi sebuah gerakan yang dilakukan secara masif.

Pada tahun 2020, pelaksanaan implementasi SPAB dilaksanakan di 8 kabupaten/kota, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 3.3. Lokasi Pelaksanaan Implementasi SPAB 2020**

No	Kabupaten / Kota	Tanggal
1	Kabupaten Pasaman	26 – 28 Agustus 2020
2	Kota Bukittinggi	8 – 10 September 2020
3	Kabupaten Pesisir Barat	22 – 24 September 2020
4	Kabupaten Kerinci	20 – 22 Oktober 2020
5	Kabupaten Banyuwangi (Daring)	26 – 27 Oktober & 2 – 3 November 2020
6	Kota Ambon (Daring)	26 – 27 Oktober & 2 – 3 November 2020
7	Kabupaten Aceh Besar	10 – 12 November 2020
8	Kabupaten Jembrana	10 – 12 November 2020

Sasaran utama peserta bimtek implementasi SPAB pada tahun 2020 ini adalah pembina pramuka dan pelatih hizbul wathan. Strategi tersebut diambil agar peserta bimtek akan membawa wawasan terkait SPAB dan mengimplementasikannya di sekolahnya masing-masing. BPBD dan Dinas Pendidikan setempat juga dilibatkan dalam pelaksanaan agar kemudian program-program dari lembaga tersebut dapat mendukung pelaksanaan implementasi SPAB.

Selain SPAB, untuk mendukung penurunan indeks risiko bencana, maka BNPB melaksanakan **Kampanye dan Edukasi Publik tentang Mitigasi Bencana dengan membuat Video Edukasi Kebencanaan Rico The Series. Tujuan dari** Edukasi kebencanaan sebagai salah satu upaya pengurangan risiko bencana. Anak-anak termasuk dalam kelompok usia rentan sehingga edukasi terkait kebencanaan perlu dilakukan sejak dini melalui hal-hal yang mereka sukai salah satunya melalui film kartun atau animasi. BNPB dengan garissepuluh.com menginisiasi tontonan edukasi kebencanaan melalui Rico the Series. Dengan mengambil tema “Tolooong”, film ini menyampaikan pesan-pesan terkait apa yang harus dipersiapkan dan dilakukan untuk menghadapi fenomena gempa bumi. Penejelasan tentang cara berlindung, menuju tempat evakuasi, pengenalan tas siaga hingga penggunaan inaRISK personal untuk mengukur tingkat risiko bencana di suatu daerah.



**Gambar 3.27. Video Edukasi Kebencanaan Rico The Series**

## 16. Pelaksanaan Mitigasi Partisipatif

Sebagai bagian dari pemulihan dan inovasi ekosistem gambut, maka kami dari BNPB bermaksud melaksanakan program Mitigasi Partisipatif Kebakaran Hutan Dan Lahan pemanfaatan lahan gambut tanpa bakar. Pelaksanaan Mitigasi Partisipatif Kebakaran Hutan Dan Lahan untuk memaksimalkan pemanfaatan lahan gambut tanpa harus dibakar dalam perlindungan dan penyelamatan ekosistem gambut. Kegiatan ini jika mengacu pada konsep 3R tersebut maka pada tahap R2 dan ditambahkan dengan R3 terkait peningkatan keajahteraan masyarakat.

Kemitraan yang mengacu pada konsep pentahelix, merupakan harapan yang sangat besar bagi BNPB untuk memperkuat edukasi kebencanaan khususnya untuk kegiatan pemanfaatan lahan gambut. Dalam pelaksanaan kegiatan ini tidak hanya bisa dilakukan oleh diri sendiri, namun harus bekerja sama dengan pihak lainnya. Pada kesempatan kali ini kami didukung oleh BRG, Pemerintah Daerah yang diwakili oleh BPBD Provinsi, BPBD Kabupaten, Dinas Pertanian, Kepala Desa, media massa, UMKM, para fasilitator BRG dan tentu saja para petani yang tergabung dalam kelompok tani.

No	Kabupaten / Kota	Tanggal
1	Kabupaten Kubu Raya	22 – 24 September 2020
2	Kabupaten Balangan	29 Sep – 1 Okt 2020
3	Kabupaten Pulang Pisau	20 – 22 Oktober 2020
4	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	20 – 22 Oktober 2020
5	Kabupaten Musi Banyuain	10 – 12 November 2020
6	Kabupaten Pelalawan	25 – 27 November 2020

Hasil optimal yang telah dicapai tersebut di tahun 2020 didukung oleh beberapa faktor antara lain :

- 1) Penerapan "*Double Track*" kegiatan antara penanganan Covid-19 dan penyelesaian program reguler.
- 2) Koordinasi dan komunikasi yang optimal antara penyelenggara kegiatan di direktorat dengan stakeholder terkait.
- 3) *Refocusing* anggaran yang juga mendukung kegiatan-kegiatan pada tiap direktorat di kedeputian bidang sistem dan strategi.

### **Sasaran Strategis 2. Terselamatkannya Sebanyak Mungkin Jiwa Pada Saat Keadaan Darurat Bencana**

Angka kematian atau mortalitas adalah ukuran jumlah kematian (secara umum, atau karena akibat yang spesifik) pada suatu populasi. Mortalitas berbeda dengan morbiditas yang merujuk pada jumlah individual yang memiliki penyakit selama periode waktu tertentu.

Pertimbangan utama dalam menilai informasi tentang kematian adalah sebagai berikut

1. Dalam bencana yang terjadi dan berdampak cepat, mungkin sangat sulit untuk memperkirakan jumlahnya mayat yang belum ditemukan: kematian yang dilaporkan terbatas pada jumlah mayat yang ditemukan dan seringkali tidak mencerminkan kematian yang sebenarnya.
2. Penting untuk membedakan antara perkiraan kematian berdasarkan jumlah mayat yang ditemukan, dan perkiraan jumlah orang yang hilang.
3. Sumber informasi kematian yang mungkin berguna dalam bencana yang terjadi secara perlahan mungkin tidak berguna pada bencana yang terjadi secara cepat (sering terjadi kasus keterlambatan informasi jumlah kasus kematian yang teridentifikasi saat bencana yang terjadi secara cepat).

Angka kematian akibat bencana akan sangat sulit dihitung secara akurat dalam penilaian kesehatan yang dilakukan secara cepat, karena kurangnya waktu untuk

mengumpulkan dan menganalisis informasi. Tingkat kematian yang cukup akurat hanya dapat dihitung jika:

1. Melalui informasi sensus yang telah dikumpulkan secara sistematis oleh otoritas nasional seperti Badan Pusat Statistik (BPS) atau organisasi lain yang memberikan jumlah total populasi berdasarkan usia dan jenis kelamin;
2. Populasi diusahakan jumlahnya tetap statis, selain kelahiran dan kematian (hanya sedikit orang yang bergabung atau meninggalkan populasi dalam suatu wilayah)
3. Sistem pengawasan kematian telah diterapkan;
4. Informasi diklasifikasikan dengan tepat, misalnya dalam kelompok usia yang rasional dan independen untuk kedua jenis kelamin;
5. informasi kematian dikumpulkan selama periode waktu yang valid secara statistik (jika kejadian bencana yang menyebabkan kematian terjadi sporadis, atau penyebab kematiannya tidak diketahui secara pasti, maka ini bisa membutuhkan waktu yang sangat lama dalam [enghitungan tingkat kematiannya);
6. Angka kematian dihitung oleh ahli demografi nasional atau, jika ahli demografi tidak tersedia, seorang ahli epidemiologi bisa dilibatkan.

Namun, perkiraan angka kematian masih dapat diperkirakan secara cukup akurat jika dampak bencana hanya sedikit. Sehingga tingkat kematian dapat dihitung melalui angka kematian kasar (jumlah kematian per 1000 penduduk pada pertengahan tahun tertentu atau selama masa tanggao darurat terjadi) atau dengan menggunakan angka kematian balita (Jumlah kematian anak berusia 1-4 tahun selama satu tahun tertentu per 1000 anak umur yang sama pada pertengahan tahun itu atau pada keadaan tertentu seperti masa tanggap darurat bencana)

Informasi ini diperlukan karena angka kematian kasar dan angka kematian pada anak-anak kurang dari usia lima tahun merupakan indikator keseluruhan yang penting dari kesehatan penduduk. Untuk apapun negara di dunia ada perkiraan tingkat kematian kasar yang tersedia. Angka ini seharusnya dicatat oleh tim penilai cepat, dan dibandingkan dengan angka kematian yang dihitung per situasi. Tabel berikut ini menunjukkan derajat keparahan suatu bencana sehingga menghasilkan angka

kematian yang berbeda, meskipun angka aktual adalah penilaian nilai dengan indikator ilmiah.

**Tabel 3.4 Derajat Keparahan Suatu Bencana dan Kriteria Angka Kematian**

Derajat Keparahan	Angka kematian kasar (kematian / 10.000 / hari)	Angka kematian di bawah lima tahun (kematian / 10.000 / hari)
Normal atau sedikit meningkat	0,3–1,0	0,6–2,0
Parah	1.0–2.0	2.0–4.0
Kritis	> 2.0	> 4.0

Informasi tentang kematian dapat diperoleh dari:

- Sistem surveilans tingkat kematian;
- Penunjukan lokasi pemakaman untuk setiap titik pengungsian, dipantau oleh petugas selama 24 jam, dan pengembangan prosedur otopsi verbal penyebab kematian yang diharapkan menggunakan format standar;
- Catatan rumah sakit dan catatan organisasi yang bertanggung jawab atas penguburan korban bencana;
- Wawancara dengan tokoh masyarakat; dan
- Mewajibkan pendaftaran kematian, menyediakan kain kafan untuk keluarga almarhum untuk membantu memastikan kepatuhan, selalu memantau catatan penguburan, atau mempekerjakan informan sukarela yang melaporkan kematian untuk setiap wilayah terdampak maupun titik pengungsian (misalnya setiap 50 keluarga).

Untuk menghitung angka kematian, informasi berikut harus dikumpulkan:

- Jumlah populasi berdasarkan jenis kelamin dan pengelompokan usia rasional (misalnya <1, 1–4, 5–14, 15–44, 45–59, > 60);
- Jumlah kematian selama periode waktu yang valid secara statistik (angka kematian kasar);
- Jumlah kematian untuk pengelompokan usia yang relevan selama waktu yang valid secara periode statistik (angka kematian spesifik usia); dan

- d. Jumlah kematian dan perkiraan penyebab setiap kematian selama periode waktu yang valid secara statistik (angka kematian dengan penyebab spesifik).

Dengan formulasi perhitungan rata-rata angka kematian akibat bencana per 100.000 jiwa adalah sebagai berikut :

Angka kematian/100.000/=

$$\frac{\text{Jumlah kematian x nilai konstanta (100.000)}}{\text{Jumlah Hari Kejadian (tanggap darurat)x Jumlah Penduduk Berisiko}}$$

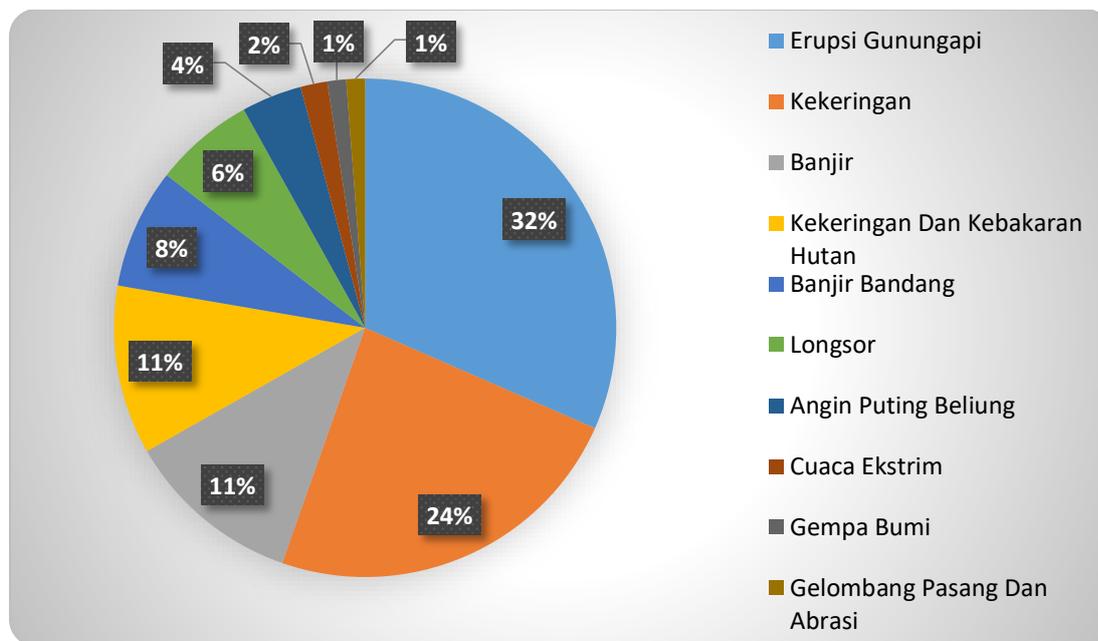
1. Jumlah kematian : jumlah orang yang meninggal selama periode waktu tanggap darurat bencana
2. Jumlah hari kejadian : periode waktu tanggap darurat bencana yang telah ditetapkan oleh pemerintah/pemda sesuai kewenangannya
3. Jumlah penduduk berisiko : jumlah penduduk yang berada di wilayah terdampak selama periode waktu tanggap darurat bencana

#### Sumber Data Referensi

1. Pencatatan sipil dengan perlindungan lengkap dan sertifikasi medis penyebab kematian
2. Pencatatan sipil dengan cakupan lengkap
3. Survei rumah tangga
4. Studi khusus
5. Sistem pengawasan

Durasi keadaan darurat yang terjadi selama Tahun 2020 jika dilihat dari jenis ancamannya, maka bencana yang paling lama proses tanggap daruratnya adalah erupsi gunung api, kekeringan, dan banjir. Ketiga jenis bencana ini sangat berpengaruh terhadap durasi penanganan darurat karena memiliki karakteristik bencana yang terjadi secara perlahan-lahan (slow onset). Bencana *slow on set* adalah bencana yang kejadiannya secara berangsur-angsur dan ada tanda-tanda sebelum terjadi. Misalnya erupsi gunungapi, jarang sekali gunung api meletus secara tiba-tiba, biasanya sebelum terjadi erupsi ada tanda-tanda peningkatan aktivitas seperti gempa atau

tremor, hembusan asap, keluarnya lava dan tanda-tanda lain. Bencana kekeringan merupakan bencana yang cukup pelan dan terjadinya, sehingga proses penanganannya pun akan berlangsung lama. Begitu juga dengan bencana banjir, tidak pernah terjadi secara mendadak, biasanya didahului dengan adanya pemicu seperti hujan deras dan berdurasi lama.



**Gambar 3.28 Durasi keadaan darurat Bencana Tahun 2020**

Angka kematian atau mortalitas adalah ukuran jumlah kematian (secara umum, atau karena akibat yang spesifik) pada suatu populasi. Kategori kematian dan rata-rata kematian akibat bencana yang menjadi dasar objek perhitungan adalah bencana alam yang telah ditetapkan status tanggap daruratnya oleh pemerintah daerah. Tinggi-rendahnya angka kematian ditentukan oleh 3 faktor, yaitu jumlah korban bencana yang meninggal dunia dan hilang, jumlah penduduk yang terdampak bencana dan durasi masa tanggap darurat yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Berdasarkan perhitungan Angka Kematian Penduduk Akibat Bencana di Indonesia, diperoleh hasil bahwa angka kematian penduduk akibat bencana pada tahun 2020 per 100.000 orang penduduk terdampak bencana secara nasional adalah sebesar **3,6 (Lampiran 6)** atau jika dibulatkan menjadi 5. Jumlah ini menunjukkan bahwa akibat terjadinya bencana di seluruh wilayah Indonesia menyebabkan korban meninggal dunia dan hilang sebanyak 5 orang per 100.000 orang terdampak.

Rata-rata angka kematian akibat pandemi covid di tahun 2020 didapat sebagai berikut:

Angka kematian/100.000/=

$$\frac{\text{Jumlah kematian} \times \text{nilai konstanta (100.000)}}{\text{Jumlah Hari Kejadian (tanggap darurat)} \times \text{Jumlah Penduduk Berisiko}}$$

$$= \frac{22.138 \times 100.000}{263 \times 270.203.917}$$

$$= 0.03$$

Jumlah hari kejadian dimulai sejak penetapan Status Bencana Nasional yang ditetapkan pada Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020 tanggal 13 April 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020. Adapun jumlah penduduk Indonesia tahun 2020 berdasarkan data BPS adalah sebanyak 270.203.917 jiwa.

Upaya yang telah dilaksanakan oleh BNPB dan BPBD baik provinsi dan kab/kota yakni

1. Aktifasi Posko Penanganan Tanggap Darurat;
2. Berkoordinasi dengan seluruh stakeholder dari Pemda terkait melalui rapat koordinasi yang dipimpin oleh BNPB;
3. Pemenuhan kebutuhan dasar (makanan, minuman, sandang) ke pengungsi di Pos-Pos Pengungsian melalui darat.
4. Kepala Daerah menetapkan Keputusan Tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana dengan masa tanggap darurat selama selama 14 hari;
5. Mengirimkan bantuan berupa obat-obatan dan vitamin sebanyak 34 jenis, serta mengirimkan tim medis (Dokter dan Perawat) ke lokasi terisolir menggunakan heli BNPB;
6. BPBD Provinsi melakukan mobilisasi bantuan ke BPBD Kabupaten/ Kota yang terdampak bencana banjir dan tanah longsor;
7. Pengerahan 17 unit alat berat milik Dinas PUPR Kab. Bogor, Provinsi Jawa Barat dan Kementerian PUPR;

## BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

8. BPBD Kabupaten/ Kota beserta dinas dan instansi lintas sektor melakukan penyelamatan dan evakuasi kepada warga masyarakat yang terdampak bencana banjir dan tanah longsor;
9. BPBD, TNI, POLRI, TAGANA, PMI dan Dinas Sosial membuka dapur umum untuk pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi yang ada di tempat pengungsian.
10. Mengerahkan Tim Reaksi Cepat dari Kedeputusan Bidang Penanganan Darurat ke beberapa titik banjir dan membantu evakuasi warga
11. Mengerahkan logistik dan peralatan dari Gudang Jatiasih dan Gudang BGR Pulogadung ke beberapa lokasi banjir



**Gambar 3.29 Bencana Banjir di Kota Bekasi**

12. Bekerjasama dengan Lembaga masyarakat dan perusahaan swasta untuk mengerahkan peralatan dan melakukan evakuasi warga ke lokasi yang aman dari banjir, diantaranya yaitu meminjam pakaikan perahu karet kepada Komunitas dari PT. Gojek Indonesia.

Selain bencana diatas, upaya-upaya yang telah dilaksanakan BNPB saat darurat yaitu:

1. Pendampingan Komando dan Pengerahan Sumber Daya Darurat di daerah terdampak bencana yang telah dilaksanakan di Kota Samarinda Prov. Kaltim (20-23 Januari 2020); Provinsi Aceh (19-22 Mei 2020); Kab. Tulang Bawang Prov. Lampung (24 – 28 Mei 2020);, Kabupaten Kepulauan Sula dan Kabupaten Pulau

- Taliabu; Prov. Maluku Utara (8 – 15 Juli 2020); Kab. Tanah Laut, Prov. Kalsel (13 – 16 Juli 2020); Kab. Konawe, Prov. Sultra (16 – 23 Juli 2020); Kab. Lebak, Prov. Banten (4 – 7 Agustus 2020); Kab. Tanggamus, Prov. Lampung (8 – 13 Agustus 2020); Kab. Karo, Prov. Sumut (12 – 15 Agustus 2020).
2. Koordinasi Dukungan Sumber Daya Penanganan Darurat Bencana yang telah dilaksanakan Prov. Sumbar (20 – 21 Januari 2020); Kab. B-ogor Prov. Jawa Barat (3 – 4 Februari 2020); Kota Samarinda Prov. Kaltim (18 Februari 2020); Prov. Aceh (19 – 20 Februari 2020); Kab. Lombok Tengah, Prov. NTB (19 – 20 Februari 2020); Kab. Kulonprogo, Prov. DIY (13 – 14 Maret 2020); Prov. Banten (22 – 24 April 2020); Prov. DIY (30 Juni – 4 Juli 2020); Prov. Jawa Barat (9 – 10 Juli 2020); 10. Prov. Jawa Barat (9 – 11 September 2020); Kab. Ogan Komering Ilir, Prov. Sumsel (14 – 18 September 2020); Kab. Sleman, Kab. Boyolali, Kab. Klaten dan Kab Magelang Prov Jateng dan DIY (10-16 November 2020); Kab. Sleman, Kab. Boyolali, Kab. Klaten dan Kab Magelang Prov Jateng dan DIY (10-20 November 2020); Provinsi D.I Yogyakarta (24 -25 November 2020).
  3. Dukungan Pengerahan Sumber Daya Manusia Ke Lokasi Terdampak Bencana yang telah dilaksanakan di Prov. Riau (27 – 30 Januari 2020); Prov. Riau (13 – 18 Februari 2020); Kab. Majalengka Prov. Jabar (29 Februari – 3 Maret 2020); Kab. Sukabumi Prov. Jabar (13 – 15 Maret 2020); Kab. Bondowoso Prov. Jawa Timur (17 – 20 Maret 2020); Kab. Bantaeng Prov. Sulawesi Selatan (16 – 19 Juni 2020); Kab. Bone Bolango Prov. Gorontalo (16 – 21 Juni 2020); Kab. Jeneponto Prov. Sulawesi Selatan (21 – 25 Juni 2020); Prov. Bengkulu (19 – 23 Agustus 2020); Kab. Lamandau Prov. Kalteng (10 – 17 September 2020).
  4. Melaksanakan Dukungan Pengerahan Logistik dan Peralatan Penanganan Darurat bencana yang telah dilaksanakan di Kab. Bondowoso Prov. Jawa Timur (30 Januari – 4 Februari 2020); Prov. Jawa Barat (10 – 12 Maret 2020); Prov. Riau (8 – 11 Maret 2020); Prov. DKI – Halim (Maret - Juni 2020), Prov. Banten – Soetta (Maret – Juli 2020); Kab. Mempawah dan Kab. Landak Prov. Kalbar (9 – 12 September 2020). Bantuan logistik yang diberikan merupakan bahan makanan dan kebutuhan sehari-hari bagi pengungsi. Sedangkan bantuan peralatan

diantaranya yaitu tenda pengungsian, mobil rescue, dan trailer dapur umum lapangan.



**Gambar 3.30 Pengerahan bantuan logistik dan peralatan di Kab Bondowoso**

Bantuan logistik dan peralatan dari BNPB setiap tahun disalurkan kepada BPBD Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Tahun 2020, BNPB telah menyalurkan bantuan logistik dan peralatan di 254 lokasi yang sudah terdistribusikan namun masih terdapat 5 lokasi yang belum terdistribusikan dan 2 lokasi yang menolak pemberian peralatan (**Lampiran 7**). Dalam distribusi logistik dan peralatan, BNPB bekerjasama dengan PT Pos Logistik Indonesia. Adapun kendala daerah yang belum dapat mengambil barang secara mandiri karena terbatasnya anggaran atau adanya realokasi anggaran dari tiap daerah untuk penanganan pandemi COVID-19.

Bantuan logistik yang diberikan nantinya dapat digunakan oleh BPBD ketika terjadi keadaan darurat dan penguatan kelembagaan dalam penanganan bencana. Sedangkan bantuan peralatan dapat digunakan sebagai penanggulangan bencana baik untuk pencegahan, saat darurat hingga masa rehabilitasi dan rekonstruksi.

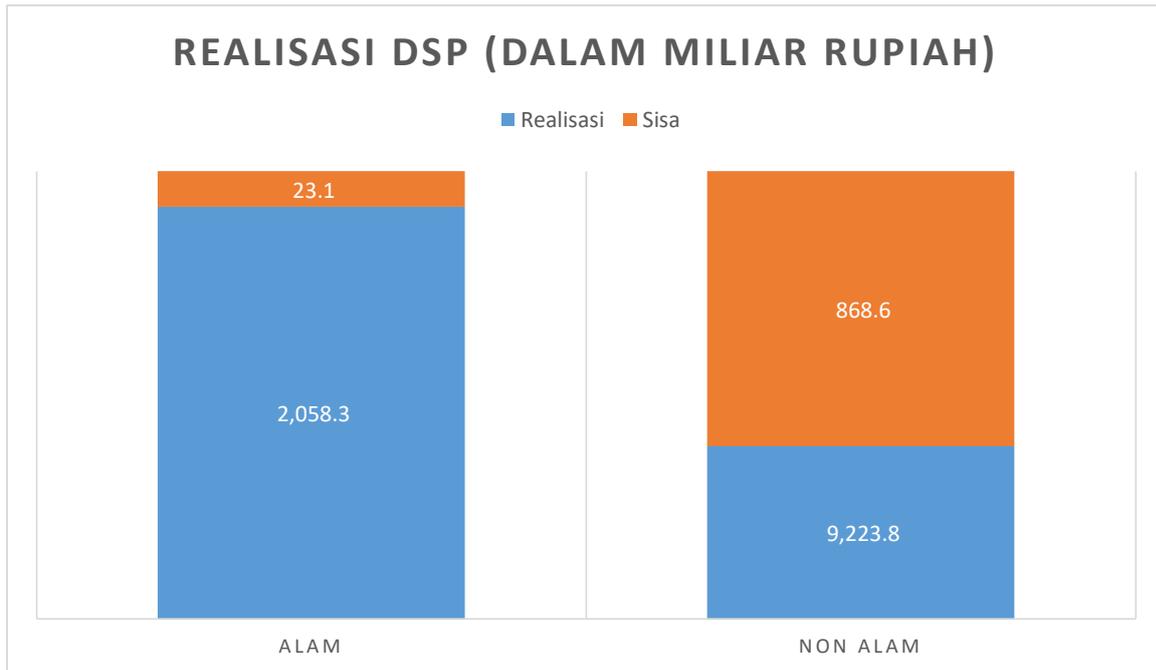
Berikut dokumentasi kegiatan distribusi logistik ke BPBD

NO	DOKUMENTASI FOTO	KETERANGAN KEGIATAN
1		<p>Tanggal 2 Desember 2020 Distribusi logistik untuk BPBD Kabupaten Sleman.</p>
2		<p>Tanggal 10 Desember 2020 Distribusi logistik untuk Pos Dukungan Merapi (Pos Aju) BPBD DIY.</p>
3		<p>Tanggal 14 Desember 2020 Distribusi logistik untuk Dinas Kelautan dan Perikanan.</p>
4		<p>Pemanfaatan truk untuk proses dekontaminasi</p>

NO	DOKUMENTASI FOTO	KETERANGAN KEGIATAN
5		Penggunaan kendaraan dobel kabin untuk tim pemakaman
6		Tim pemakaman dan dekontaminasi pada saat pengambilan jenazah

Dalam penanganan darurat bencana, koordinasi antara pusat dan daerah serta instansi terkait lainnya sangat diperlukan agar penyelenggaraan bencana dapat berjalan lancar dan meminimalisir terjadinya keterlambatan pengambilan kebijakan dalam proses penanganan bencana. Pelaksanaan kegiatan koordinasi ini dilakukan melalui pertemuan-pertemuan antara pimpinan/pejabat BNPB dengan pejabat daerah dan instansi lainnya guna mengambil suatu kebijakan atau keputusan dalam penanganan darurat bencana, sehingga diharapkan penanganan darurat dapat dilakukan secara cepat, tepat dan akuntabel. Oleh karena itu, BNPB memiliki Dana Siap Pakai (DSP) yang dapat digunakan saat darurat.

Pada Tahun 2020 Direktorat Dukungan Sumber Daya Darurat mendapat Pagu Dana Siap Pakai sebesar Rp. 12.217.500.937.000,- (berdasarkan Revisi 15 Tanggal 28 Desember 2020). Dana Siap Pakai dibedakan berdasarkan Bencana Alam dengan pagu Rp2,081 triliun dan Bencana Non Alam dengan pagu Rp10,092 triliun.



**Gambar 3.31 Realisasi DSP Tahun 2020**

Ketika terjadi bencana, BNPB turut membantu pendampingan penyelamatan dan evakuasi korban. Sepanjang tahun 2020, BNPB telah melaksanakan Pendampingan Penyelamatan dan evakuasi korban di 10 lokasi yaitu Kab Lebak (30-31 Januari 2020); Kab Subang (26 - 27 Februari 2020); Kab Kotawaringin Barat (11 – 13 Maret 2020); Kab Bolaang Mongondow (5-9 Maret 2020); Kab Bolaang Mongondow (12 – 15 Maret 2020); Kota Bekasi (22 - 25 Februari 2020); Kab. Bekasi (22 - 25 Februari 2020); Kabupaten Bone Bolango (28 – 31 Juli 2020); Kabupaten Boyolali (7 – 15 November 2020); dan Kabupaten Magelang ( 15 – 22 November 2020). Guna meningkatkan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Daerah, BNPB juga melakukan Bimbingan Teknis TRC di 4 wilayah yaitu wilayah Barat (23 -27 November 2020), wilayah tengah (23 – 27 November 2020), wilayah timur (14 – 16 Juli 2020), dan Kupang ( 31 Agustus – 4 September 2020).



**Gambar 3.32 Kegiatan Pendampingan dan Penyelamatan evakuasi bencana banjir**

## BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

BNPB terus melakukan pendampingan, bimbingan dan sosialisasi dalam penanggulangan bencana saat darurat seperti Bimbingan Teknis Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) dan Keposkoan dan Kaji Cepat Infrastruktur Darurat. Bimbingan Teknis SKPDB dan Keposkoan telah dilaksanakan pada tanggal 19-23 Oktober 2020 di Kota Serang Proinsi Banten dengan jumlah peserta sebanyak 106 personil pusdalops dari BPBD Provinsi/Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Indonesia. Dari kegiatan ini diharapkan peserta dapat melaksanakan Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) dan Keposkoan dengan baik saat terjadi bencana.



**Gambar 3.33 Kegiatan SKPDB dan Keposkoan**

Untuk kegiatan kaji cepat infrastruktur darurat telah dilaksanakan sebanyak 11 kali yaitu Kabupaten Morotai; Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu; Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara; Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau; Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan; Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat; Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur; kabupaten Tangerang, Prov. Banten; kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta; Kab. Bekasi dan Kota Bekasi, Prov. Jawa Barat; dan Kab. Kebumen, Prov. Jawa Tengah.

Kaji Cepat Infrastruktur Darurat merupakan salah satu bagian proses atau kegiatan untuk mengarahkan, membimbing, memperbaiki serta melakukan pendampingan oleh BNPB terhadap Pemerintah Daerah yang mengalami kesulitan didalam penanganan darurat pada saat status tanggap darurat bencana. Sebelum

menyusun Kajian Teknis dalam Operasi Penanganan Infrastruktur saat darurat bencana, daerah perlu memiliki pengetahuan, kemampuan dan kapaistas sumber daya manusia. Untuk itu, BNPB terus memberikan dukungan dengan mengundang BPBD Provinsi dan Kab/Kota pada Rapat Teknis Dukungan Ifrastruktur Darurat Tahun 2020 di Swiss-BelHotel Bogor



**Gambar 3.34 Rapat Teknis Dukungan Infrastruktur Darurat**

pada tanggal 2 s.d. 5 November 2020. Peserta kegiatan Rapat Teknis Dukungan Infrastruktur Darurat Tahun 2020 berjumlah 60 orang, yang terdiri dari 27 orang BNPB, 33 orang BPBD Provinsi dan Kabupaten/Kota di Wilayah Indonesia bagian barat. Selain itu, BNPB juga melaksanakan pendampingan, perencanaan dan verifikasi pemulihan prasarana vital di 16 lokasi dan Pendampingan Perencanaan & Verifikasi Pemulihan Sarana & Utilitas di 16 lokasi.

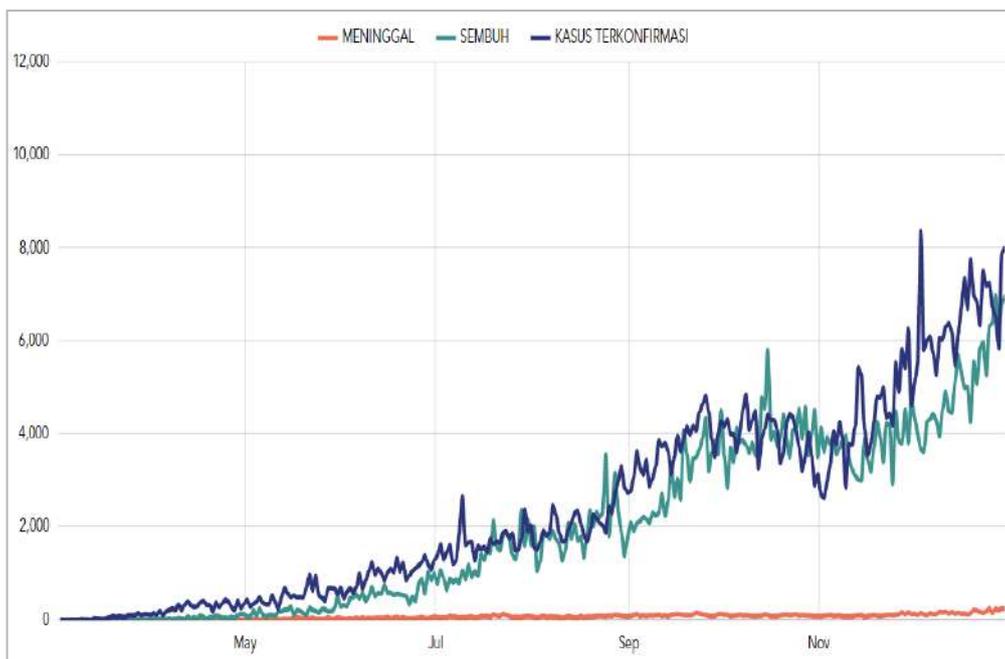
BNPB memiliki layanan call canter kebencanaan 3 digit bebas pulsa di nomor 117. Call center ini berlangsung 24 jam sehari 7 hari seminggu. Layanan call center ini menggunakan jasa pihak ketiga PT Telkom Indonesia dengan menggunakan pembiayaan dari Dana Siap pakai BNPB. Dalam melaksanakan call center 117 Pusdalops BNPB terdapat sebanyak 12 agen dengan pola kerja 3 shift dalam sehari.

Dari panggilan yang masuk ke call center 117 penanganan telepon yang masuk didominasi oleh :

- Prank Call (Panggilan yang diterima oleh agent berupa panggilan telepon yang tidak serius dan atau tidak berkaitan dengan BNPB)
- Covid-19 (Panggilan yang diterima oleh agent berupa informasi, permintaan dan keluhan seputar pandemi Covid-19)
- Kedaruratan Bencana (Panggilan yang diterima oleh agent berupa informasi, permintaan dan keluhan seputar kebencanaan)

## BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

Dalam Penanganan Bencana non Alam di tahun 2020, Indonesia menghadapi pandemi Covid-19 yang pertama melanda Wuhan, Tiongkok. Sejak awal pandemi, kasus positif terus mengalami peningkatan yang signifikan. Kematian cenderung meningkat namun masih dapat ditekan. Kesembuhan juga terus meningkat secara signifikan.



**Gambar 3.35 Tingkat Kesembuhan di Indonesia**

Dalam menangani Covid-19, BNPB mendapatkan anggaran sebesar Rp 42 triliun rupiah yang digunakan untuk:

1. Pengadaan Alat Kesehatan;
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanganan Covid-19; dan
3. Biaya Operasional dan diseminasi penanganan Covid-19.

Adapun instansi terkait yang terlibat dalam penanganan Covid-19 yaitu:

Tabel 3.5 Satgas Covid-19

KL/TNI/POLRI	Pemerintah Daerah
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia</li> <li>• Kementerian Perindustrian</li> <li>• Kementerian Komunikasi dan Informatika</li> <li>• Lembaga Biologi Molekuler Eijkman</li> <li>• Universitas Airlangga</li> <li>• Mabes TNI</li> <li>• Pusdokkes Polri</li> <li>• Polda Metro Jaya</li> <li>• Kodam Jaya/Jayakarta</li> <li>• Kodam IX Udayana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gugus Tugas Prov. Jawa Timur</li> <li>• Dinas Perekraf DKI Jakarta</li> <li>• BPBD Prov Papua Barat</li> <li>• BPBD Prov Sumbar</li> <li>• BPBD Kota Bekasi</li> <li>• BPBD Daerah Lainnya</li> </ul>

Operasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 secara umum melakukan kegiatan pendampingan dan monitoring Tim Liaison Officer yang terdiri dari unsur TNI dan Polri yang bertugas di seluruh 34 provinsi di wilayah Indonesia, dengan total jumlah personil sebanyak 62 orang. Satgas Covid-19 terus melakukan dukungan dan bantuan di RS Darurat Wisma Atlet Kemayoran dengan penyediaan Alat Kesehatan, obat-obatan dan Peralatan Penunjang, serta dukungan Operasional.

### Satgas Bidang Kesehatan

Satgas Bidang Kesehatan memiliki tujuan mengupayakan kesehatan dan keselamatan tenaga medis yang merawat pasien covid-19. Kaleidoskop penanganan Covid-19 di tahun 2020



**Gambar 3.36 Kaleidoskop Penanganan Covid-19 Bidang Kesehatan**

Satgas Covid-19 memiliki sistem pemantauan terhadap indikator kesehatan dan indikator kepatuhan penerapan protokol kesehatan di 34 Provinsi melalui dashboard Sistem Satu Data COVID-19 Nasional. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu:



**Gambar 3.37 Daftar Kegiatan Pemantauan Covid-19**

Tujuan dari sistem pemantauan Covid-19 yakni:

1. Menyediakan sistem informasi COVID-19 untuk monitor dan surveilans;
2. Mengetahui perkembangan dan monitor kasus COVID-19 di 34 provinsi;

3. Menyediakan sistem manajemen kasus dan pelaporan pemeriksaan laboratorium;
4. Mengetahui ketersediaan logistik di RS dan laboratorium.

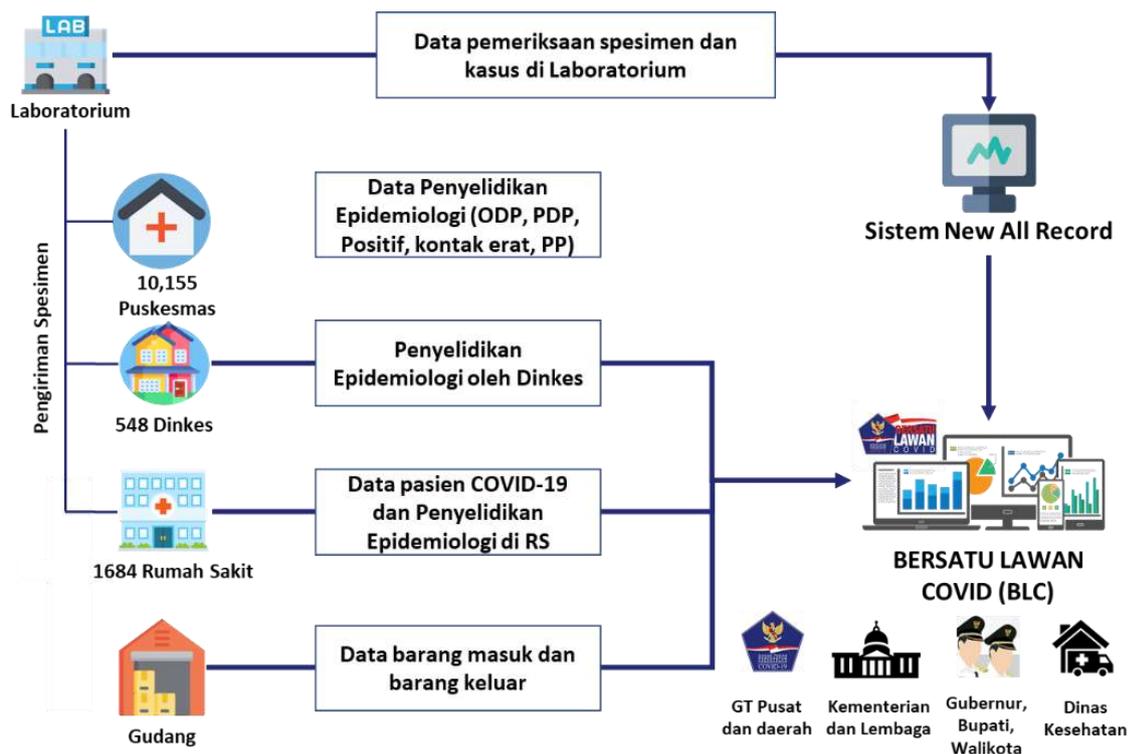
#### Tantangan Satgas Bidang Penanganan Kesehatan

1. Peningkatan kapasitas bed perawatan dan fasilitas isolasi OTG sangat tergantung pada anggaran daerah masing-masing
2. Terbatasnya SDM laboratorium; petugas mengalami kelelahan dan kejenuhan
3. Distribusi spesimen tidak merata
4. Koordinasi lintas sektoral dan perizinan menjadi kendala kebijakan limbah medis

#### **Satgas Bidang Data & Informasi Teknologi**

Alur integrasi Pelaporan Data Covid-19 yaitu:

1. BLC mengintegrasikan data dari **surveilans, laboratorium, dan rumah sakit**
2. Data **Penyelidikan Epidemiologi** yang berasal dari puskesmas, RS, dan Dinas Kesehatan masuk ke dalam BLC, **dicleaning, diolah, dan disinkronisasi** menjadi luaran grafik & informasi
3. Dinas Kesehatan dan pemerintah daerah (Gubernur, Bupati, Walikota) mendapatkan **dashboard analisis** untuk mengetahui data yang diterima oleh Gugus Tugas
4. Perhitungan **indikator kesehatan masyarakat** dan **zonasi risiko** daerah dapat diakses menggunakan BLC
5. Peningkatan **INTEROPERABILITAS** antar institusi dan sektor



**Gambar 3.38 Alur Integrasi Pelaporan Covid-19**

Kendala yang dihadapi dalam Penanganan bencana diantaranya:

1. Pandemi covid-19 yang menyebabkan keterbatasan pelaksanaan kegiatan yang mengumpulkan peserta dan keterbatasan mobilisasi di daerah zona merah;
2. Tambahan tugas Satgas Covid-19 sehingga pelaksanaan kegiatan rutin BNPB terhambat;
3. Diperlukan waktu untuk melakukan koordinasi & mendapatkan data dari lintas sektoral dan lintas institusi ;
4. Renovasi Data Center masih terkendala proses shipping yang mengalami keterlambatan;

Dari kendala yang dihadapin di atas, BNPB melakukan upaya-upaya diantaranya:

1. Melakukan evaluasi rencana kegiatan sehingga kegiatan dapat terlaksanan dan sesuai target kegiatan;
2. Melaksanakan kegiatan secara daring sehingga peserta dapat mengikuti kegiatan dari jarak jauh;

3. Memperkuat koordinasi multisektor untuk mendukung sistem satu data Covid-19 nasional;

Tantangan Satgas Bidang Data dan IT yaitu Diperlukan waktu untuk melakukan koordinasi & mendapatkan data dari lintas sektoral dan lintas institusi

### **Satgas Bidang Perubahan Perilaku**

Tujuan dari Satgas Bidang Perubahan Perilaku yaitu untuk memantau perilaku kepatuhan pada protokol kesehatan di kerumunan. Sasaran kegiatan yaitu Masyarakat pada lokasi observasi kerumunan. Lokasi target kegiatan Satgas Perubahan Perilaku yaitu Pasar, Mall, Tempat Ibadah, Tempat Transportasi Publik, Tempat olahraga publik/ RPTRA, Restoran/Kedai, Tempat Wisata, Jalan Umum, dan lokasi lainnya.

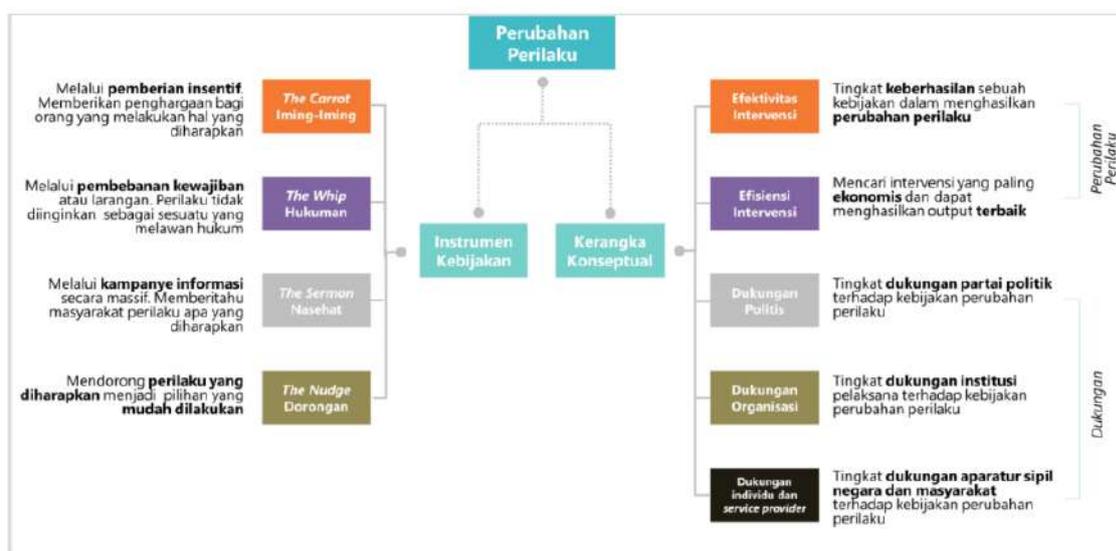
Penerapan perubahan perilaku untuk menerapkan protokol kesehatan 3M pada masyarakat dalam masa pandemi diharapkan dapat terbentuk secara cepat, hal tersebut disebabkan karena kepatuhan terhadap protokol kesehatan merupakan upaya terbaik dalam rangka memutus laju penyebaran COVID-19. Berdasarkan hal tersebut, Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan COVID-19 melalui program perubahan perilaku mendorong terjadinya percepatan perubahan perilaku masyarakat dengan melakukan kegiatan berupa edukasi dan sosialisasi protokol kesehatan 3 M secara masif kepada masyarakat.

Dalam pelaksanaan program perubahan perilaku, Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan COVID-19 didukung oleh 3 Subbidang yaitu Subbidang edukasi, sosialisasi, dan mitigasi, dengan pelaksana kegiatan di lapangan adalah Duta Perubahan Perilaku. Di mana peranan Duta Perubahan Perilaku sangat strategis karena bertindak sebagai ujung tombak pelaksana kegiatan program perubahan perilaku. Selain itu, dalam melaksanakan tugasnya bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan COVID-19 menggunakan strategi Pentahelix dengan menggalang kolaborasi 5 unsur terkait yaitu pemerintah, media, masyarakat, pelaku usaha, dan akademisi untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan program perubahan perilaku.

Pada masa pandemi COVID-19 perubahan perilaku yang diharapkan adalah peningkatan kepatuhan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan dan menjadikan 3M sebagai kebiasaan yang melekat di kehidupan sehari-hari. Perilaku merupakan respons/reaksi seorang individu terhadap stimulus yang berasal dari luar maupun dari dalam dirinya (Notoatmojo, 2010). Menurut teori Lawrence Green, et. Al (Notoatmodjo, 2007) perilaku manusia dipengaruhi oleh dua faktor pokok, yaitu faktor perilaku (behavior causes) dan faktor di luar perilaku (non behaviour causes). Selanjutnya perilaku itu sendiri ditentukan atau terbentuk dari 3 faktor yaitu:

- a. Faktor predisposisi (predisposing factors), yang mencakup pengetahuan, sikap, kepercayaan, keyakinan, nilai-nilai dan sebagainya.
- b. Faktor pendukung (enabling factor), yang mencakup lingkungan fisik, tersedia atau tidak tersedianya fasilitas-fasilitas atau sarana-sarana untuk mendukung perubahan perilaku.
- c. Faktor penguat (reinforcement factor), faktor-faktor ini meliputi undang-undang, peraturan-peraturan, pengawasan dan sebagainya (Notoatmodjo, 2007).

Dalam implementasi program, Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan COVID-19 mengadopsi kerangka konsep perilaku yang mengombinasikan antara instrumen kebijakan dan kerangka konseptual kebijakan publik (Tummers, 2019). Di dalam konsep ini ada 4 instrumen kebijakan yang dapat menjadi intervensi perubahan perilaku yaitu, nasehat (*the sermon*), dorongan (*the nudge*), insentif (*the carrot*), dan hukuman (i). Intervensi ini didukung dengan kerangka konsep kebijakan publik yang memperhatikan efektivitas dan efisiensi dari intervensi dan juga dukungan dari politisi, institusi maupun masyarakat dan pemerintah secara keseluruhan.



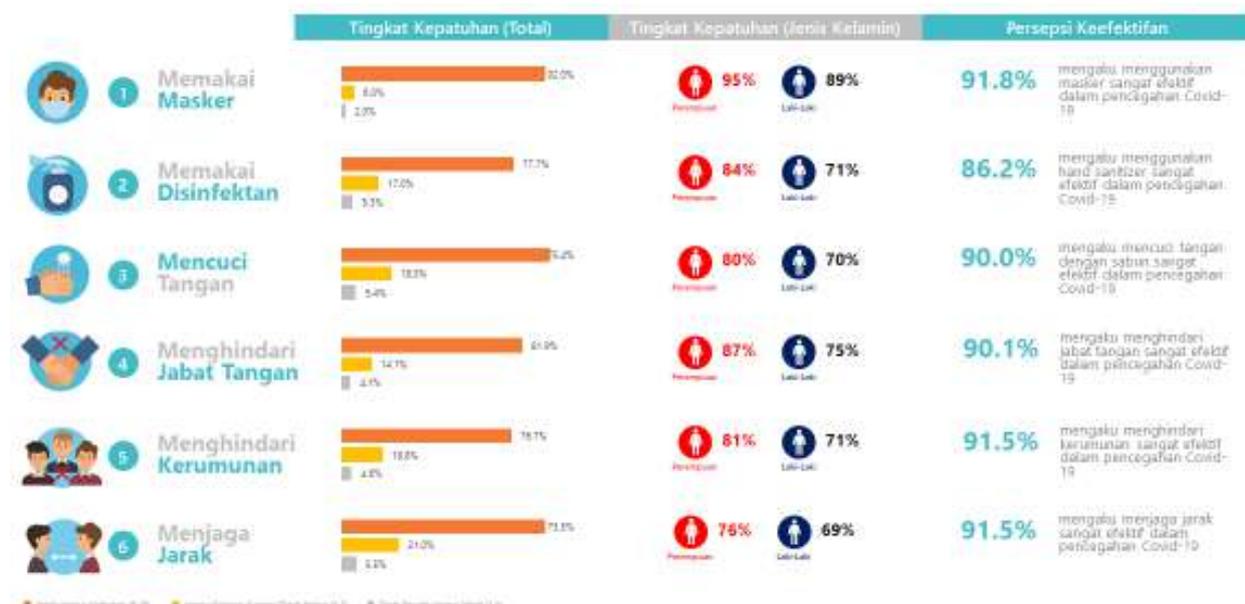
Gambar 3.39 Kebijakan Publik dan Perubahan Perilaku

Berdasarkan hasil Survei Perilaku Masyarakat di Masa Pandemi COVID-19 yang dilakukan oleh BPS pada bulan September 2020, tingkat kepatuhan responden terhadap protokol kesehatan 3M (memakai masker, menjaga jarak dan menjauhi kerumunan, serta mencuci tangan dengan sabun) sudah cukup baik namun masih belum optimal. Tingkat kepatuhan responden dalam memakai masker sudah mencapai hampir 92%. Sayangnya, hal ini belum diikuti oleh kepatuhan terhadap dua protokol lainnya yaitu menjaga jarak dan mencuci tangan pakai sabun yang masih berada di bawah 80%.

Jika dilihat berdasarkan karakteristik demografi responden, ternyata responden perempuan terbukti memiliki tingkat kepatuhan yang lebih baik ketimbang responden laki-laki. Hal ini turut menguatkan tagar Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan COVID-19 yang mengangkat tema perempuan yaitu “Ingat Pesan Ibu”. Sementara, berdasarkan kelompok umur, responden di kelompok umur muda memiliki tingkat kepatuhan yang cenderung lebih abai dibandingkan dengan kelompok umur yang lebih tua. Hal ini patut diwaspadai mengingat kaum muda memiliki tingkat mobilitas yang tinggi karena sedang berada pada usia produktif. Para kaum muda perlu untuk diingatkan akan risiko penularan yang bisa mereka bawa kepada orang tua dan juga anggota keluarga yang lebih tua.

Berikutnya, persepsi masyarakat akan kemungkinan terinfeksi atau tertular COVID-19 ternyata cukup menarik untuk diperhatikan. Setidaknya, dari 100 responden yang mengikuti survei ini, 17 di antaranya menyatakan tidak mungkin tertular COVID-19. Kelompok usia muda ternyata adalah kelompok umur yang paling banyak menyatakan tidak mungkin tertular COVID-19.

Gambaran ini perlu untuk diwaspadai mengingat ketidakpercayaan terhadap COVID-19 dapat mempersulit usaha perubahan perilaku masyarakat. Untuk itu, Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan COVID-19 perlu untuk menyusun serangkaian strategi intervensi sehingga persentase warga masyarakat yang tidak percaya terhadap COVID-19 dapat turun, jumlah mereka yang yakin tidak tertular akan semakin ditekan, sehingga dapat berujung pada menurunnya jumlah kasus COVID-19 di Indonesia.



**Gambar 3.40 Tingkat Kepatuhan Masyarakat**

Strategi perubahan perilaku yang digunakan adalah:

1. Edukasi: Menjadikan peserta didik pada seluruh satuan pendidikan sebagai sasaran perubahan perilaku serta menyiapkan materi pendidikan dengan strategi edukasi.
2. Sosialisasi: Menjadikan masyarakat umum dengan penekanan pada keluarga, ibu dan remaja sebagai sasaran perubahan perilaku dengan strategi sosialisasi.

3. Mitigasi: Menjadikan kelompok masyarakat dan wilayah dengan tingkat kepatuhan protokol kesehatan rendah sebagai sasaran perubahan perilaku dengan strategi mitigasi.

Implementasi Program dan Kegiatan Perubahan Perilaku melalui Proses Sosialisasi, Edukasi, dan Pendisiplinan Masyarakat:

1. Rekrutmen Duta Perubahan Perilaku dilaksanakan pada tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan RW. Untuk Duta Perubahan Perilaku di tingkat provinsi terdiri dari tim masing-masing Subbidang, BPBD, Satpol PP, Koalisi Kependudukan Indonesia, TNI dengan jumlah anggota maksimal 25 orang. Duta Perubahan Perilaku di tingkat Kabupaten/Kota dan RW merupakan rekrutmen dari masing-masing subbidang sesuai dengan pembagian wilayah tugas. Jumlah anggota duta perubahan perilaku di tingkat Kabupaten/Kota maksimal 75 orang dan di tingkat RW tidak lebih dari 300 orang.

Tugas Duta Perubahan Perilaku yaitu:

TINGKAT	JUMLAH MAKSIMAL	TUGAS
PROVINSI	25	1. Memastikan 75 Duta PP tingkat Kabupaten/Kota dan 300 Duta PP tingkat RW melaksanakan tugasnya dengan baik
		2. Melakukan kerjasama dengan mitra "pentahelix" untuk mendukung kelancaran tugas para Duta di tingkat Kabupaten/Kota dan RW
		3. Menganalisis hasil kegiatan perubahan perilaku dan menyusun strategi efektif.
KABUPATEN/KOTA	75	1. Memastikan 300 Duta PP tingkat RW melaksanakan tugasnya dengan Baik
		2. Melakukan kerjasama dengan mitra "pentahelix" untuk mendukung kelancaran tugas para Duta di tingkat Kabupaten/Kota dan RW

Tabel 3.6 Jumlah Anggota Duta Perubahan Perilaku

Jenis Duta Perubahan Perilaku		Jumlah Anggota	
		Direkrut	Dilatih
Terstruktur	Duta Perubahan Perilaku tingkat Provinsi	243	243
	Duta Perubahan Perilaku tingkat Kabupaten/Kota	2.877	2.877
	Duta Perubahan Perilaku tingkat RW	12.806	12.806

Jenis Duta Perubahan Perilaku		Jumlah Anggota	
		Direkrut	Dilatih
	Duta Perubahan Perilaku Satpol PP	2.223	2.223
Gerakan	Duta Perubahan Perilaku	35.853	35.853
Total		54.002	54.002

Perekrutan Duta Perubahan Perilaku dengan melibatkan berbagai pihak seperti LLDIKTI, Perguruan Tinggi, Bidik Misi, Pemerintah Daerah, JHCCP, Promkes, Forum Genre Indonesia, KKI, KMK, Pramuka, HIMPSI Pusat, HIMPSI Wilayah, Kodam, dan Organisasi, Komunitas dan masyarakat. Proses rekrutmen Duta Perubahan Perilaku melalui proses verifikasi data dan pembekalan materi substansi serta aplikasi. Duta perubahan perilaku ini melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat secara sukarela. Untuk membedakannya duta perubahan perilaku ini disebut sebagai duta gerakan.

**Melibatkan asosiasi atau jaringan seperti:**



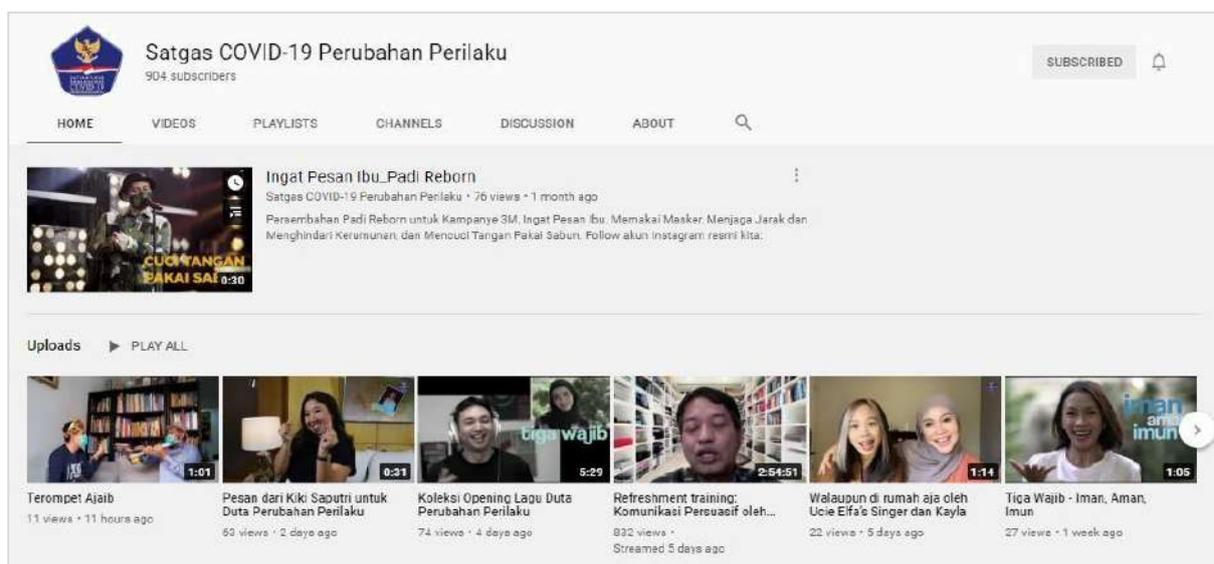
**Gambar 3.41 Pihak yang Terlibat dalam Perekrutan Duta Perubahan Perilaku**

2. Sosialisasi melalui Jalur Komunikasi Media dan Media Sosial

Salah satu faktor terpenting dalam proses perubahan perilaku seseorang adalah tingkat pemahaman terhadap kondisi yang sedang dihadapi. Oleh karenanya, kegiatan sosialisasi dan promosi dilakukan berulang kali dengan

menggunakan berbagai saluran media. Pemanfaatan media merupakan suatu strategi yang cukup efektif dalam rangka mempromosikan program perubahan perilaku. Media massa elektronik maupun cetak masih menjadi saluran dengan jangkauan terluas. Kegiatan banyak dilakukan dalam bentuk talkshow dan webinar.

Media sosial juga dimanfaatkan untuk melakukan sosialisasi dan promosi program perubahan perilaku khususnya untuk generasi milenial yang mendominasi penggunaan media ini. Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan COVID-19 menggunakan media sosial seperti Instagram dan Youtube untuk memberikan materi-materi informasi terkait program-program Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan COVID-19



**Gambar 3.42 Akun Youtube Satgas Covid-19 Perubahan Perilaku**

### 3. Kerjasama *Pentahelix*

Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan COVID-19 telah menggalang keterlibatan aktif multi-sektor/disiplin yang mempunyai sumber daya untuk mendukung upaya edukasi, sosialisasi, dan mitigasi dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 kepada lebih dari 40 komunitas/kalangan/institusi. Beberapa di antaranya berlanjut dengan bergabung menjadi Duta Perubahan Perilaku Model Gerakan. Ada pula yang bersedia menjadi sponsor kegiatan yakni PT ASTRA.

Keberhasilan program perubahan perilaku dapat terlihat apabila tingkat kepatuhan terhadap penerapan protokol kesehatan meningkat. Berdasarkan hasil evaluasi menggunakan data dashboard Bersatu Lawan COVID-19 tingkat kepatuhan masyarakat secara umum tingkat kepatuhan masyarakat menunjukkan penurunan dan diikuti dengan peningkatan kasus harian COVID-19. Banyaknya faktor luar yang mempengaruhi tingkat kepatuhan masyarakat, membuat capaian program perubahan perilaku menjadi tidak mudah. Masih banyaknya masyarakat yang tidak percaya, tidak adanya regulasi yang tegas, ataupun semakin tingginya tingkat kejenuhan masyarakat yang membuat terjadinya penurunan kepatuhan di masyarakat.

Tantangan Satgas Bidang Perubahan Perilaku yaitu Adanya faktor eksternal yang tidak terprediksi sebelumnya seperti tokoh kegiatan agama yang menghimpun massa dalam jumlah banyak sehingga berpotensi mengubah pola kepatuhan masyarakat yang sudah terbentuk.



**Gambar 3.43 Tantangan Penanganan Covid-19 di Tahun 2020**

### Sasaran Strategis 3. Pulihnya Kehidupan Dan Penghidupan Yang Lebih Baik, Lebih Aman Dan Berkelanjutan Di Daerah Pascabencana

Capaian kinerja sasaran strategis meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat pascabencana tahun 2020 dicapai melalui pelaksanaan program sebagai berikut:

#### Rata-rata kenaikan indeks pemulihan pascabencana

Baseline Indikator Kinerja Sasaran Strategis untuk bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi adalah sebesar 4.85 sehingga target kinerja sasaran strategis pada tahun 2020 sebesar 5.

Sasaran Strategis	Indikator Strategis	Sasaran	Base Line	Target 2020	Capaian 2020
Terpulihkannya sarana dan prasarana, sosial, ekonomi, dan produktivitas sumberdaya pada daerah terdampak pascabencana	Rata-rata kenaikan indeks pemulihan pascabencana	kenaikan pemulihan	4.85	5	5.22

Perbandingan Capaian Indeks Pemulihan Pascabencana pada tahun 2018 dan 2019 :

Sasaran Strategis	Indikator Strategis	Sasaran	2018	2019
Meningkatnya kualitas hidup masyarakat pascabencana	Rata-rata indeks pemulihan pascabencana	kenaikan pemulihan	3,47	4,85%

Pemulihan berkaitan erat dengan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Berdasarkan UU No. 24 Tahun 2007 pasal 57 dan Peraturan Kepala BNPB Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Umum Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana, dinyatakan bahwa Penyelenggaraan Rehabilitasi Pascabencana pada wilayah terdampak dilakukan melalui kegiatan:

- a. Pembangunan kembali dan perkuatan prasarana dan sarana;

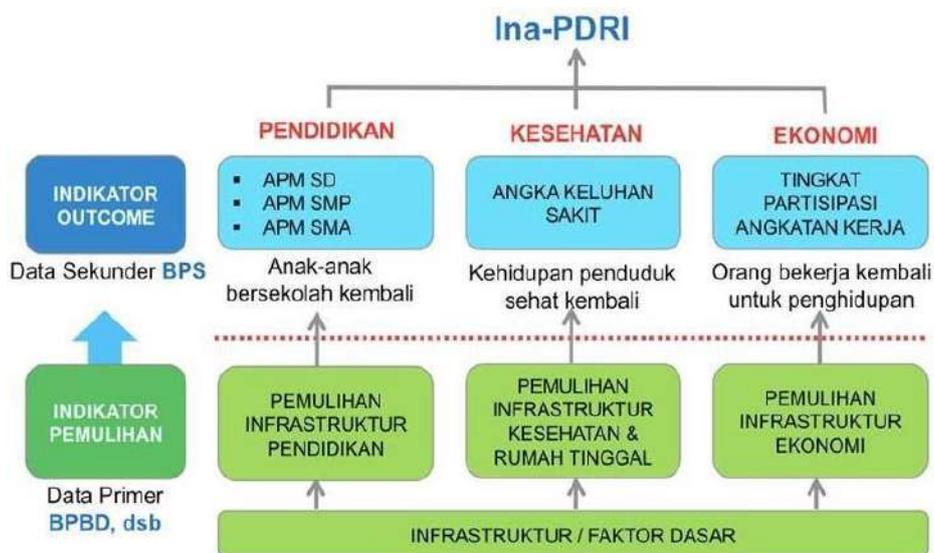
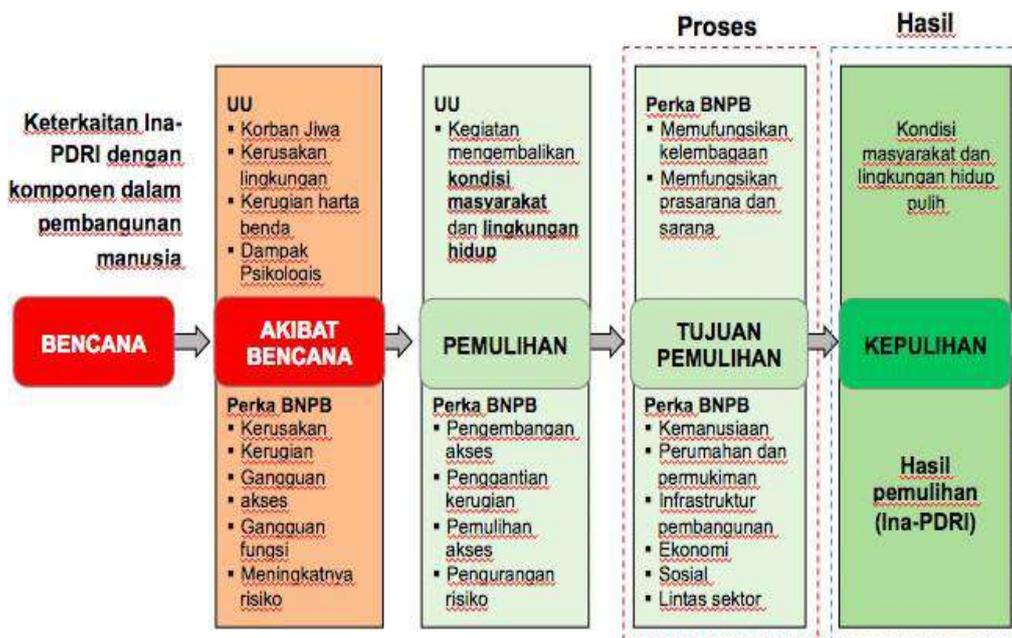
- b. Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
- c. Pembangunan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
- d. Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
- e. Peningkatan kondisi sosial, ekonomi<sup>7</sup> dan budaya;
- f. Peningkatan fungsi pelayanan publik;
- g. Peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat;
- h. Partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat.

Kebijakan penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sebagaimana dilakukan dengan mempercepat pemulihan wilayah terdampak dan mempertimbangkan pengurangan risiko bencana. Terdapat beberapa sasaran dari penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi, yaitu sasaran kelembagaan, sasaran operasional, dan sasaran substansial. Sasaran kelembagaan mencakup seluruh lembaga/institusi baik di tingkat pusat maupun daerah yang terlibat dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi. Sedangkan, sasaran operasional adalah pemerintah dan masyarakat di daerah bencana mampu melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi dengan baik dan benar. Selanjutnya, sasaran substansial rehabilitasi dan rekonstruksi mencakup enam sasaran, yaitu aspek kemanusiaan, aspek perumahan dan permukiman, aspek infrastruktur pembangunan, aspek ekonomi, aspek sosial, dan aspek lintas sektor.

Berdasarkan Peraturan Kepala BNPB No.6 Tahun 2017, dinyatakan bahwa manajemen penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana merupakan satu rangkaian tahapan dengan mempertimbangkan:

- a. masukan (input) berupa Jitupasna;
- b. proses (process) Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana meliputi :
  - 1) penyusunan rencana dan penentuan prioritas;
  - 2) pengalokasian sumber daya dan dana;
  - 3) pelaksanaan;
  - 4) monitoring dan evaluasi; dan

- 5) pelaporan;
- c. hasil (output) yaitu hasil Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana
- d. keluaran (outcome) yaitu manfaat yang dirasakan oleh masyarakat korban bencana dan lingkungan;
- e. dampak (*impact*) terhadap pencapaian tujuan pemulihan dan rencana pembangunan daerah dan nasional



Gambar 3.44 Tahapan dalam perhitungan Ina-PDRI

Dengan demikian, aspek pemulihan pascabencana berkaitan dengan komponen dalam pembangunan manusia, dengan tekanan pada indikator berfungsinya hasil pembangunan (outcome). Untuk mengukur keberhasilan atau kesuksesan suatu proses pemulihan pasca bencana terutama pencapaian sasaran substansial rehabilitasi dan rekonstruksi, maka perlu suatu bentuk evaluasi yang digambarkan melalui Indeks Pemulihan Pascabencana. Indeks pemulihan pascabencana adalah sebuah indeks untuk mengukur sekaligus mengevaluasi kinerja atau keberhasilan proses pemulihan pada tingkat outcome, meliputi kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilaksanakan di daerah terdampak bencana oleh semua pemangku kepentingan yang terlibat.

Pengukuran pemulihan pascabencana dibangun berdasarkan struktur keterkaitan aspek-aspek pemulihan dalam kaitannya dengan pembangunan kesejahteraan manusia (welfare) pada posisi yang tertinggi. Kesejahteraan tersusun atas komponen pendidikan, kesehatan dan pendapatan (ekonomi). Komponen-komponen tersebut diukur dengan indikator pada tingkat impact, seperti yang digunakan di dalam pengukuran Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index), yaitu (1) tingkat pengetahuan (2) tingkat kesehatan (3) tingkat pendapatan. Capaian komponen IPM yang tinggi diharapkan akan dapat memperluas pilihan-pilihan penduduk dalam rangka mencapai tingkat kesejahteraan yang lebih baik lagi.

Aspek pemulihan pasca bencana yang akan dijadikan sebagai indikator dibangun berdasarkan dukungan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Karena itu, untuk menentukan indikator-indikator yang akan dipilih, maka keterkaitan berbagai aspek disusun dalam suatu struktur berikut ini: Berdasarkan struktur tersebut di atas, maka meningkatkan kualitas hidup masyarakat pascabencana disusun berdasarkan indikator pada tingkat outcome, yaitu mengukur hasil-hasil aktivitas ekonomi, pendidikan dan kesehatan.

Berdasarkan rencana strategis Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2024, sasaran strategis Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi adalah terpulihkannya sarana dan prasarana, sosial, ekonomi, dan produktivitas sumberdaya alam pada daerah terdampak pascabencana dengan indikator sasaran strategis berupa rata-rata kenaikan indeks pemulihan pascabencana. Indeks pemulihan

pascabencana adalah sebuah indeks untuk mengukur sekaligus mengevaluasi kinerja atau keberhasilan proses pemulihan pada tingkat outcome, meliputi kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilaksanakan di daerah terdampak bencana oleh pemangku kepentingan yang terlibat.

Untuk mengukur keberhasilan atau kesuksesan suatu proses pemulihan pascabencana terutama pencapaian sasaran substansial rehabilitasi dan rekonstruksi, maka diukur indeks rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana pada 13 (belas belas) kabupaten/kota yang mengalami bencana masif pada tahun 2018 dan menjadi prioritas nasional dalam pemulihan pascabencana, maka diperoleh nilai rata-rata peningkatan indeks rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana pemulihan pascabencana sebesar 5,22%.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Target 2020	Capaian 2020
Terpulihkannya sarana dan prasarana, sosial, ekonomi, dan produktifitas sumber daya alam pada daerah terdampak bencana	Rata-rata peningkatan indeks pemulihan pascabencana	5	5.22

Adapun formulasi perhitungan rata-rata peningkatan indeks pemulihan pascabencana:

$$\begin{aligned}
 IP2 &= R1 - R0 \\
 &= 30,74 - 25,52 \\
 &= 5,22
 \end{aligned}$$

Dimana:

IP2 : Indeks Pemulihan Pascabencana

R0 : Rata-rata Realisasi kegiatan pada tahun 2019

R1 : Rata-rata Realisasi kegiatan pada tahun 2020

Tingkat pemulihan yang diperhitungkan dalam Indeks Pemulihan Pascabencana dilihat dari perubahan (selisih) indeks tahun saat ini dengan tahun sebelumnya.

Secara garis besar, pemulihan pascabencana pada masing-masing daerah tersebut didominasi dengan peningkatan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Pada urutan selanjutnya ditandai dengan pemulihan perumahan dan infrastruktur dan peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan. Akan tetapi, perbaikan ekosistem dalam upaya pemulihan sumberdaya alam dan lingkungan hidup dinilai masih belum optimal. Faktor pendukung lainnya dalam pemulihan pascabencana adalah:

- a. Pembangunan rumah yang dilakukan secara masif
- b. Bantuan pemulihan dari CSR dan NGO
- c. Bantuan hibah Luar Negeri

Nilai peningkatan Indeks Pemulihan Pascabencana pada masing-masing daerah yang terjadi bencana masif. tersebut diuraikan pada tabel di bawah ini

**Tabel 3.7 Indeks Pemulihan Pascabencana 2019-2020**

No	Daerah	Tahun 2019	Tahun 2020
1	Kab Palu		29,05
2	Kab Sigi		29,35
3	Kab Donggala		35,84
4	Kab Parigi Moutong		23,94
5	Kab Pesawaran		20,00
6	Kab Pandeglang		15,60
7	Kab Tanggamus		20,00
8	Lampung Selatan		20,00
9	Kab Lombok Tengah	29,98	49,96
10	Kab Lombok Barat	37,58	70,37
11	Kota Mataram	28,04	45,56
12	Kab Sumbawa Barat	16,00	20,00
13	Kab Sumbawa	16,00	20,00
<b>Rata-Rata</b>		<b>25,52</b>	<b>30,74</b>

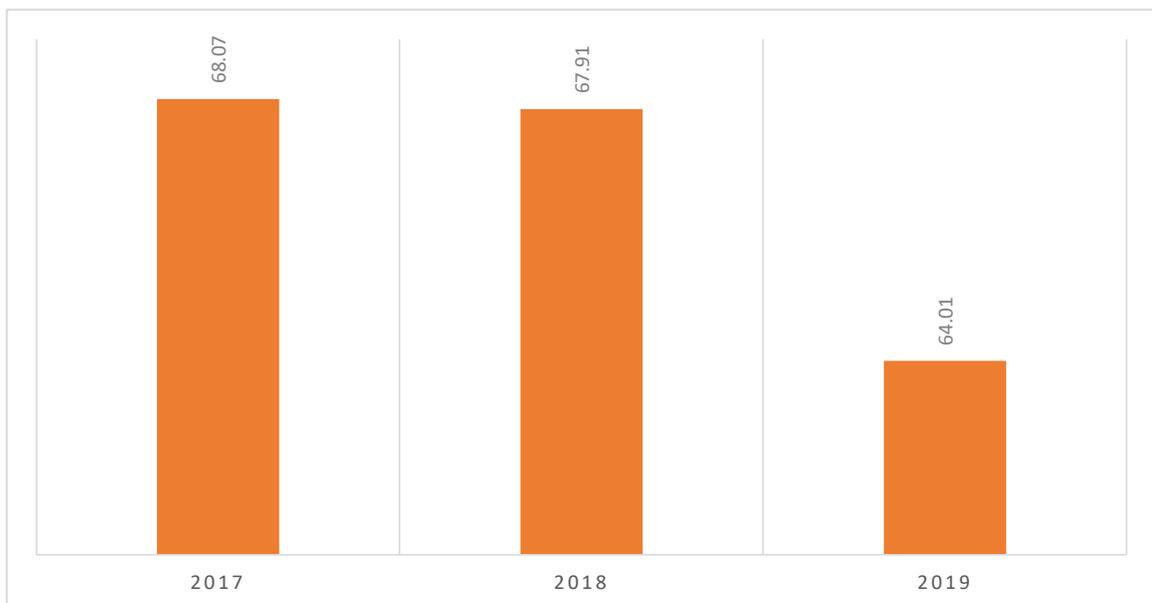
Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Pemulihan Pascabencana pada 13 (tiga belas)

kabupaten/kota yang mengalami bencana masif pada tahun 2018 dan menjadi prioritas nasional dalam pemulihan pascabencana, maka diperoleh nilai rata-rata peningkatan indeks pemulihan pascabencana sebesar 5,22%. Penetapan 13 (tiga belas) kabupaten/kota yang menjadi dasar penilaian pemulihan pascabencana tahun 2020 berdasarkan lokus RPJMN tahun 2020-2024 yaitu daerah Selat Sunda, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Provinsi Sulawesi Tengah.

Secara garis besar, pemulihan pascabencana pada masing-masing daerah tersebut didominasi dengan pemulihan perumahan dan infrastruktur dan peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan. Akan tetapi, perbaikan ekosistem dalam upaya pemulihan sumberdaya alam dan lingkungan hidup dinilai masih belum optimal.

#### Sasaran Strategis 4. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Yang Profesional, Akuntabel Dan Transparan

Reformasi Birokrasi (RB) merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama



Gambar 3.45 Nilai RB BNPB 2017-2019

menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (*business process*) dan sumberdaya manusia aparatur pemerintahan. Tujuan dengan adanya reformasi birokrasi adalah untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

Dari hasil evaluasi Reformasi Birokrasi (RB) tahun 2019 oleh Kementerian PAN dan RB didapat nilai/poin 64,01 dalam hal ini 2 tahun berturut turut mengalami penurunan nilai RB, sehingga masih perlu dilakukan perbaikan.

Hasil evaluasi SAKIP tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. BNPB mulai memperbaiki sistem manajemen kinerja, yang ditunjukkan dengan memperbaiki perencanaan dan pengukuran kinerjanya;
2. Menyusun cascading kinerja, kemudian dijabarkan ke dalam kinerja Eselon III dan kinerja Eselon IV, namun kualitas cascading di beberapa unit kerja eselon I masih perlu ditinjau lagi keselarasannya;
3. Mempunyai aplikasi *e-planning* dan *e-budgeting* yang saat ini sedang dalam proses integrasi. Selain itu telah dibangun pula aplikasi e-sakip, namun pemanfaatannya belum optimal;
4. Inspektorat Utama telah melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP di unit kerja, namun simpulan hasil evaluasi belum mampu memberikan feedback dalam perbaikan SAKIP.

Berdasarkan kondisi di atas, maka KemenPANRB merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Memperbaiki indikator kinerja yang masih belum berorientasi hasil pada semua dokumen SAKIP dengan mempertimbangkan core business tugas dan fungsi utama BNPB. Kinerja yang akan diwujudkan nantinya dapat menjadi dasar dalam menetapkan proses bisnis organisasi dan standar kompetensi pegawai.
2. Memperbaiki cascading kinerja yang sudah ada melalui penyusunan Perjanjian Kinerja secara berjenjang, sehingga menggambarkan kontribusi kinerja dari setiap jenjang jabatan terhadap pencapaian kinerja level di atasnya, kemudian melakukan analisis terhadap hubungan/turunan kinerja dari Kepala Badan ke unit kerja di bawahnya sampai ke unit kerja yang terkecil, bahkan sampai ke level individu sehingga terbentuk pohon kinerja BNPB.

3. Mengembangkan dan mengimplementasikan teknologi informasi dalam proses penerapan Sistem AKIP serta mengintegrasikan sistem aplikasi pengukuran kinerja dengan sistem penganggaran dan keuangan, sehingga terdapat keterkaitan antara penggunaan anggaran dengan tingkat capaian kinerja.<sup>19</sup>
4. Melakukan evaluasi secara menyeluruh atas penerapan Sistem AKIP di tingkat unit kerja serta meningkatkan kualitas dan kompetensi evaluator sehingga mampu menggunakan instrumen evaluasi secara maksimal dan menerapkan professional judgement dan dapat mendorong perbaikan implementasi SAKIP secara signifikan di lingkungan BNPB, kemudian memantau tindak lanjut atas rekomendasi/perbaikan tersebut sehingga betul-betul dapat diimplementasikan dalam meningkatkan kualitas Akuntabilitas Kinerja.

Upaya yang telah dilakukan dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi tersebut adalah :

1. Renstra BNPB tahun 2020-2024 telah ditetapkan dalam Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana No. 5 Tahun 2020 yang mengacu kepada Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 dan RPJMN 2020-2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tanggal 17 Januari 2020.
2. BNPB sudah menerbitkan Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sesuai Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 Tahun 2020 dan sudah dilakukan sosialisasi.
3. BNPB sudah menerapkan Sistem AKIP serta mengintegrasikan sistem aplikasi pengukuran kinerja dengan sistem penganggaran dan keuangan, sehingga terdapat keterkaitan antara penggunaan anggaran dengan tingkat capaian kinerja melalui E-SAKIP BNPB dengan website <http://116.12.46.197/e-sakip> dan sudah dilakukan bimbingan teknis kepada unit kerja untuk persiapan penerapannya dan dalam rangka pemantauan secara rutin setiap bulannya.
4. Inspektorat Utama sebagai evaluator atas implementasi SAKIP sudah menerbitkan Pedoman Audit Kinerja di Lingkungan BNPB sesuai keputusan

Inspektur Utama Nomor 004 Tahun 2020.

5. Untuk meningkatkan mutu pelayanan publik kepada masyarakat dan akuntabilitas, BNPB menetapkan Surat Keputusan Nomor 18-R Tahun 2020 tentang Pemberian Penghargaan dan Hukuman Kepada Pegawai di Lingkungan BNPB Tahun 2020. Pegawai BNPB berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai yang ditunjuk telah memenuhi syarat dan kriteria untuk ditetapkan sebagai Petugas Pelayanan Publik Terbaik akan memperoleh penghargaan berupa Piagam atau diberikan sejumlah uang dengan nominal berdasarkan anggaran DIPA berjalan. Sedangkan hukuman disiplin berlaku untuk perugas berstatus PNS maupun PPNPN di lingkungan BNPB berupa hukuman disiplin yang diatur.
6. BNPB telah menetapkan Surat Keputusan Kepala BNPB No. 50 tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Di Lingkungan BNPB 2020-2024. Road Map Reformasi Birokrasi BNPB disusun untuk mendukung arahan Presiden yang tertuang pada RPJMN 2020-2024 terkait dengan penyederhanaan birokrasi dan salah satu sasaran strategis BNPB pada Rencana Strategis BNPB 2020-2024 yaitu meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional, akuntabel dan transparan sehingga dapat menjadi acuan bagi seluruh unit kerja di lingkungan BNPB. Secara garis besar, Road Map Reformasi Birokrasi BNPB 2020-2024 berisi informasi yang menggambarkan evaluasi atas capaian Reformasi Birokrasi BNPB dalam lima tahun terakhir, analisis atas lingkungan strategis BNPB, penetapan tujuan, sasaran dan strategis reformasi birokrasi BNPB, ukuran keberhasilan dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi BNPB, kegiatan dan upaya reformasi birokrasi yang akan dilakukan BNPB, serta gambaran manajemen atau pengelolaan reformasi birokrasi di lingkungan BNPB.
7. Penyusunan peta proses bisnis menjadi bagian dari penataan tata laksana yang dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur yang jelas, efektif, efisien dan terukur pada masing-masing instansi pemerintah. Peta proses bisnis mempunyai tujuan yaitu
  - a. menjadi acuan bagi setiap instansi pemerintah untuk menyusun peta proses bisnis di lingkungan instansi pemerintah guna melaksanakan visi, misi, tujuan, dan strategi organisasi;

- b. agar instansi pemerintah mampu melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien; dan
- c. dapat memudahkan komunikasi baik internal maupun eksternal mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan.

Peta Proses Bisnis Badan Nasional Penanggulangan Bencana terdiri dari:

- a. Peta Proses Bisnis level 0;
- b. Peta Proses Bisnis level 1;
- c. Peta Proses Bisnis level 2; dan
- d. Peta Proses Bisnis level n

Peta Proses Bisnis level 0 memuat seluruh proses bisnis yang ada di Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebanyak 14 (empat belas) yang terdiri dari 5 (lima) proses utama, 2 (dua) proses pendukung, dan 7 (tujuh) proses manajemen.

8. Penyederhanaan birokrasi merupakan amanat yang disampaikan Presiden RI dimana jabatan struktural akan disederhanakan menjadi dua level. Rencana penyederhanaan birokrasi bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi guna mendukung kinerja pelayanan pemerintah kepada publik dan mempercepat pengambilan keputusan para pengambil kebijakan. BNPB telah berkoordinasi dengan Kementerian PAN & RB dalam penyederhanaan birokrasi.

Perbaikan usulan penyederhanaan birokrasi disampaikan BNPB ke Kementerian PAN & RB melalui surat Sekretaris utama dimana terdapat 80 pejabat eselon III dan IV yang telah disetarakan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional dan masih terdapat 72 pejabat eselon III dan IV yang masih proses penyetaraan.

9. Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan yang baik melalui perencanaan dan pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran BNPB, maka BNPB mengeluarkan Surat Edaran No.

SE\_20/BNPB/6/2020 tentang Pemberian Penghargaan dan Sanksi atas Kinerja Program/Kegiatan dan Anggaran di Lingkungan BNPB. Pemberian penghargaan dan sanksi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas rencana kerja BNPB, meningkatkan kualitas pelaksanaan rencana kerja BNPB, meningkatkan akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan yang baik dari aspek perencanaan maupun pelaksanaan rencana kerja dan anggaran BNPB.

10. Terwujudnya link JDIH sebagai layanan informasi produk hukum bagi masyarakat.



**Gambar 3.46 JDIH**

11. Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan di Lingkungan BNPB sehingga dengan adanya kompetensi pegawai ASN ini, maka perlu disusun pola karier seperti untuk menjamin keselarasan potensi ASN dengan kebutuhan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan perlu disusun pola karier PNS yang terintegrasi secara nasional. Setiap Instansi Pemerintah menyusun pola karier ASN secara khusus sesuai dengan kebutuhan berdasarkan pola karier nasional. Standar Kompetensi Jabatan yang disusun untuk membantu memetakan Sumber Daya Manusia di lingkungan BNPB yang sesuai dengan pola kerja dan tugas fungsi unit kerja menuju terwujudnya rencana strategis yang telah disusun.

12. Saat ini BNPB sedang mengembangkan Aplikasi Sistem Informasi Persuratan dan Naskah Dinas (SIRATNA) yang berfungsi untuk memudahkan penciptaan dan pengelolaan persuratan baik itu surat keluar maupun surat masuk sehingga kegiatan persuratan di BNPB lebih efektif dan efisien.
13. Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Utama Tahun 2020-2024 mengacu kepada Peraturan Kepala BNPB No.1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
14. BNPB terus melakukan upaya dalam meningkatkan kapabilitas APIP sesuai standar BPKP dengan menggunakan metode penilaian *Intern Audit Capacity Model* (IACM). Tahun 2019, nilai maturitas SPIP BNPB berada pada level “3” dari skala “5” atau berada pada tingkat maturitas SPIP “*Integrated*”. Adapun rekomendasi kedepannya diantaranya adalah melakukan perencanaan program peningkatan level kapabilitas APIP dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan atau program-program yang disyaratkan pada KPA IACM level 4.
15. Pembentukan Agen Perubahan sangat diperlukan secara fundamental dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi, hal ini diperlukan dalam upaya untuk menggerakkan organisasi dalam melakukan perubahan, dalam pembentukan Agen Perubahan Bagian Organisasi dan Tatalaksana melakukan penyusunan SK Kepala BNPB Nomor 50 Tahun 2020 tentang Pembentukan Agen Perubahan di lingkungan BNPB dan ditetapkan pada tanggal 23 Maret 2020.
16. Pembahasan Progress Rencana Aksi RB kepada Unit Kerja BNPB, dalam rapat pembahasan ini menghasilkan tim-tim sebagai pokja renaksi yaitu
  - a. Rencana Aksi Pokja Manajemen Perubahan adalah penetapan dan Sosialisasi Road Map BNPB, penetapan *Quick Wins*, Pemantauan dan evaluasi RB, Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kinerja.
  - b. Rencana Aksi Pokja SDM, pengembangan pegawai berbasis kompetensi, penetapan kinerja individu, sosialisasi kode etik dan kode perilaku pegawai, dan evaluasi sistem informasi kepegawaian, asesmen center, merid sistem dan evaluasi jabatan juga penyederhanaan birokrasi.

- c. Rencana Aksi Pokja Organisasi dan Tata laksana, Penataan Organisasi, Evaluasi kelembagaan dan tindak lanjut evaluasi juga penyusunan Jabatan fungsional Kebencanaan, selain itu penyusunan peta proses bisnis hingga level 3 dan evaluasi SOP, pelaksanaan koordinasi Sistem Pemerintah berbasis elektronik, koordinasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik.
- d. Rencana Aksi Pokja Pelayanan Publik adalah standar pelayanan, budaya pelayanan prima, pengelolaan pengaduan, penilaian kepuasan terhadap pelayanan, pemanfaatan teknologi informasi.
- e. Rencana Aksi Pokja Pengawasan adalah gratifikasi, pengawasan SPIP, Pengaduan masyarakat, evaluasi *whistle blowing system*, penanganan benturan kepentingan dan pembangunan zona Integritas.
- f. Rencana Aksi Pokja Akuntabilitas adalah peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja, penyusunan pedoman akuntabilitas kinerja, melakukan pemutakhiran data kinerja secara berkala.
- g. Rencana Aksi Pokja Perundang-undangan adalah melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan di bidang Penanggulangan Bencana melalui identifikasi dan revisi peraturan perundang-undangan dan melakukan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan.

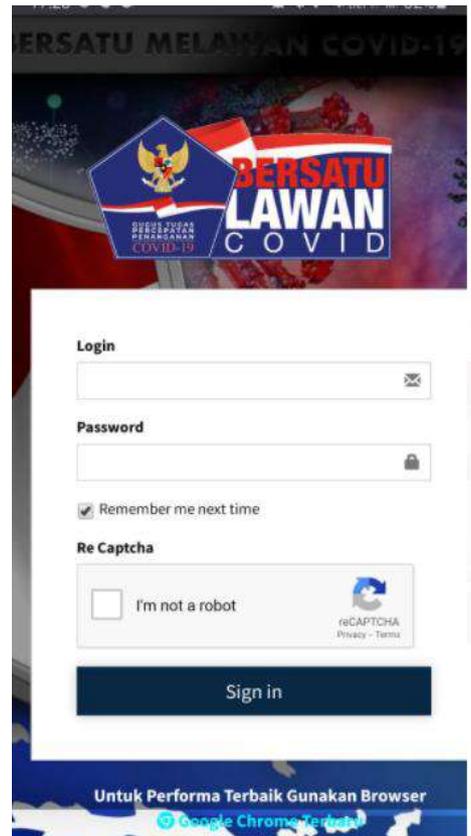
#### 17. Pembangunan Aplikasi Bersatu Lawan Covid (BLC)

Bersatu Lawan COVID atau BLC adalah aplikasi yang dibangun oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 untuk mengatasi pandemi Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19.

Dengan aplikasi ini, Anda bisa melakukan diagnosa mandiri untuk mengetahui status Anda. Selanjutnya Anda akan mendapat anjuran menurut hasil diagnosa tersebut. Fitur 'Sejarah Kontak Langsung' dapat Anda gunakan untuk melindungi orang-orang terdekat Anda dari ancaman COVID-19. BLC juga meningkatkan kewaspadaan Anda dengan fitur 'Pantau Langsung Kerawanan' sehingga Anda bisa melihat seberapa rawannya daerah Anda.

Selain itu, Anda juga dapat mengetahui update terkini tentang COVID-19 dari sumber data yang paling valid. Informasi yang bisa Anda dapatkan yaitu update angka positif, angka kesembuhan, dan angka meninggal. Anda juga bisa mengetahui rumah sakit rujukan COVID-19 dan melakukan konsultasi dokter secara online untuk mencegah paparan COVID-19.

Dengan menggunakan BLC, Anda juga telah membantu pelayanan COVID-19 karena sistem ini telah terintegrasi dengan Data RS Online Indonesia. BLC juga digunakan oleh petugas medis untuk merkapitulasi data pemeriksaan dan penegakan diagnosis COVID-19 di seluruh Indonesia.



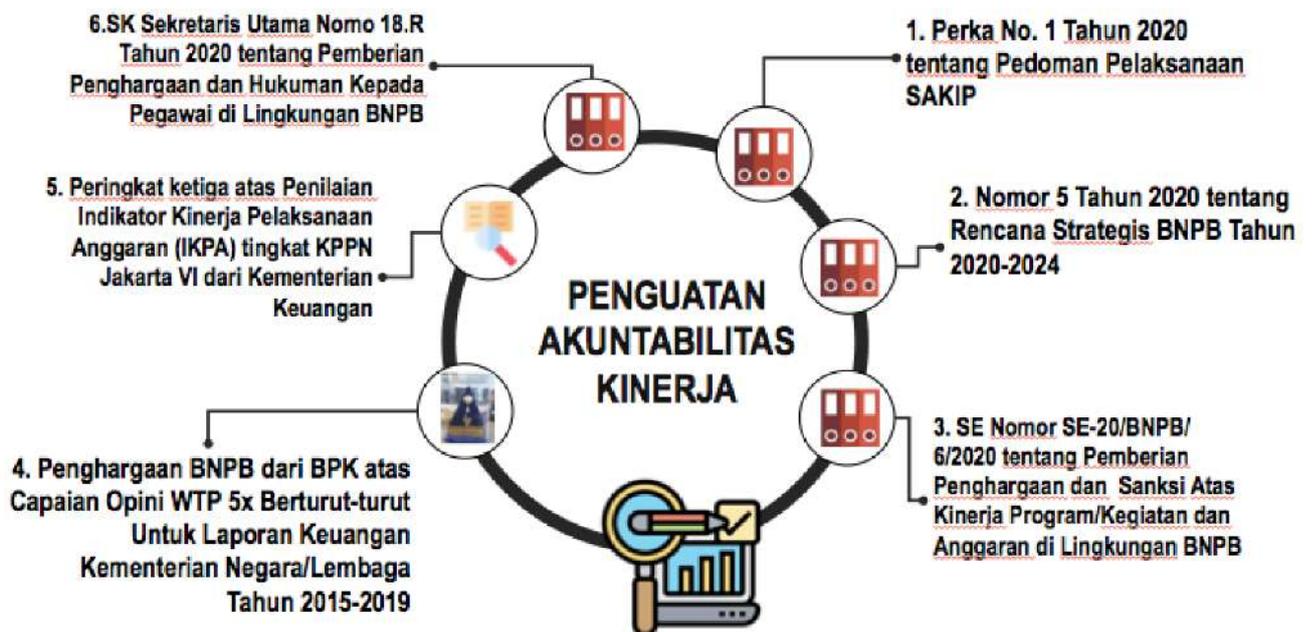
Gambar 3.47 Aplikasi BLC

Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah di BNPB terus mengalami peningkatan. Dari rekomendasi yang diberikan evaluator Kementerian PAN & RB, BNPB telah melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

No	Tahapan Kegiatan	Rincian Kegiatan
<b>1. Mengoptimalkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara periodik</b>		
1.	Telah dilakukan monitoring dan evaluasi kinerja setiap bulan menggunakan aplikasi internal dan eksternal	1. Menyusun laporan monitoring dan evaluasi setiap bulan. 2. Menggunakan aplikasi E-Sakip BNPB, Smart DJA, E-Monev BAppenas, E-SR 3. Menyusun Laporan Kinerja Triwulan, Semesteran dan Tahunan.

No	Tahapan Kegiatan	Rincian Kegiatan
<b>2. Memanfaatkan hasil pengukuran capaian kinerja sebagai dasar pemberian <i>reward and punishment</i></b>		
1.	Menyusun dasar pemberian penghargaan dan sanksi atas kinerja program/kegiatan dan Anggaran	1. Telah disahkan Surat Edaran SE-20/BNPB/6/2020 tentang Pemberian Penghargaan dan Sanksi Atas Kinerja Program/Kegiatan dan Anggaran. 2. SK Sekretaris Utama Nomor 18.R Tahun 2020 tentang Pemberian Penghargaan dan Hukuman Kepada Pegawai di Lingkungan BNPB

Adapun capaian penguatan akuntabilitas kinerja BNPB tahun 2020 tergambar dalam bagan sebagai berikut :



**Gambar 3.48 Capaian Penguatan Akuntabilitas Kinerja BNPB Tahun 2020**

BNPB juga melakukan Penguatan Pengawasan adalah untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dalam rangka mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas Kolusi Korupsi dan Nepotisme (KKN) di lingkungan Kementerian/Lembaga/pemerintah daerah.

Target yang ingin dicapai melalui area penguatan pengawasan ini adalah:

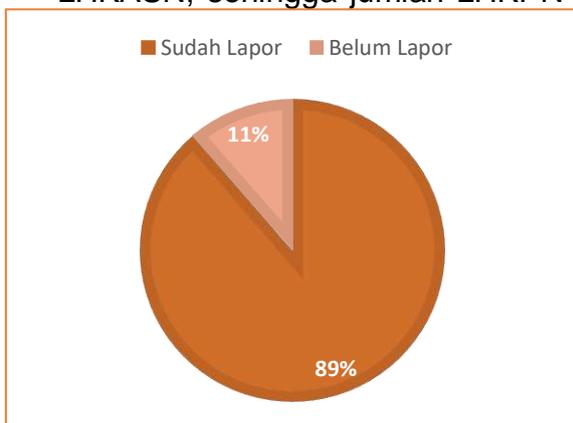
1. meningkatnya kepatuhan dan efektivitas terhadap pengelolaan keuangan negara oleh masing-masing kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
2. menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada masing - masing kementerian/lembaga/pemerintah daerah.
3. Meningkatkan sistem integritas di kementerian/lembaga/pemerintah daerah dalam upaya pencegahan KKN

Atas dasar tersebut, maka Badan Nasional Penanggulangan Bencana berupaya untuk mencapai kondisi yang diharapkan, melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pelaporan Harta Kekayaan (LHKPN/LHKASN)

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) adalah daftar seluruh harta kekayaan Penyelenggara Negara yang dituangkan di dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). LHKPN tidak hanya mencakup harta seorang penyelenggara negara, namun juga keluarga inti seperti pasangan dan anak yang masih menjadi tanggungan. LHKASN adalah dokumen penyampaian daftar harta kekayaan ASN yang dimiliki dan dikuasai sebagai bentuk transparansi ASN, jadi LHKASN diwajibkan bagi setiap ASN yang tidak terkena kewajiban menyampaikan LHKPN sehingga bagi ASN yang wajib LHKPN maka tidak wajib LHKASN. Artinya setiap ASN wajib menyampaikan harta kekayaannya baik melalui LHKPN maupun LHKASN.

BNPB juga mempunyai tim monitoring terkait pelaksanaan LHKPN dan LHKASN, sehingga jumlah LHKPN dan LHKASN terpantau secara berkala dan



**Gambar 3.50 Pegawai yang Lapor LHKASN**



**Gambar 3.50 Pegawai yang Lapor LHKPN**

melakukan upaya mendorong peningkatan kepatuhan pejabat negara/aparatur sipil negara untuk melaksanakan LHKPN dan LHKASN diantaranya melalui kegiatan sosialisasi LHKPN&LHKASN dan menginformasikan nama nama pejabat dan ASN yang belum melaporkan secara terbuka di lingkungan BNPB . Berikut persentase pegawai BNPB yang sudah melaporkan LHKPN dan LHKASN:

## 2. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Pengertian Sistem Pengendalian Intern menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, oleh sebab itu Sistem Pengendalian Intern menjadi hal penting yang dilaksanakan oleh BNPB.

Perjalanan SPIP di BNPB telah melalui proses yang panjang, salah satunya dengan nilai maturitas SPIP BNPB di tahun 2018 dengan nilai 2.3 (skala 5.0) yang dikeluarkan oleh BPKP. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pokja Penguatan Pengawasan yaitu :

- a. untuk mendukung lingkungan pengendalian yang memadai maka di keluarkannya Peraturan Kepala Badan Peraturan Kepala Badan Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan SPIP sebagai pengganti Surat Keputusan Kepala Badan Nomor 203 tahun 2011.
- b. Peraturan Kepala Badan Nomor 6 Tahun 2020 telah disosialisasikan ke semua unit kerja dengan harapan unit kerja paham dan sadar akan perlunya pelaksanaan SPIP di masing-masing unit kerja.
- c. Inspektorat Utama sebagai pembina dari SPIP terus melakukan bimbingan berupa pemberian konsultasi SPIP kepada unit kerja serta melakukan penilaian mandiri terhadap penyelenggaraan SPIP di masing masing unit kerja dan kemudian akan dilakukan evaluasi secara eksternal oleh BPKP sebagai

instansi pembina dari penyelenggaraan SPIP di lingkungan Kementerian/lembaga/pemerintah daerah.

- d. Telah dilakukan Penilaian Risiko pada masing-masing unit kerja.
- e. Untuk penilaian maturitas SPIP BNPB Tahun 2019, Inspektorat Utama telah melaksanakan penilaian mandiri penyelenggaraan SPIP. Hasil penilaian dari survey persepsi tersebut menghasilkan nilai 3,850, penilaian mandiri tersebut saat ini masih divalidasi oleh BPKP beserta semua dokumen pendukung. Namun sampai dengan saat ini penilaian mandiri tersebut masih dalam proses validasi oleh BPKP.

### 3. *Internal Audit Capability Model (IACM)*

IACM merupakan rerangka yang menggambarkan hal-hal mendasar yang dibutuhkan untuk mewujudkan pengawasan intern sektor publik yang efektif. Rerangka model tersebut dibangun melalui lima level yang progresif yaitu: *Initial, Infrastructure, Integrated, Managed dan Optimizing*.

Berdasarkan hasil penilaian IACM oleh BPKP, APIP BNPB pada tahun 2018 meraih Level 2 menuju 3, kemudian pada tahun 2019 Nilai IACM APIP telah mencapai level 3 yang mempunyai arti *Integrated yaitu* APIP mampu menilai efisiensi, efektivitas, ekonomis suatu kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern.

### 4. Pembangunan Zona Integritas

Pembangunan Zona Integritas mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 sebagai perubahan dari Permenpan RB Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM).

Berdasarkan Keputusan Kepala BNPB No.24A Tahun 2020 tanggal 26 Maret 2020 tentang Perubahan atas keputusan Kepala BNPB Nomor 12 Tahun 2020 tentang pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana dengan menetapkan 10 unit kerja yang

berkomitmen membangun Zona Integritas yaitu Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana, Pusat Pengendalian Operasi, Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan, Biro Hukum, organisasi dan Kerjasama, Biro Sumber Daya Manusia dan Kerjasama, Direktorat Pengembangan Strategi Penanggulangan Bencana, Direktorat Peningkatan dan Pemulihan Fisik, Direktorat Dukungan Infrastruktur Darurat, Direktorat Pengelolaan Logistik dan Peralatan serta Direktorat Mitigasi Bencana. Dari 10 unit kerja ini hanya 8 unit kerja yang dapat diusulkan oleh Tim Penilai Internal ZI BNPB kepada Menpan sesuai dengan hasil evaluasi penilaian ZI. Namun usaha BNPB masih harus dilakukan sebab dari 8 unit kerja ini belum ada satu pun yang lolos dari hasil evaluasi Menpan RB.

Berikut beberapa upaya yang dilakukan Pokja Pengawasan dalam membangun Zona Integritas:

- a) Melakukan pendampingan dan pembinaan terhadap unit kerja terkait pelaksanaan pembangunan Zona Integritas.
- b) Melakukan kegiatan sosialisasi pembangunan Zona Integritas;
- c) Perwujudan komitmen pimpinan terhadap penegakan Integritas di Lingkungan BNPB di masa pandemi covid-19, Kepala BNPB telah memberikan Surat permohonan kepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi untuk pendampingan pencegahan tindak pidana korupsi.

#### 5. Penanganan Pengaduan

Penanganan Pengaduan menjadi bagian penting dalam pelaporan yang mengandung informasi atau indikasi terjadinya Pelanggaran terhadap Kode Etik dan pedoman perilaku ASN di lingkungan BNPB.

Tujuan penanganan Pengaduan adalah untuk merespon Pengaduan baik yang berasal dari masyarakat, instansi lain di luar BNPB, maupun dari internal BNPB, agar citra dan wibawa BNPB tetap terjaga dan kepercayaan masyarakat terhadap BNPB meningkat.

Untuk mendukung hal tersebut, BNPB telah memiliki dua peraturan, yaitu:

- a. Peraturan BNPB Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat

b. Peraturan Kepala BNPB Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Sistem Penanganan Pengaduan Internal (Whistleblowing System)

BNPB juga sudah menyediakan aplikasi Laporan dalam mendukung pengaduan, saat ini sudah tersedia Aplikasi Penanganan Pengaduan Internal (*Whistleblowing System*) <https://web.bnpb.go.id/wisebnpb/>.

Penanganan Pengaduan melalui media massa menjadi bagian yang tak kalah penting dalam keterbukaan informasi kepada publik dengan membentuk tim khusus penanganan pengaduan yang langsung melakukan klarifikasi ke lapangan.

## 6. Gratifikasi

Berdasarkan Undang – Undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, gratifikasi yaitu meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya kepada Pegawai Negeri Sipil. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

BNPB telah menerbitkan Peraturan Kepala BNPB Nomor 04 Tahun 2017 Tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan BNPB. Berdasarkan peraturan tersebut, BNPB melakukan Pemantauan dan Evaluasi atas Penyelenggaraan Gratifikasi, Pelaporan ke KPK, dan *Public Campaign*. Mekanisme pelaporan UPG juga sudah dijelaskan pada Pasal 7 Perka Nomor 4 Tahun 2017 perihal Rekapitulasi dan Penetapan Status pada kepemilikan gratifikasi.

## 7. Penanganan Benturan Kepentingan

BNPB secara konsisten dan berkelanjutan berupaya mereformasi diri dalam menata birokrasi menuju ke arah tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Salah satu upaya dalam pelaksanaan reformasi birokrasi adalah pencegahan dan penanganan terjadinya benturan kepentingan dari

pejabat atau pegawai di lingkungan BNPB dalam pengambilan keputusan atau pelaksanaan tugasnya.

Benturan Kepentingan adalah situasi dimana pejabat atau pegawai di BNPB memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang dalam kedudukan atau jabatannya, sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan/atau tindakannya. Potensi adanya benturan kepentingan harus dapat ditangani secara tepat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku agar setiap keputusan yang diambil telah dilandasi dengan pertimbangan yang profesional, obyektif, berintegritas, independen, transparan, dan responsibel.

Beberapa upaya yang dilakukan BNPB dalam Penguatan Pengawasan terkait penanganan kebenturan kepentingan sebagai berikut:

- 1) menerbitkan Surat Edaran tentang Penanganan Benturan Kepentingan Nomor 10.A Tahun 2017 kemudian diperkuat menjadi Peraturan Kepala BNPB tentang Penanganan Benturan Kepentingan Nomor 5 Tahun 2020.
- 2) melakukan Identifikasi Benturan Kepentingan di masing – masing unit kerja.
- 3) melakukan sosialisasi secara masif kepada unit kerja terkait urgensi dari penanganan benturan kepentingan dan melaporkan kejadian jika terdapat benturan kepentingan kepada Inspektorat Utama dan per Desember 2020, tidak terdapat pengaduan terkait benturan kepentingan.

### **3.3. Realisasi Agenda Prioritas**

Sejak disusunnya Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017, rencana kerja pemerintah dilakukan dengan menggunakan pendekatan Holistik-Tematik, Integratif, dan Spasial, serta kebijakan anggaran belanja berdasarkan *money follows program*. Pendekatan tersebut dilakukan dalam rangka mengupayakan integrasi substansi (hulu hilir/holistik); integrasi spasial (keterkaitan kegiatan dalam suatu lokasi); pembagian kewenangan (kerangka regulasi) antar Kementerian/Lembaga (K/L), provinsi, kabupaten/kota; dan pembagian sumber pendanaan (kerangka pendanaan) K/L, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Dana Alokasi Khusus (DAK), pembiayaan investasi, dan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), serta upaya pemanfaatan Pembiayaan Investasi Non APBN (PINA). *Money follows*

*program* memastikan bahwa anggaran dialokasikan berdasarkan program yang benar-benar bermanfaat kepada rakyat bukan sekedar untuk pembiayaan tugas fungsi Kementerian/Lembaga yang bersangkutan.

Sehubungan dengan hal tersebut, penyusunan program dan kegiatan prioritas nasional dalam RKP Tahun 2020 berpengaruh dalam penentuan kegiatan prioritas di seluruh Kementerian/Lembaga. Tahun 2020, Pemerintah menetapkan 5 (lima) prioritas nasional, diantaranya:

1. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan
2. Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah
3. Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja
4. Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan Lingkungan Hidup
5. Stabilitas Pertahanan dan Keamanan

Dari kelima prioritas nasional di atas diterjemahkan ke dalam program prioritas pada masing-masing Kementerian/Lembaga. BNPB tahun 2020 telah menetapkan 13 Kegiatan BNPB yang masuk dalam Prioritas Nasional, yaitu

No	Kegiatan	Target	Realisasi
1	Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana	19 Lokasi	19 Lokasi
2	Desa Tangguh Bencana	120 Lokasi	120 Lokasi
3	Layanan Pendampingan Pemulihan Pascabencana Bidang Fisik	6 Lokasi	6 Lokasi
4	Layanan Pemulihan Pascabencana Bidang Sosial Ekonomi dan SDA	18 Lokasi	18 Lokasi
5	Pendamping Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (Jitupasna) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana	120 Personil	120 Personil
6	Layanan Budaya Sadar Bencana	81 Lokasi	81 Lokasi

No	Kegiatan	Target	Realisasi
7	Literasi Kebencanaan	43 Lokasi	43 Lokasi
8	Satuan Pendidikan Aman dari Bencana (SPAB)	8 Lokasi	8 Lokasi
9	Sistem Peringatan Dini	6 Lokasi	6 Lokasi
10	Pengelola Infrastruktur Darurat	100 Personil	100 Personil
11	Pendamping penanganan korban dan pengungsi	570 Orang	570 Orang
12	Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana dan Keposkoan	105 Orang	105 Orang
13	Pemenuhan Logistik dan Peralatan PB	144 Lokasi	144 Lokasi

Berdasarkan program prioritas nasional yang telah ditetapkan, BNPB melakukan monitoring atas progress pelaksanaannya dengan hasil sebagai berikut:

1. Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana

Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) PB memiliki sasaran peserta adalah ASN OPD Provinsi/Kab/Kota, dunia usaha, media, akademisi, dan masyarakat. Diklat Teknis PB dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman mengenai manajemen kebencanaan melalui Diklat Dasar Manajemen Bencana. Sedangkan pelaksanaan Simulasi merupakan salah satu metode latihan taktis tanpa pasukan Kegiatan Diklat Teknis PB dan Simulasi PB di daerah yang telah dilaksanakan yaitu

- a. Diklat Teknis PB di Daerah sebanyak 13 provinsi yaitu Bali, Gorontalo, Jambi, Riau, Papua, Aceh, Jawa Timur, NTB, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, Jawa Barat dan Jawa Tengah
- b. Mengikuti Simulasi PB di Provinsi 6 Lokasi yaitu Jawa Tengah, DIY, Sumatera Barat, NTT, Papua Barat, Aceh

Kendala dalam melaksanakan kegiatan diantaranya:

- a. Perencanaan program kegiatan yang sebelumnya dilaksanakan dengan metode klasikal secara keseluruhan menjadi metode e-learning, blended learning dan klasikal dengan persetujuan daerah dengan memperhatikan protokol kesehatan
- b. Terdapat pergantian 2 lokasi pelaksanaan Diklat Teknis PB yaitu Papua Barat dan Kalimantan Barat karena kedua daerah tersebut belum siap dalam penyelenggaraan diklat tersebut karena adanya pandemi covid-19 (baik secara klasikal maupun online) sehingga diganti dengan daerah yang lebih siap yaitu di Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Barat

## 2. Desa Tangguh Bencana

Desa Tangguh Bencana (Destana) merupakan program utama yang telah dimulai sejak tahun 2012. Destana tahun 2020 bertemakan Ekspedisi Desa Tangguh Bencana Tsunami dan Covid-19 di sepanjang pesisir barat Pulau Sumatera yang membentang dari Provinsi Aceh, Sumatera Utara, hingga Sumatera Barat. Target output Desa Tangguh Bencana sebanyak 120 lokasi dengan rincian sebagai berikut:

- a. Segmen 1 ; Provinsi Aceh terdiri dari 7 Kab/Kota (Banda Aceh, Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Aceh Singkil) @ 10 Desa/Kel.
- b. Segmen2 ; Sumatera Utara terdiri dari 2 Kab/Kota, (Mandailing Natal, Tapanuli Tengah) @ 10 Desa/Kel
- c. Segmen3 ; Sumatera Barat terdiri dari 3 Kab/Kota (Padang, Padang Pariaman, Pariaman, Mentawai) @ 10 Desa/Kel

Kegiatan yang dilaksanakan diantaranya:

- a. Penguatan desa tangguh bencana
- b. Pembekalan fasilitator desa tangguh bencana multipihak
- c. Fasilitasi penilaian ketangguhan desa (PKD)

Kendala yang diharapi:

- a. Pelaksanaan destana pada masa pandemi covid-19 sehingga beberapa tahapan dalam pelaksanaan destana dilakukan secara online.
- b. Pembekalan fasilitator yang dilakukan secara online ternyata berdampak terhadap rendahnya tingkat pemahaman yang diterima oleh peserta. Salah satunya karena interaksi yang terbatas antara trainer dan peserta
- c. Masih kurangnya dukungan dari daerah pada saat pelaksanaan destana
- d. Permasalahan jaringan / koneksi internet

3. Layanan Pendampingan Pemulihan Pascabencana Bidang Fisik

Kegiatan yang dilaksanakan yaitu Pendampingan Pemulihan dan Peningkatan Fisik Sektor Perumahan dan Infrastruktur. Kegiatan yang bertujuan memfasilitasi pendampingan pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RR) pascabencana bidang fisik terhadap daerah yang terkena bencana masif. Target pelaksanaannya yaitu dilaksanakan di 6 (enam) wilayah dampak bencana massif dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pendampingan RR Pascabencana Gempabumi, Tsunami dan Likuifaksi di Provinsi Sulawesi Tenggara (Kota Palu, Kab. Sigi, Kab. Donggala, Kab. Parigi Moutong).
- b. Pendampingan RR Pascabencana Erupsi Sinabung di Kab. Karo, Prov. Sumatera Utara.
- c. Pendampingan RR Pascabencana Gempabumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- d. Pendampingan RR Pascabencana Akibat Dampak Siklon Cempaka di Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur.
- e. Pendampingan RR Pascabencana Tsunami Selat Sunda di Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten.
- f. Pendampingan RR Pascabencana Tsunami Selat Sunda di Provinsi Lampung

Kendala yang dihadapi:

- a. Pandemi Covid-19 menghambat proses koordinasi dan observasi lapangan
  - b. Transportasi dan cuaca di daerah pascabencana.
4. Layanan Pemulihan Pascabencana Bidang Sosial Ekonomi dan Sumber Daya Alam (SDA)

Kegiatan yang dilaksanakan merupakan pendampingan dan pembinaan dalam aspek sosial ekonomi dan SDA. Hal ini dimaksudkan guna meningkatkan kapasitas sumberdaya masyarakat di wilayah pascabencana sehingga mampu memulihkan dan meningkatkan kesejahteraannya. Target dari kegiatan ini yaitu sebanyak 18 lokasi dengan tambahan 2 lokasi menjadi 20 lokasi dengan memuat Major Project Gempa NTB, Gempa-Tsunami-Likuifaksi Sulteng, Tsunami Selat Sunda ditambah bencana masif lainnya. Dalam melaksanakan kegiatannya, BNPB bekerjasama dengan Perguruan Tinggi Negeri di masing-masing daerah tersebut.

Kendala yang dihadapi:

Perubahan anggaran di akhir tahun yang bersumber dari dana hibah masyarakat luar negeri sehingga membutuhkan percepatan dalam melaksanakan kegiatan.

5. Pendamping Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (Jitupasna) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)

Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk bimbingan teknis pengkajian kebutuhan pascabencana dan R3P. Diharapkan peserta yang mengikuti kegiatan tersebut dapat melaksanakan tugasnya ketika terjadi bencana massif untuk membantu tim dari BNPB. Target dari kegiatan ini merupakan BPBD Prov. / Kab. / Kota dan Dinas Teknis sebanyak 120 Orang. Adapun lokasi pelaksanaannya yaitu Kota Bogor, Kota Pekanbaru, dan Kota Banjarmasin.

Kendala yang dihadapi:

Jadwal pelaksanaan mundur akibat pandemi covid-19, Penguatan SDM karena frekuensi mutasi yang tinggi antar OPD

6. Layanan Budaya Sadar Bencana

Layanan Budaya Sadar Bencana merupakan Kegiatan pagelaran seni tradisional dalam diseminasi Penanggulangan bencana & Covid-19. Tujuan dari kegiatan ini diantaranya dalam rangka meningkatkan budaya sadar bencana. Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu:

- a. sandiwara Radio di 81 lokasi dengan tema manajemen penanggulangan bencana saat masa Pandemi Covid-19 mengedukasi
- b. Pagelaran seni tradisional di Sampang, Jawa Timur, Gunung Kidul Yogyakarta, Indramayu Jawa Barat. Kudus, Jawa Tengah

Kendala yang dihadapi:

Karena adanya pandemi, pelaksanaan kegiatan pertunjukan kesenian tradisional dibuat dalam bentuk rekaman, sehingga pesan-pesan edukasi tidak bisa langsung disampaikan kepada masyarakat.

7. Literasi Kebencanaan

Literasi kebencanaan merupakan kegiatan guna memberikan wawasan atau pengetahuan tentang kebencanaan dimana target tahun 2020 adalah sebanyak 43 kegiatan.

Strategi yang dilakukan adalah dengan membuat webinar untuk kegiatan pendampingan daerah dan forum komunikasi menggunakan zoom meeting. Selain itu, inovasi merekam narasumber dalam suatu bentuk video agar memudahkan peserta dari daerah mengikuti langkah-langkah panduan untuk membuat suatu petas seperti QGIS.

Kendala yang dihadapi

Pandemi COVID-19 yang menyebabkan diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Sehingga akses dan mengumpulkan orang dalam suatu ruangan seperti pendampingan dan forum komunikasi terkendala.

8. Satuan Pendidikan Aman dari Bencana (SPAB)

Implementasi program SPAB telah berjalan sejak tahun 2015 dengan berbagai strategi. Pada awalnya implementasi SPAB ini dilakukan secara langsung ke

sekolah, warga sekolah tertentu mendapatkan bimbingan perihal bagaimana cara menerapkan SPAB di sekolah. Pada tahun 2020 ini BNPB menjalin Kerjasama dengan Muhammadiyah khususnya Hizbul Wathan (HW) dan Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) untuk melakukan implementasi SPAB di satuan pendidikan Muhammadiyah melalui gerakan kepanduan HW. Rangkaian pelaksanaan Implementasi SPAB diawali oleh Bimbingan Teknis yang bertujuan untuk membekali pelatih Gerakan kepanduan agar memiliki wawasan terkait kebencanaan khususnya SPAB. Melalui bimbingan teknis ini, diharapkan pembina Gerakan kepanduan dapat menjadi fasilitator daerah yang kemudian dapat mengimplementasikan SPAB di daerahnya.

Pada tahun 2020, pelaksanaan implementasi SPAB dilaksanakan di 8 kabupaten/kota yaitu Kab Pasaman, Kota Bukittinggi, Kab Pesisir Barat, Kab Kerinci, Kab Banyuwangi, Kota Ambon, Kab Aceh Besar, dan Kab Jembrana.

Kendala yang dihadapi

Pandemi covid-19 sehingga perlu penerapan protokol kesehatan dalam berbagai macam bentuk kegiatan, dan hal tersebut memerlukan koordinasi lebih lanjut dengan berbagai pihak, seperti sektor usaha, lembaga pendidikan, kementerian lembaga, dan pemerintah daerah.

#### 9. Sistem Peringatan Dini

Sistem peringatan dini (Early Warning System-EWS) dapat digunakan untuk menghindari korban jiwa akibat bencana, yang pada akhirnya dapat menurunkan indeks risiko bencana nasional. Tujuan utama dari pemasangan sistem peringatan dini ini adalah untuk membangun kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana. Sistem Peringatan Dini Bencana di kawasan rawan bencana dengan output sebanyak 6 (enam) lokasi sebagai berikut:

- a. Flood Early Warning System (FEWS) : Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Kelayang, Kab. Belitung, Provinsi Bangka Belitung
- b. Tsunami Early Warning System (TEWS) :

- KEK Mandalika, kab. Lombok Tengah Provinsi NTB,
  - Kawasan rawan tsunami di Kabupaten Kepulauan Mentawai Provinsi Sumatera Barat,
  - Kawasan rawan tsunami Selatan Jawa Timur di Kab. Banyuwangi, dan
- c. Kawasan Rawan Tsunami Nias di Kab Nias Selatan serta Landslide Early Warning System (LEWS): di Kawasan Patahan Kendeng (Kota Semarang di Provinsi Jawa Tengah)

Kendala yang dihadapi

- a. Terjadinya *pandemi* covid-19 di negara Indonesia sejak bulan Maret 2020 yang memberikan pengaruh pada pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya;
- b. 2) Berlakunya Keppres No. 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dimana Kepala BNPB ditunjuk sebagai Ketua Gugus Tugas Pusat, hal ini mempengaruhi program/kegiatan rutin ditunda pelaksanaannya karena fokus kepada kegiatan penanganan Covid-19 di beberapa daerah;
- c. Pelaksanaan kegiatan yang disesuaikan dengan kondisi pandemi covid-19, dimana adanya pembatasan peserta, kurangnya mobilisasi penyelenggara kegiatan, serta pelaksanaan kegiatan secara daring;

#### 10. Pengelola Infrastruktur Darurat

Kegiatan yang dilaksanakan dalam Pendampingan Pengelola Infrastruktur Darurat yaitu Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan Lingkungan Hidup yang salah satu program prioritasnya adalah Penguatan Ketahanan Bencana dan kemudian diadaptasi dalam kegiatan BNPB yaitu Manajemen Penguatan Kedaruratan. Pada tahun 2020, BNPB telah melaksanakan pendampingan pengelola Infrastruktur darurat sebanyak 100 personil yang terdiri atas BPBD Prov/Kota/Kab Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan instansi terkait. Kegiatan dilaksanakan di wilayah Kota Surakarta, Prov Jawa Tengah.

Kendala yang dihadapi

Terhambatnya kegiatan karena Pandemi Covid-19

#### 11. Pendamping penanganan korban dan pengungsi

Kegiatan Pendamping penanganan korban dan pengungsi berupa kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi Tim Reaksi Cepat (TRC) dari BPBD provinsi/kab/kota. Tahun 2020, BNPB telah melaksanakan Bimtek di 3 (tiga) wilayah yaitu Barat, Tengah, dan Timur. Kegiatan ini diharapkan TRC dapat memiliki efektivitas kerja dan dapat membangun jaringan ketika turun dilapangan.

Kendala yang dihadapi

Terhambatnya kegiatan karena Pandemi Covid-19

#### 12. Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana dan Keposkoan

Metode kegiatan Pendampingan Teknis Sistem Komando Penanggulangan Darurat Bencana dan Keposkoan menekankan pada upaya yang mendorong peran serta aktif peserta secara penuh. Kegiatan dilaksanakan di Kota Serang dengan peserta sebanyak 55 peserta hadir ditempat dan 50 peserta hadir secara daring. Pendampingan Teknis Sistem Komando Penanggulangan Darurat Bencana dan Keposkoan menekankan pada upaya yang mendorong peran serta aktif peserta secara penuh.

Kendala yang dihadapi

Kebijakan penerapan PSBB di beberapa daerah sehingga peserta kegiatan sulit untuk mengikuti acara secara langsung.

#### 13. Pemenuhan Logistik dan Peralatan PB

Pemenuhan Logistik dan Peralatan PB untuk memenuhi ketersediaan logistik dan peralatan baik dipusat maupun di daerah. Dukungan logistik PB dalam rangka penguatan kelembagaan BPBD di daerah maupun bantuan darurat dilaksanakan melalui pengadaan barang logistik guna memenuhi kebutuhan bufferstock daerah pada kegiatan penanggulangan bencana. Tahun 2020 pengadaan logistik PB, terdiri dari makanan siap saji, paket tambahan gizi, lauk pauk, selimut, matras, paket perlengkapan bayi (*kidsware*), paket perlengkapan keluarga (*family kit*), dan masker. Dialokasikan bagi BPBD

provinsi serta kabupaten/kota dimana mekanisme penyalurannya melalui 34 BPBD Provinsi untuk selanjutnya didistribusikan ke BPBD kabupaten/kota di wilayah masing-masing. Sedangkan ketersediaan peralatan merupakan kebutuhan sarana dan prasarana dalam rangka menunjang kelancaran penanggulangan bencana. Terdapat 548 lokasi terdiri dari 34 provinsi dan 514 kota/kab yang menjadi lokus sasaran dari bantuan pemenuhan kebutuhan peralatan PB.

Kendala yang dihadapi

Dalam rangka reformasi pada bidang administrasi publik serta akuntabilitas dan transparansi kinerja Direktorat Pengelolaan Logistik dan Peralatan pada tahun 2020 berkomitmen untuk melaksanakan proses pengadaan barang dalam rangka pemenuhan kebutuhan logistik dan peralatan untuk penguatan kelembagaan daerah dan bufferstock bencana dengan sistem katalog elektronik (E-katalog). Prosedur atau mekanisme dalam proses pelaksanaannya membutuhkan waktu yang cukup lama sehingga belum semua jenis barang yang diadakan pada tahun 2020 dapat menggunakan sistem e-katalog.

### **3.4. Realisasi Anggaran Tahun 2020**

Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2020 BNPB mendapatkan pagu awal sebesar Rp700.646.814.000 termasuk belanja bantuan sosial berupa Dana Siap Pakai (DSP) untuk penanganan darurat bencana sebesar Rp250 milyar. Sepanjang tahun 2020 pagu BNPB mengalami penambahan yang disebabkan adanya wabah *Corona Virus Disease* (Covid-19) yang terus meningkat dan meluas, sehingga BNPB mendapatkan tambahan dana untuk penanganan Covid-19 dengan total sebesar Rp10 triliun dan dana penanganan bencana alam sebesar Rp2 triliun. Adapun rincian anggaran BNPB tahun 2020 adalah

Tabel 3.8 Realisasi Anggaran tahun 2020

No	Program	Pagu	Realisasi	%
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNPB	215.174.419.000	213.083.573.087	99,03%
2	Program Penanggulangan Bencana	12.489.393.367.000	11.535.604.942.755,00	92,36%
	2.1 Dana Rutin	206.848.722.000	200.889.786.739	96,79%
	2.2 Dana Siap Pakai (DSP) Bencana Alam	2.081.400.000.000	2.046.350.743.387	98,32%
	2.3 DSP Covid-19	10.092.372.374.000	9.180.269.886.231	90,96%
	2.4 Hibah	108.772.271.000	108.094.526.398	99,38%
3	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BNPB	8.924.900.000	8.863.445.309	99,31%
<b>TOTAL</b>		<b>12.713.492.686.000</b>	<b>11.757.551.961.151</b>	<b>92,48%</b>

Realisasi anggaran BNPB pada tahun 2020 mencapai 92,48, dengan realisasi DSP sebesar 92,22% dan realisasi penyaluran hibah sebesar 99,38%. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2019, terdapat penurunan realisasi anggaran sebesar 6,47%. Sepanjang tahun 2020, BNPB mengalami kendala dalam melaksanakan kegiatan dalam mencapai target yang ditetapkan, yaitu:

1. Adanya pembatasan kegiatan atas covid-19 sehingga kegiatan koordinasi dan pertemuan harus dilaksanakan melalui jarak jauh dan menggunakan teknologi informasi secara virtual/daring.
2. Realisasi output di akhir tahun sehingga capaian output belum maksimal.
3. Adanya gagal lelang dan proses e-Katalog yang panjang sehingga proses pengadaan menjadi terhambat.
4. Belum maksimalnya GU Nihil Dana Siap Pakai menyebabkan realisasi anggaran menjadi kurang optimal

## **BAB 4**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja BNPB tahun 2020 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi BNPB selama tahun 2020. Laporan Kinerja tahun 2020 merupakan tahun awal dalam periode RPJMN 2020-2024 sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Penyusunan Laporan Kinerja BNPB mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 Tahun 2019 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

Penetapan indikator kinerja merupakan tujuan dan sasaran strategis BNPB menuju terwujudnya visi dan misi BNPB. Capaian Kinerja merupakan wujud sinergi seluruh jajaran BNPB dalam melaksanakan kegiatan dengan berbagai tantangan di tahun 2020. Namun demikian, upaya penyempurnaan dan perbaikan indikator kinerja kaakan terus dilakukan melalui penetapan kinerja yang lebih terukur, berkualitas, dan mencakup seluruh kegiatan BNPB.

Sepanjang tahun 2020, Indonesia tidak hanya menghadapi bencana alam namun juga bencana non alam. Bencana alam di Indonesia terus terjadi diseluruh wilayah Indonesia dengan bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor dan puting beliung yang paling banyak terjadi. Bencana non alam yaitu pandemi covid-19 yang turut melanda dunia, menyebabkan masyarakat dan seluruh kegiatan ekonomi dan pemerintah menjadi terbatas. Dalam menghadapi tantangan bencana yang terus beragam perlu dilakukan upaya mendorong peningkatan kinerja dan menghadapi tantangan ke depan yaitu

1. memperkuat peran aktif kelembagaan dan komitmen bersama dari semua pihak yang terlibat dalam upaya penanggulangan bencana;
2. Pengelolaan data dan informasi kebencanaan yang terpadu dan terintegrasi;

3. Peningkatan kompetensi SDM Penanggulangan Bencana;
4. Meningkatkan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana baik bencana alam maupun bencana non alam.

Laporan Kinerja BNPB tahun 2020 ini diharapkan dapat memberikan informasi yang komprehensif dan transparan atas capaian kinerja dan strategi instansi dalam mencapai tujuan instansi. Laporan ini juga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan capaian kinerja BNPB sehingga berdampak pada penanggulangan bencana yang lebih baik.

# LAMPIRAN



**BNPB**

## BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

Gedung Graha BNPB Jalan Pramuka Kav. 38, Jakarta Timur 13120

Telepon: 021-2982 7793, Faksimile: 021-2128 1200

Situs: <http://www.bnpb.go.id>

Nomor : B. 028 /IU/PW.03/2/2021  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 Laporan  
Hal : Pernyataan Telah Direviu

25 Februari 2021

Yth.

Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan  
Bencana

di

Jakarta

Sehubungan dengan Nota Dinas Sekretaris Utama Nomor 52/SU/02/2021 tanggal 18 Februari 2021 perihal Permintaan Reviu Laporan Kinerja BNPB Tahun 2021, kami telah melakukan reviu atas Laporan Kinerja BNPB Tahun Anggaran 2021 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, terdapat catatan dan rekomendasi sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Reviu atas Laporan Kinerja BNPB Tahun 2020 Nomor 09/IU/02/2021 tanggal 23 Februari 2021 dan atas hal tersebut telah dilakukan perbaikan seluruhnya sehingga sudah tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Inspektur Utama,

Tetty Saragih

Tembusan:  
Kepala BNPB (Tanpa Lampiran)

## Lampiran 1. Perjanjian Kinerja

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA**  
**BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA**

  
**BNPB**

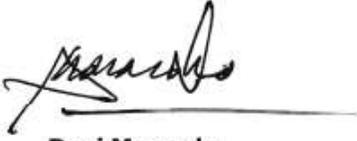
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

**Nama : Letnan Jenderal TNI Doni Monardo**  
**Jabatan : Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana**

Pada tahun 2020 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, Desember 2020  
Kepala Badan Nasional  
Penanggulangan Bencana

  
**Doni Monardo**  
**Letnan Jenderal TNI**

## BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

### FORMULIR PERJANJIAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA KEMENTERIAN / LEMBAGA

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA  
TAHUN ANGGARAN : 2020

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Menurunnya risiko bencana di daerah rawan bencana	Indeks Risiko Bencana	141,14
2	Terselamatkannya sebanyak mungkin jiwa pada saat keadaan darurat bencana	Rata-rata angka kematian akibat bencana pada saat keadaan darurat per 100.000 penduduk wilayah terdampak	2,5
3	Terpuhikannya sarana dan prasarana sosial, ekonomi dan produktivitas sumber daya alam pada daerah terdampak pascabencana	Rata-rata kenaikan Indeks Pemulihan Pascabencana	5
4	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional, akuntabel dan transparan	Indeks Reformasi Birokrasi	76

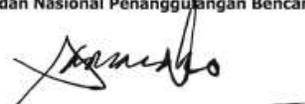
#### PROGRAM

- 1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
  - 2 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas
  - 3 Program Penanggulangan Bencana
- Total

#### ANGGARAN

Rp. 215.174.419.000,-  
Rp. 8.924.900.000,-  
Rp. 12.488.484.374.000,-  
Rp. 12.712.583.693.000,-

Jakarta, Desember 2020  
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana

  
Doni Monardo  
Letnan Jenderal TNI

## Lampiran 2. Nilai IRBI per kab/kota di Indonesia tahun 2020

ID PROV	PROVINSI	ID KAB	KAB_KOTA	SKOR IRBI 2020
11	ACEH	1101	SIMEULUE	162.00
11	ACEH	1102	ACEH SINGKIL	178.00
11	ACEH	1103	ACEH SELATAN	171.20
11	ACEH	1104	ACEH TENGGARA	127.23
11	ACEH	1105	ACEH TIMUR	176.05
11	ACEH	1106	ACEH TENGAH	124.80
11	ACEH	1107	ACEH BARAT	189.04
11	ACEH	1108	ACEH BESAR	211.20
11	ACEH	1109	PIDIE	163.20
11	ACEH	1110	BIREUEN	168.00
11	ACEH	1111	ACEH UTARA	175.20
11	ACEH	1112	ACEH BARAT DAYA	183.20
11	ACEH	1113	GAYO LUES	101.41
11	ACEH	1114	ACEH TAMIANG	146.52
11	ACEH	1115	NAGAN RAYA	203.20
11	ACEH	1116	ACEH JAYA	178.80
11	ACEH	1117	BENER MERIAH	123.20
11	ACEH	1118	PIDIE JAYA	137.60
11	ACEH	1171	KOTA BANDA ACEH	127.31
11	ACEH	1172	KOTA SABANG	116.62
11	ACEH	1173	KOTA LANGSA	143.20
11	ACEH	1174	KOTA LHOKEUMAWA	130.11
11	ACEH	1175	KOTA SUBULUSSALAM	95.20
51	BALI	5101	JEMBRANA	160.41
51	BALI	5102	TABANAN	153.27
51	BALI	5103	BADUNG	101.81
51	BALI	5104	GIANYAR	129.79
51	BALI	5105	KLUNGKUNG	133.42
51	BALI	5106	BANGLI	139.46
51	BALI	5107	KARANG ASEM	137.94
51	BALI	5108	BULELENG	102.05
51	BALI	5171	KOTA DENPASAR	106.70
36	BANTEN	3601	PANDEGLANG	177.46
36	BANTEN	3602	LEBAK	182.04
36	BANTEN	3603	TANGERANG	146.93
36	BANTEN	3604	SERANG	203.20
36	BANTEN	3671	KOTA TANGERANG	136.00

**BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA**

ID PROV	PROVINSI	ID KAB	KAB_KOTA	SKOR IRBI 2020
36	BANTEN	3672	KOTA CILEGON	128.15
36	BANTEN	3673	KOTA SERANG	168.56
36	BANTEN	3674	KOTA TANGERANG SELATAN	96.61
17	BENGKULU	1701	BENGKULU SELATAN	186.40
17	BENGKULU	1702	REJANG LEBONG	100.71
17	BENGKULU	1703	BENGKULU UTARA	205.60
17	BENGKULU	1704	KAUR	203.20
17	BENGKULU	1705	SELUMA	191.20
17	BENGKULU	1706	MUKOMUKO	166.02
17	BENGKULU	1707	LEBONG	118.00
17	BENGKULU	1708	KEPAHIANG	138.00
17	BENGKULU	1709	BENGKULU TENGAH	173.20
17	BENGKULU	1771	KOTA BENGKULU	137.68
34	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	3401	KULON PROGO	203.20
34	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	3402	BANTUL	187.20
34	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	3403	GUNUNG KIDUL	157.60
34	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	3404	SLEMAN	83.72
34	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	3471	KOTA YOGYAKARTA	72.86
31	DKI JAKARTA	3101	KEPULAUAN SERIBU	56.66
31	DKI JAKARTA	3171	KOTA JAKARTA SELATAN	52.18
31	DKI JAKARTA	3172	KOTA JAKARTA TIMUR	75.08
31	DKI JAKARTA	3173	KOTA JAKARTA PUSAT	56.90
31	DKI JAKARTA	3174	KOTA JAKARTA BARAT	71.07
31	DKI JAKARTA	3175	KOTA JAKARTA UTARA	72.25
75	GORONTALO	7501	BOALEMO	122.40
75	GORONTALO	7502	GORONTALO	6.00
75	GORONTALO	7503	PAHUWATO	161.60
75	GORONTALO	7504	BONE BOLANGO	147.20
75	GORONTALO	7505	GORONTALO UTARA	137.60
75	GORONTALO	7571	KOTA GORONTALO	87.82
15	JAMBI	1501	KERINCI	136.34
15	JAMBI	1502	MERANGIN	166.00
15	JAMBI	1503	SORALANGUN	131.44
15	JAMBI	1504	BATANG HARI	120.40
15	JAMBI	1505	MUARO JAMBI	132.40

ID PROV	PROVINSI	ID KAB	KAB_KOTA	SKOR IRBI 2020
15	JAMBI	1506	TANJUNG JABUNG TIMUR	156.40
15	JAMBI	1507	TANJUNG JABUNG BARAT	156.40
15	JAMBI	1508	TEBO	131.20
15	JAMBI	1509	BUNGO	143.20
15	JAMBI	1571	KOTA JAMBI	126.90
15	JAMBI	1572	KOTA SUNGAI PENUH	124.40
32	JAWA BARAT	3201	BOGOR	136.88
32	JAWA BARAT	3202	SUKABUMI	190.75
32	JAWA BARAT	3203	CIANJUR	215.08
32	JAWA BARAT	3204	BANDUNG	174.00
32	JAWA BARAT	3205	GARUT	205.52
32	JAWA BARAT	3206	TASIKMALAYA	203.01
32	JAWA BARAT	3207	CIAMIS	141.57
32	JAWA BARAT	3218	PANGANDARAN	145.44
32	JAWA BARAT	3208	KUNINGAN	131.13
32	JAWA BARAT	3209	CIREBON	160.63
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	143.43
32	JAWA BARAT	3211	SUMEDANG	142.15
32	JAWA BARAT	3212	INDRAMAYU	136.79
32	JAWA BARAT	3213	SUBANG	171.91
32	JAWA BARAT	3214	PURWAKARTA	137.31
32	JAWA BARAT	3215	KARAWANG	174.43
32	JAWA BARAT	3216	BEKASI	132.89
32	JAWA BARAT	3217	BANDUNG BARAT	110.22
32	JAWA BARAT	3271	KOTA BOGOR	75.75
32	JAWA BARAT	3272	KOTA SUKABUMI	114.40
32	JAWA BARAT	3273	KOTA BANDUNG	122.32
32	JAWA BARAT	3274	KOTA CIREBON	172.76
32	JAWA BARAT	3275	KOTA BEKASI	131.60
32	JAWA BARAT	3276	KOTA DEPOK	89.63
32	JAWA BARAT	3277	KOTA CIMAH	105.41
32	JAWA BARAT	3278	KOTA TASIKMALAYA	119.20
32	JAWA BARAT	3279	KOTA BANJAR	152.80
33	JAWA TENGAH	3301	CILACAP	112.75
33	JAWA TENGAH	3302	BANYUMAS	193.71
33	JAWA TENGAH	3303	PURBALINGGA	159.20
33	JAWA TENGAH	3304	BANJARNEGARA	127.36
33	JAWA TENGAH	3305	KEBUMEN	114.67

**BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA**

ID PROV	PROVINSI	ID KAB	KAB_KOTA	SKOR IRBI 2020
33	JAWA TENGAH	3306	PURWOREJO	190.01
33	JAWA TENGAH	3307	WONOSOBO	122.94
33	JAWA TENGAH	3308	MAGELANG	71.16
33	JAWA TENGAH	3309	BOYOLALI	130.32
33	JAWA TENGAH	3310	KLATEN	99.24
33	JAWA TENGAH	3311	SUKOHARJO	93.20
33	JAWA TENGAH	3312	WONOGIRI	124.77
33	JAWA TENGAH	3313	KARANGANYAR	108.03
33	JAWA TENGAH	3314	SRAGEN	142.00
33	JAWA TENGAH	3315	GROBOGAN	154.66
33	JAWA TENGAH	3316	BLORA	135.33
33	JAWA TENGAH	3317	REMBANG	151.12
33	JAWA TENGAH	3318	PATI	171.10
33	JAWA TENGAH	3319	KUDUS	130.59
33	JAWA TENGAH	3320	JEPARA	148.77
33	JAWA TENGAH	3321	DEMAK	105.77
33	JAWA TENGAH	3322	SEMARANG	118.89
33	JAWA TENGAH	3323	TEMANGGUNG	134.51
33	JAWA TENGAH	3324	KENDAL	98.97
33	JAWA TENGAH	3325	BATANG	168.40
33	JAWA TENGAH	3326	PEKALONGAN	172.56
33	JAWA TENGAH	3327	PEMALANG	165.97
33	JAWA TENGAH	3328	TEGAL	181.08
33	JAWA TENGAH	3329	BREBES	189.94
33	JAWA TENGAH	3371	KOTA MAGELANG	108.00
33	JAWA TENGAH	3372	KOTA SURAKARTA	67.96
33	JAWA TENGAH	3373	KOTA SALATIGA	91.20
33	JAWA TENGAH	3374	KOTA SEMARANG	115.52
33	JAWA TENGAH	3375	KOTA PEKALONGAN	138.13
33	JAWA TENGAH	3376	KOTA TEGAL	116.80
35	JAWA TIMUR	3501	PACITAN	124.78
35	JAWA TIMUR	3502	PONOROGO	120.95
35	JAWA TIMUR	3503	TRENGGALEK	139.30
35	JAWA TIMUR	3504	TULUNGAGUNG	140.39
35	JAWA TIMUR	3505	BLITAR	169.22
35	JAWA TIMUR	3506	KEDIRI	136.75
35	JAWA TIMUR	3507	MALANG	139.35
35	JAWA TIMUR	3508	LUMAJANG	115.06
35	JAWA TIMUR	3509	JEMBER	162.85

ID PROV	PROVINSI	ID KAB	KAB_KOTA	SKOR IRBI 2020
35	JAWA TIMUR	3510	BANYUWANGI	137.16
35	JAWA TIMUR	3511	BONDOWOSO	136.38
35	JAWA TIMUR	3512	SITUBONDO	130.27
35	JAWA TIMUR	3513	PROBOLINGGO	154.13
35	JAWA TIMUR	3514	PASURUAN	154.64
35	JAWA TIMUR	3515	SIDOARJO	78.89
35	JAWA TIMUR	3516	MOJOKERTO	125.40
35	JAWA TIMUR	3517	JOMBANG	144.77
35	JAWA TIMUR	3518	NGANJUK	122.12
35	JAWA TIMUR	3519	MADIUN	153.86
35	JAWA TIMUR	3520	MAGETAN	160.47
35	JAWA TIMUR	3521	NGAWI	136.90
35	JAWA TIMUR	3522	BOJONEGORO	94.91
35	JAWA TIMUR	3523	TUBAN	162.69
35	JAWA TIMUR	3524	LAMONGAN	118.60
35	JAWA TIMUR	3525	GRESIK	116.19
35	JAWA TIMUR	3526	BANGKALAN	127.67
35	JAWA TIMUR	3527	SAMPANG	141.03
35	JAWA TIMUR	3528	PAMEKASAN	184.83
35	JAWA TIMUR	3529	SUMENEP	169.34
35	JAWA TIMUR	3571	KOTA KEDIRI	114.11
35	JAWA TIMUR	3572	KOTA BLITAR	106.73
35	JAWA TIMUR	3573	KOTA MALANG	98.08
35	JAWA TIMUR	3574	KOTA PROBOLINGGO	117.41
35	JAWA TIMUR	3575	KOTA PASURUAN	129.28
35	JAWA TIMUR	3576	KOTA MOJOKERTO	132.92
35	JAWA TIMUR	3577	KOTA MADIUN	141.70
35	JAWA TIMUR	3578	KOTA SURABAYA	159.87
35	JAWA TIMUR	3579	KOTA BATU	107.70
61	KALIMANTAN BARAT	6101	SAMBAS	172.20
61	KALIMANTAN BARAT	6102	BENGKAYANG	134.33
61	KALIMANTAN BARAT	6103	LANDAK	100.64
61	KALIMANTAN BARAT	6104	PONTIANAK	180.40
61	KALIMANTAN BARAT	6105	SANGGAU	131.60
61	KALIMANTAN BARAT	6106	KETAPANG	124.47
61	KALIMANTAN BARAT	6107	SINTANG	123.26
61	KALIMANTAN BARAT	6108	KAPUAS HULU	129.23
61	KALIMANTAN BARAT	6109	SEKADAU	142.00

**BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA**

ID PROV	PROVINSI	ID KAB	KAB_KOTA	SKOR IRBI 2020
61	KALIMANTAN BARAT	6110	MELAWI	132.40
61	KALIMANTAN BARAT	6111	KAYONG UTARA	168.40
61	KALIMANTAN BARAT	6112	KUBU RAYA	168.40
61	KALIMANTAN BARAT	6171	KOTA PONTIANAK	85.66
61	KALIMANTAN BARAT	6172	SINGKAWANG	145.82
63	KALIMANTAN SELATAN	6301	TANAH LAUT	178.00
63	KALIMANTAN SELATAN	6302	KOTABARU	158.79
63	KALIMANTAN SELATAN	6303	BANJAR	176.40
63	KALIMANTAN SELATAN	6304	BARITO KUALA	155.45
63	KALIMANTAN SELATAN	6305	TAPIN	140.40
63	KALIMANTAN SELATAN	6306	HULU SUNGAI SELATAN	152.40
63	KALIMANTAN SELATAN	6307	HULU SUNGAI TENGAH	140.40
63	KALIMANTAN SELATAN	6308	HULU SUNGAI UTARA	128.40
63	KALIMANTAN SELATAN	6309	TABALONG	152.40
63	KALIMANTAN SELATAN	6310	TANAH BUMBU	155.60
63	KALIMANTAN SELATAN	6311	BALANGAN	139.89
63	KALIMANTAN SELATAN	6371	KOTA BANJARMASIN	96.40
63	KALIMANTAN SELATAN	6372	KOTA BANJARBARU	108.00
62	KALIMANTAN TENGAH	6201	KOTAWARINGIN BARAT	144.40
62	KALIMANTAN TENGAH	6202	KOTAWARINGIN TIMUR	156.40
62	KALIMANTAN TENGAH	6203	KAPUAS	123.33
62	KALIMANTAN TENGAH	6204	BARITO SELATAN	120.40
62	KALIMANTAN TENGAH	6205	BARITO UTARA	120.40
62	KALIMANTAN TENGAH	6206	SUKAMARA	144.40

ID PROV	PROVINSI	ID KAB	KAB_KOTA	SKOR IRBI 2020
62	KALIMANTAN TENGAH	6207	LAMANDAU	93.20
62	KALIMANTAN TENGAH	6208	SERUYAN	144.40
62	KALIMANTAN TENGAH	6209	KATINGAN	163.20
62	KALIMANTAN TENGAH	6210	PULANG PISAU	168.40
62	KALIMANTAN TENGAH	6211	GUNUNG MAS	139.20
62	KALIMANTAN TENGAH	6212	BARITO TIMUR	120.40
62	KALIMANTAN TENGAH	6213	MURUNG RAYA	120.40
62	KALIMANTAN TENGAH	6271	PALANGKA RAYA	99.29
64	KALIMANTAN TIMUR	6401	PASER	196.40
64	KALIMANTAN TIMUR	6402	KUTAI BARAT	156.40
64	KALIMANTAN TIMUR	6403	KUTAI KARTANEGARA	119.16
64	KALIMANTAN TIMUR	6404	KUTAI TIMUR	190.00
64	KALIMANTAN TIMUR	6405	BERAU	202.40
64	KALIMANTAN TIMUR	6406	MALINAU	124.40
64	KALIMANTAN TIMUR	6407	BULUNGAN	184.40
65	KALIMANTAN TIMUR	6504	NUNUKAN	169.32
64	KALIMANTAN TIMUR	6409	PENAJAM PASER UTARA	158.32
64	KALIMANTAN TIMUR	6410	TANA TIDUNG	174.80
64	KALIMANTAN TIMUR	6471	KOTA BALIKPAPAN	108.14
64	KALIMANTAN TIMUR	6472	KOTA SAMARINDA	102.94
65	KALIMANTAN TIMUR	6571	KOTA TARAKAN	115.18
64	KALIMANTAN TIMUR	6474	KOTA BONTANG	150.00
19	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	1901	BANGKA	168.40
19	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	1902	BELITUNG	168.40
19	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	1903	BANGKA BARAT	180.40
19	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	1904	BANGKA TENGAH	144.40
19	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	1905	BANGKA SELATAN	180.40

**BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA**

ID PROV	PROVINSI	ID KAB	KAB_KOTA	SKOR IRBI 2020
19	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	1906	BELITUNG TIMUR	168.40
19	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	1971	KOTA PANGKAL PINANG	120.40
21	KEPULAUAN RIAU	2101	KARIMUN	120.40
21	KEPULAUAN RIAU	2102	BINTAN	132.40
21	KEPULAUAN RIAU	2103	NATUNA	112.40
21	KEPULAUAN RIAU	2104	LINGGA	108.40
21	KEPULAUAN RIAU	2105	KEPULAUAN ANAMBAS	112.40
21	KEPULAUAN RIAU	2171	KOTA BATAM	120.40
21	KEPULAUAN RIAU	2172	KOTA TANJUNG PINANG	108.40
18	LAMPUNG	1801	LAMPUNG BARAT	179.29
18	LAMPUNG	1802	TANGGAMUS	135.86
18	LAMPUNG	1803	LAMPUNG SELATAN	187.20
18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG TIMUR	183.20
18	LAMPUNG	1805	LAMPUNG TENGAH	131.20
18	LAMPUNG	1806	LAMPUNG UTARA	131.20
18	LAMPUNG	1807	WAY KANAN	131.20
18	LAMPUNG	1808	TULANGBAWANG	144.40
18	LAMPUNG	1809	PESAWARAN	181.60
18	LAMPUNG	1810	PRINGSEWU	95.20
18	LAMPUNG	1811	MESUJI	120.40
18	LAMPUNG	1812	TULANG BAWANG BARAT	120.40
18	LAMPUNG	1871	KOTA BANDAR LAMPUNG	165.56
18	LAMPUNG	1872	KOTA METRO	113.60
81	MALUKU	8101	MALUKU TENGGARA BARAT	181.20
81	MALUKU	8102	MALUKU TENGGARA	169.00
81	MALUKU	8103	MALUKU TENGAH	154.81
81	MALUKU	8104	BURU	136.55
81	MALUKU	8105	KEPULAUAN ARU	186.00
81	MALUKU	8106	SERAM BAGIAN BARAT	170.18
81	MALUKU	8107	SERAM BAGIAN TIMUR	114.73
81	MALUKU	8108	MALUKU BARAT DAYA	223.20
81	MALUKU	8109	BURU SELATAN	155.20
81	MALUKU	8171	AMBON	105.02
81	MALUKU	8172	TUAL	168.00
82	MALUKU UTARA	8201	HALMAHERA BARAT	143.18
82	MALUKU UTARA	8202	HALMAHERA TENGAH	75.20
82	MALUKU UTARA	8203	KEPULAUAN SULA	152.37
82	MALUKU UTARA	8204	HALMAHERA SELATAN	213.82

ID PROV	PROVINSI	ID KAB	KAB_KOTA	SKOR IRBI 2020
82	MALUKU UTARA	8205	HALMAHERA UTARA	162.74
82	MALUKU UTARA	8206	HALMAHERA TIMUR	173.20
82	MALUKU UTARA	8207	PULAU MOROTAI	118.44
82	MALUKU UTARA	8271	TERNATE	104.49
82	MALUKU UTARA	8272	TIDORE KEPULAUAN	159.90
52	NUSA TENGGARA BARAT	5201	LOMBOK BARAT	161.83
52	NUSA TENGGARA BARAT	5202	LOMBOK TENGAH	157.08
52	NUSA TENGGARA BARAT	5203	LOMBOK TIMUR	142.75
52	NUSA TENGGARA BARAT	5204	SUMBAWA	150.00
52	NUSA TENGGARA BARAT	5205	DOMPU	111.36
52	NUSA TENGGARA BARAT	5206	BIMA	129.95
52	NUSA TENGGARA BARAT	5207	SUMBAWA BARAT	142.30
52	NUSA TENGGARA BARAT	5208	LOMBOK UTARA	106.91
52	NUSA TENGGARA BARAT	5271	KOTA MATARAM	88.95
52	NUSA TENGGARA BARAT	5272	KOTA BIMA	89.37
53	NUSA TENGGARA TIMUR	5301	SUMBA BARAT	128.40
53	NUSA TENGGARA TIMUR	5302	SUMBA TIMUR	145.20
53	NUSA TENGGARA TIMUR	5303	KUPANG	168.48
53	NUSA TENGGARA TIMUR	5304	TIMOR TENGAH SELATAN	167.20
53	NUSA TENGGARA TIMUR	5305	TIMOR TENGAH UTARA	132.40
53	NUSA TENGGARA TIMUR	5306	BELU	147.30
53	NUSA TENGGARA TIMUR	5307	ALOR	149.79
53	NUSA TENGGARA TIMUR	5308	LEMBATA	149.60

**BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA**

ID PROV	PROVINSI	ID KAB	KAB_KOTA	SKOR IRBI 2020
53	NUSA TIMUR	TENGGARA 5309	FLORES TIMUR	152.80
53	NUSA TIMUR	TENGGARA 5310	SIKKA	137.78
53	NUSA TIMUR	TENGGARA 5311	ENDE	147.84
53	NUSA TIMUR	TENGGARA 5312	NGADA	115.70
53	NUSA TIMUR	TENGGARA 5313	MANGGARAI	138.75
53	NUSA TIMUR	TENGGARA 5314	ROTE NDAO	142.40
53	NUSA TIMUR	TENGGARA 5315	MANGGARAI BARAT	163.57
53	NUSA TIMUR	TENGGARA 5316	SUMBA TENGAH	118.80
53	NUSA TIMUR	TENGGARA 5317	SUMBA BARAT DAYA	138.00
53	NUSA TIMUR	TENGGARA 5318	NAGEKEO	156.00
53	NUSA TIMUR	TENGGARA 5319	MANGGARAI TIMUR	166.80
53	NUSA TIMUR	TENGGARA 5320	SABU RAIJUA	102.40
53	NUSA TIMUR	TENGGARA 5371	KOTA KUPANG	94.20
94	PAPUA	9401	MERAUKE	170.00
94	PAPUA	9402	JAYAWIJAYA	115.20
94	PAPUA	9403	JAYAPURA	203.20
94	PAPUA	9404	NABIRE	162.06
94	PAPUA	9408	KEPULAUAN YAPEN	83.48
94	PAPUA	9409	BIAK NUMFOR	138.40
94	PAPUA	9410	PANIAI	116.80
94	PAPUA	9411	PUNCAK JAYA	117.20
94	PAPUA	9412	MIMIKA	138.80
94	PAPUA	9413	BOVEN DIGOEL	133.20
94	PAPUA	9414	MAPPI	126.40
94	PAPUA	9415	ASMAT	123.20
94	PAPUA	9416	YAHUKIMO	132.80
94	PAPUA	9417	PEGUNUNGAN BINTANG	126.40
94	PAPUA	9418	TOLIKARA	114.00
94	PAPUA	9419	SARMI	166.98

ID PROV	PROVINSI	ID KAB	KAB_KOTA	SKOR IRBI 2020
94	PAPUA	9420	KEEROM	127.20
94	PAPUA	9426	WAROPEN	140.00
94	PAPUA	9427	SUPIORI	92.40
94	PAPUA	9428	MAMBERAMO RAYA	165.60
94	PAPUA	9429	NDUGA	96.40
94	PAPUA	9430	LANNY JAYA	91.20
94	PAPUA	9431	MAMBERAMO TENGAH	44.80
94	PAPUA	9432	YALIMO	95.60
94	PAPUA	9433	PUNCAK	99.60
94	PAPUA	9434	DOGIYAI	123.60
94	PAPUA	9435	INTAN JAYA	67.20
94	PAPUA	9436	DEIYAI	108.40
94	PAPUA	9471	JAYAPURA	143.94
91	PAPUA BARAT	9101	FAKFAK	105.20
91	PAPUA BARAT	9102	KAIMANA	122.00
91	PAPUA BARAT	9103	TELUK WONDAMA	147.20
91	PAPUA BARAT	9104	TELUK BINTUNI	166.80
91	PAPUA BARAT	9105	MANOKWARI	146.96
91	PAPUA BARAT	9106	SORONG SELATAN	178.80
91	PAPUA BARAT	9107	SORONG	183.20
91	PAPUA BARAT	9108	RAJA AMPAT	135.75
91	PAPUA BARAT	9109	TAMBRAUW	118.40
91	PAPUA BARAT	9110	MAYBRAT	88.00
91	PAPUA BARAT	9171	KOTA SORONG	176.25
14	RIAU	1401	KUANTAN SINGINGI	131.20
14	RIAU	1402	INDRAGIRI HULU	132.40
14	RIAU	1403	INDRAGIRI HILIR	168.40
14	RIAU	1404	PELALAWAN	156.40
14	RIAU	1405	SIAK	156.40
14	RIAU	1406	KAMPAR	155.20
14	RIAU	1407	ROKAN HULU	155.20
14	RIAU	1408	BENGKALIS	156.40
14	RIAU	1409	ROKAN HILIR	167.20
14	RIAU	1410	KEPULAUAN MERANTI	147.60
14	RIAU	1471	KOTA PEKANBARU	132.40
14	RIAU	1473	KOTA DUMAI	108.40
76	SULAWESI BARAT	7601	MAJENE	216.08
76	SULAWESI BARAT	7602	POLEWALI MANDAR	140.81

**BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA**

ID PROV	PROVINSI	ID KAB	KAB_KOTA	SKOR IRBI 2020
76	SULAWESI BARAT	7603	MAMASA	154.00
76	SULAWESI BARAT	7604	MAMUJU	145.13
76	SULAWESI BARAT	7605	MAMUJU UTARA	176.80
73	SULAWESI SELATAN	7301	KEPULAUAN SELAYAR	155.20
73	SULAWESI SELATAN	7302	BULUKUMBA	163.20
73	SULAWESI SELATAN	7303	BANTAENG	107.73
73	SULAWESI SELATAN	7304	JENEPONTO	151.20
73	SULAWESI SELATAN	7305	TAKALAR	135.04
73	SULAWESI SELATAN	7306	GOWA	115.42
73	SULAWESI SELATAN	7307	SINJAI	165.60
73	SULAWESI SELATAN	7308	MAROS	157.93
73	SULAWESI SELATAN	7309	PANGKAJENE KEPULAUAN	168.40
73	SULAWESI SELATAN	7310	BARRU	180.40
73	SULAWESI SELATAN	7311	BONE	191.20
73	SULAWESI SELATAN	7312	SOPPENG	131.20
73	SULAWESI SELATAN	7313	WAJO	179.20
73	SULAWESI SELATAN	7314	SIDENRENG RAPPANG	119.20
73	SULAWESI SELATAN	7315	PINRANG	179.20
73	SULAWESI SELATAN	7316	ENREKANG	150.00
73	SULAWESI SELATAN	7317	LUWU	192.23
73	SULAWESI SELATAN	7318	TANA TORAJA	150.00
73	SULAWESI SELATAN	7322	LUWU UTARA	185.25
73	SULAWESI SELATAN	7325	LUWU TIMUR	202.00
73	SULAWESI SELATAN	7326	TORAJA UTARA	150.00
73	SULAWESI SELATAN	7371	KOTA MAKASSAR	131.78
73	SULAWESI SELATAN	7372	KOTA PARE-PARE	155.20
73	SULAWESI SELATAN	7373	KOTA PALOPO	211.20
72	SULAWESI TENGAH	7201	BANGGAI KEPULAUAN	163.20
72	SULAWESI TENGAH	7202	BANGGAI	163.20
72	SULAWESI TENGAH	7203	MOROWALI	173.80
72	SULAWESI TENGAH	7204	POSO	121.14
72	SULAWESI TENGAH	7205	DONGGALA	157.13
72	SULAWESI TENGAH	7206	TOLI - TOLI	159.20
72	SULAWESI TENGAH	7207	BUOL	149.60
72	SULAWESI TENGAH	7208	PARIGI MOUTONG	108.39
72	SULAWESI TENGAH	7209	TOJO UNA - UNA	137.60
72	SULAWESI TENGAH	7210	SIGI	48.13
72	SULAWESI TENGAH	7271	PALU	162.70
74	SULAWESI TENGGARA	7401	BUTON	155.93

ID PROV	PROVINSI	ID KAB	KAB_KOTA	SKOR IRBI 2020
74	SULAWESI TENGGARA	7402	MUNA	174.40
74	SULAWESI TENGGARA	7403	KONAWE	153.19
74	SULAWESI TENGGARA	7404	KOLAKA	129.85
74	SULAWESI TENGGARA	7405	KONAWE SELATAN	176.80
74	SULAWESI TENGGARA	7406	BOMBANA	178.80
74	SULAWESI TENGGARA	7407	WAKATOBI	135.60
74	SULAWESI TENGGARA	7408	KOLAKA UTARA	151.32
74	SULAWESI TENGGARA	7409	BUTON UTARA	169.60
74	SULAWESI TENGGARA	7410	KONAWE UTARA	172.40
74	SULAWESI TENGGARA	7471	KOTA KENDARI	128.44
74	SULAWESI TENGGARA	7472	KOTA BAU-BAU	194.80
71	SULAWESI UTARA	7101	BOLAANG MONGONDOW	149.60
71	SULAWESI UTARA	7102	MINAHASA	205.50
71	SULAWESI UTARA	7103	KEPULAUAN SANGIHE	132.74
71	SULAWESI UTARA	7104	KEPULAUAN TALAUD	102.80
71	SULAWESI UTARA	7105	MINAHASA SELATAN	143.59
71	SULAWESI UTARA	7106	MINAHASA UTARA	119.84
71	SULAWESI UTARA	7107	BOLAANG MONGONDOW UTARA	144.00
71	SULAWESI UTARA	7108	SIAU TAGULANDANG BIARO	179.20
71	SULAWESI UTARA	7109	MINAHASA TENGGARA	195.20
71	SULAWESI UTARA	7110	BOLAANG MONGONDOW SELATAN	149.60
71	SULAWESI UTARA	7111	BOLAANG MONGONDOW TIMUR	157.60
71	SULAWESI UTARA	7171	KOTA MANADO	107.89
71	SULAWESI UTARA	7172	KOTA BITUNG	109.23
71	SULAWESI UTARA	7173	KOTA TOMOHON	119.20
71	SULAWESI UTARA	7174	KOTA KOTAMOBAGU	76.00
13	SUMATERA BARAT	1301	KEPULAUAN MENTAWAI	197.20
13	SUMATERA BARAT	1302	PESISIR SELATAN	189.60
13	SUMATERA BARAT	1303	SOLOK	137.20
13	SUMATERA BARAT	1304	SIJUNJUNG	107.20
13	SUMATERA BARAT	1305	TANAH DATAR	125.20
13	SUMATERA BARAT	1306	PADANG PARIAMAN	167.21
13	SUMATERA BARAT	1307	AGAM	209.20
13	SUMATERA BARAT	1308	LIMA PULUH KOTO	119.20
13	SUMATERA BARAT	1309	PASAMAN	178.00
13	SUMATERA BARAT	1310	SOLOK SELATAN	137.20
13	SUMATERA BARAT	1311	DHARMASRAYA	143.20
13	SUMATERA BARAT	1312	PASAMAN BARAT	203.20

**BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA**

ID PROV	PROVINSI	ID KAB	KAB_KOTA	SKOR IRBI 2020
13	SUMATERA BARAT	1371	KOTA PADANG	169.92
13	SUMATERA BARAT	1372	KOTA SOLOK	125.20
13	SUMATERA BARAT	1373	KOTA SAWAH LUNTO	113.20
13	SUMATERA BARAT	1374	KOTA PADANG PANJANG	113.20
13	SUMATERA BARAT	1375	KOTA BUKITTINGGI	130.00
13	SUMATERA BARAT	1376	KOTA PAYAKUMBUH	104.80
13	SUMATERA BARAT	1377	KOTA PARIAMAN	171.20
16	SUMATERA SELATAN	1601	OGAN KOMERING ULU	155.20
16	SUMATERA SELATAN	1602	OGAN KOMERING ILIR	153.20
16	SUMATERA SELATAN	1603	MUARA ENIM	155.20
16	SUMATERA SELATAN	1604	LAHAT	109.07
16	SUMATERA SELATAN	1605	MUSI RAWAS	155.20
16	SUMATERA SELATAN	1606	MUSI BANYUASIN	132.40
16	SUMATERA SELATAN	1607	BANYUASIN	141.43
16	SUMATERA SELATAN	1608	OGAN KOMERING ULU SELATAN	130.00
16	SUMATERA SELATAN	1609	OGAN KOMERING ULU TIMUR	131.20
16	SUMATERA SELATAN	1610	OGAN ILIR	120.56
16	SUMATERA SELATAN	1611	EMPAT LAWANG	158.00
16	SUMATERA SELATAN	1671	KOTA PALEMBANG	131.60
16	SUMATERA SELATAN	1672	KOTA PRABUMULIH	132.40
16	SUMATERA SELATAN	1673	KOTA PAGAR ALAM	126.40
16	SUMATERA SELATAN	1674	KOTA LUBUKLINGGAU	124.80
12	SUMATERA UTARA	1201	NIAS	214.00
12	SUMATERA UTARA	1202	MANDAILING NATAL	214.80
12	SUMATERA UTARA	1203	TAPANULI SELATAN	186.00
12	SUMATERA UTARA	1204	TAPANULI TENGAH	191.20
12	SUMATERA UTARA	1205	TAPANULI UTARA	118.00
12	SUMATERA UTARA	1206	TOBA SAMOSIR	107.20
12	SUMATERA UTARA	1207	LABUHAN BATU	151.20
12	SUMATERA UTARA	1208	ASAHAN	167.20
12	SUMATERA UTARA	1209	SIMALUNGUN	73.59
12	SUMATERA UTARA	1210	DAIRI	127.60
12	SUMATERA UTARA	1211	KARO	120.99
12	SUMATERA UTARA	1212	DELI SERDANG	121.73
12	SUMATERA UTARA	1213	LANGKAT	138.62
12	SUMATERA UTARA	1214	NIAS SELATAN	202.00
12	SUMATERA UTARA	1215	HUMBANG HASUNDUTAN	130.00
12	SUMATERA UTARA	1216	PAKPAK BHARAT	112.00
12	SUMATERA UTARA	1217	SAMOSIR	114.00

ID PROV	PROVINSI	ID KAB	KAB_KOTA	SKOR IRBI 2020
12	SUMATERA UTARA	1218	SERDANG BEDAGAI	140.00
12	SUMATERA UTARA	1219	BATUBARA	143.20
12	SUMATERA UTARA	1220	PADANG LAWAS UTARA	138.00
12	SUMATERA UTARA	1221	PADANG LAWAS	154.00
12	SUMATERA UTARA	1222	LABUHAN BATU SELATAN	131.20
12	SUMATERA UTARA	1223	LABUHAN BATU UTARA	155.20
12	SUMATERA UTARA	1224	NIAS UTARA	214.00
12	SUMATERA UTARA	1225	NIAS BARAT	210.80
12	SUMATERA UTARA	1271	KOTA SIBOLGA	167.20
12	SUMATERA UTARA	1272	KOTA TANJUNG BALAI	114.00
12	SUMATERA UTARA	1273	KOTA PEMATANG SIANTAR	91.20
12	SUMATERA UTARA	1274	KOTA TEBING TINGGI	101.60
12	SUMATERA UTARA	1275	KOTA MEDAN	93.77
12	SUMATERA UTARA	1276	KOTA BINJAI	103.20
12	SUMATERA UTARA	1277	KOTA PADANG SIDEMPUAN	128.00
12	SUMATERA UTARA	1278	KOTA GUNUNG SITOLI	215.60
<b>Rata-rata</b>				141.65

**Lampiran 3. 120 kab/kota yang memberikan hasil penilaian IKD kepada BNPB**

No.	KABUPATEN
1	PADANG
	PARIAMAN
2	BANYUASIN
3	CIANJUR
4	GARUT
5	CIAMIS
6	KUNINGAN
7	MAJALENGKA
8	SUMEDANG
9	INDRAMAYU
10	PURWAKARTA
11	PANDEGLANG
12	LEBAK
13	TANGERANG
14	SERANG
15	KOTA TANGERANG
16	KOTA CILEGON
17	KOTA SERANG
18	KOTA TANGERANG SELATAN
19	JEMBRANA
20	TABANAN
21	BADUNG
22	GIANYAR
23	KLUNGKUNG
24	BANGLI
25	KARANGASEM
26	BULELENG
27	KOTA DENPASAR
28	KOTA CIMAH
29	BALANGAN
30	BELITUNG
31	KUTAI KARTANEGARA
32	BOYOLALI

No.	KABUPATEN
33	MAGELANG
34	KARANGANYAR
35	KEBUMEN
36	KLATEN
37	PATI
38	PEMALANG
39	REMBANG
40	KOTA SURAKARTA
41	TEMANGGUNG
42	WONOGIRI
43	BANJARNEGARA
44	BANYUMAS
45	BLORA
46	BREBES
47	CILACAP
48	DEMAK
49	GROBOGAN
50	JEPARA
51	PEKALONGAN
52	SEMARANG
53	TEGAL
54	KENDAL
55	KOTA PEKALONGAN
56	KUDUS
57	SUBANG
58	ACEH TAMIANG
59	ACEH TENGGARA
60	ACEH TIMUR
61	GAYO LUES
62	ACEH BARAT DAYA
63	ACEH BARAT
64	ACEH BESAR
65	ACEH JAYA
66	NAGAN RAYA
67	PIDIE

No.	KABUPATEN
68	KOTA BANDA ACEH
69	LANGSA
70	SABANG
71	SUBULUSSALAM
72	KARAWANG
73	KOTA SEMARANG
74	PACITAN
75	PONOROGO
76	TRENGGALEK
77	TULUNGAGUNG
78	BLITAR
79	KEDIRI
80	MALANG
81	LUMAJANG
82	JEMBER
83	BANYUWANGI
84	BONDOWOSO
85	SITUBONDO
86	PROBOLINGGO
87	PASURUAN
88	SIDOARJO
89	MOJOKERTO
90	JOMBANG
91	NGANJUK
92	MADIUN
93	MAGETAN
94	NGAWI
95	BOJONEGORO
96	TUBAN
97	LAMONGAN
98	GRESIK
99	BANGKALAN
100	SAMPANG
101	PAMEKASAN
102	SUMENEP
103	KOTA KEDIRI

No.	KABUPATEN
104	KOTA BLITAR
105	KOTA MALANG
106	KOTA PROBOLINGGO
107	KOTA PASURUAN
108	KOTA MOJOKERTO
109	KOTA MADIUN
110	KOTA SURABAYA

No.	KABUPATEN
111	KOTA BATU
112	KEPULAUAN SERIBU
113	KOTA JAKARTA SELATAN
114	KOTA JAKARTA TIMUR
115	KOTA JAKARTA PUSAT

No.	KABUPATEN
116	KOTA JAKARTA BARAT
117	KOTA JAKARTA UTARA
118	PENAJAM PASER UTARA
119	OGAN ILIR
120	PURWOREJO

#### **Lampiran 4. Proses Perhitungan IRBI 2020**

Perhitungan IRBI diawali dengan penyusunan kajian risiko yang terdiri dari tiga komponen, yaitu bahaya, kerentanan, dan kapasitas. Hasil dari tiap kajian berupa indeks 0 – 1 yang dibagi menjadi tiga kelas, yaitu rendah, sedang, tinggi. Kemudian, kelas yang ada pada komponen bahaya dan kerentanan (jiwa terpapar, kerugian rupiah, kerusakan lingkungan) direpresentasikan dengan angka, yaitu rendah dengan satu, sedang dengan dua, dan tinggi dengan tiga. Representasi kelas dapat dilihat pada tabel 1. Kemudian, komponen kapasitas menggunakan hasil dari perhitungan IKD (tabel 2). Sebagai ilustrasi, berikut adalah perhitungan IRBI tahun 2020 untuk kabupaten/kota di Provinsi DKI Jakarta. IRBI disusun berdasarkan 9 jenis ancaman, yaitu abrasi, cuaca ekstrim atau angin puting beliung, banjir, gempa bumi, gunung api, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, tanah longsor dan tsunami. Setiap jenis ancaman memiliki skor untuk komponen bahaya, kerentanan (jiwa terpapar, kerugian rupiah dan kerusakan lingkungan) berdasarkan hasil kajian risiko bencana. Untuk komponen kapasitas, nilai diambil berdasarkan hasil pengukuran IKD. Nilai IKD merupakan representasi dari kapasitas *generic* pemerintah daerah yang berlaku bagi semua jenis ancaman. Oleh karena itu, nilai kapasitas untuk semua jenis ancaman bernilai sama. Nilai IRBI per jenis ancaman diperoleh dari perkalian skor bahaya dengan skor kelas kerentanan dibagi nilai kapasitas. Nilai IRBI per ancaman ini selanjutnya dijumlahkan dengan IRBI jenis ancaman lain sehingga menjadi indeks risiko multi ancaman, yang merupakan nilai IRBI per kabupaten/kota.

#### **Perhitungan Penurunan IRBI**

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, risiko bencana tersusun dari tiga komponen, yaitu bahaya, kerentanan, dan kapasitas. Kontribusi masing-masing komponen terhadap perhitungan risiko ini berbeda-beda. Komponen bahaya berkontribusi sebesar 40 % bagi nilai risiko, sedangkan komponen kerentanan dan kapasitas berkontribusi sebesar masing-masing 30%. Dalam perhitungan capaian IRBI, strategi yang ditempuh adalah peningkatan kapasitas

sedangkan komponen lainnya dianggap konstan. Karena perhitungan penurunan IRBI hanya berdasarkan perubahan nilai kapasitas dan komponen ini berkontribusi sebesar 30%, maka penurunan IRBI yang terjadi adalah 30% dari penurunan skor IRBI aktual. Sebagai contoh, IRBI Kota Jakarta Selatan pada tahun 2019 adalah sebesar 52,5, sedangkan berdasarkan perhitungan IRBI 2020 nilai aktual IRBI kota ini adalah sebesar 51,4. Jika menggunakan perhitungan ini, terjadi penurunan sebesar 1,1 poin. Namun dengan memperhatikan kontribusi kapasitas untuk perhitungan risiko, maka nilai IRBI Kota Jakarta Selatan pada tahun 2020 adalah sebesar 52,2, dengan penurunan sebesar 0,3 (30% dari 1,1).

**Tabel indeks bahaya, kerentanan, kapasitas, dan risiko Prov. DKI Jakarta**

PROVINSI	KAB_KOTA	BAHAYA								
		ABRASI	ANGIN	BANJIR	GEMPABUMI	GUNUNGAPI	KARLAHUT	KEKERINGAN	LONGSOR	TSUNAMI
DKI JAKARTA	KEPULAUAN SERIBU	3	2		2				1	
DKI JAKARTA	KOTA JAKARTA SELATAN			2	1		3	2	1	
DKI JAKARTA	KOTA JAKARTA TIMUR		3	3	1		3	2	1	1
DKI JAKARTA	KOTA JAKARTA PUSAT	3	2	3	1			1	1	1
DKI JAKARTA	KOTA JAKARTA BARAT	3	2	3	1			2	1	1
DKI JAKARTA	KOTA JAKARTA UTARA	3	3	3	1			1	1	1

PROVINSI	KAB_KOTA	JIWA TERPAPAR								
		ABRASI	ANGIN	BANJIR	GEMPABUMI	GUNUNGAPI	KARLAHUT	KEKERINGAN	LONGSOR	TSUNAMI
DKI JAKARTA	KEPULAUAN SERIBU	3	1	1	3	1	1	1	3	1
DKI JAKARTA	KOTA JAKARTA SELATAN	1	1	3	3	1	3	3	3	1
DKI JAKARTA	KOTA JAKARTA TIMUR	1	3	3	3	1	3	3	3	3
DKI JAKARTA	KOTA JAKARTA PUSAT	2	1	3	3	1	1	3	3	2
DKI JAKARTA	KOTA JAKARTA BARAT	3	3	3	3	1	1	3	3	3
DKI JAKARTA	KOTA JAKARTA UTARA	3	3	3	3	1	1	3	3	3

**BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA**

PROVINSI	KAB_KOTA	KERUGIAN (RUPIAH)								
		ABRASI	ANGIN	BANJIR	GEMPABUMI	GUNUNGAPI	KARLAHUT	KEKERINGAN	LONGSOR	TSUNAMI
DKI JAKARTA	KEPULAUAN SERIBU	1	1		3				3	
DKI JAKARTA	KOTA JAKARTA SELATAN			3	3		1	3	3	
DKI JAKARTA	KOTA JAKARTA TIMUR		1	3	3		1	3	3	1
DKI JAKARTA	KOTA JAKARTA PUSAT	1	1	3	3			3	3	1
DKI JAKARTA	KOTA JAKARTA BARAT	1	1	3	3			3	3	1
DKI JAKARTA	KOTA JAKARTA UTARA	1	1	3	3			3	3	1

PROVINSI	KAB_KOTA	KERUSAKAN LINGKUNGAN (HA)								
		ABRASI	ANGIN	BANJIR	GEMPABUMI	GUNUNGAPI	KARLAHUT	KEKERINGAN	LONGSOR	TSUNAMI
DKI JAKARTA	KEPULAUAN SERIBU	3							3	
DKI JAKARTA	KOTA JAKARTA SELATAN			1			1	1	1	
DKI JAKARTA	KOTA JAKARTA TIMUR			1			1	1	1	1

DKI JAKARTA	KOTA JAKARTA PUSAT	1		1				1	1	1
DKI JAKARTA	KOTA JAKARTA BARAT	1		1				1	1	1
DKI JAKARTA	KOTA JAKARTA UTARA	3		3				1	3	3

		KAPASITAS								
PROVINSI	KAB_KOTA	ABRASI	ANGIN	BANJIR	GEMPABUMI	GUNUNGAPI	KARLAHUT	KEKERINGAN	LONGSOR	TSUNAMI
DKI JAKARTA	KEPULAUAN SERIBU	1.72035	1.720345	1.720345	1.720345	1.720345	1.720345	1.720345	1.720345	1.720345
DKI JAKARTA	KOTA JAKARTA SELATAN	1.72035	1.7203	1.7203	1.7203	1.7203	1.7203	1.7203	1.7203	1.7203
DKI JAKARTA	KOTA JAKARTA TIMUR	1.72035	1.7203	1.7203	1.7203	1.7203	1.7203	1.7203	1.7203	1.7203
DKI JAKARTA	KOTA JAKARTA PUSAT	1.72035	1.7203	1.7203	1.7203	1.7203	1.7203	1.7203	1.7203	1.7203
DKI JAKARTA	KOTA JAKARTA BARAT	1.72035	1.7203	1.7203	1.7203	1.7203	1.7203	1.7203	1.7203	1.7203
DKI JAKARTA	KOTA JAKARTA UTARA	1.72035	1.7203	1.7203	1.7203	1.7203	1.7203	1.7203	1.7203	1.7203

**BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA**

PROVINSI	KAB_KOTA	INDEKS RISIKO										KELAS
		ABRASI	ANGIN	BANJIR	GEMPABUMI	GUNUNG API	KARLAHUT	KEKERINGAN	LONGSOR	TSUNAMI	TOTAL	
DKI JAKARTA	KEPULAUAN SERIBU	14	4		13				7		38	SEDANG
DKI JAKARTA	KOTA JAKARTA SELATAN			13	6		13	13	7		51	SEDANG
DKI JAKARTA	KOTA JAKARTA TIMUR		12	20	6		13	13	7	4	74	SEDANG
DKI JAKARTA	KOTA JAKARTA PUSAT	10	4	20	6			7	7	3	56	SEDANG
DKI JAKARTA	KOTA JAKARTA BARAT	13	8	20	6			13	7	4	70	SEDANG
DKI JAKARTA	KOTA JAKARTA UTARA	14	12	21	6			7	7	5	71	SEDANG

### Hasil perhitungan IKD Prov. DKI Jakarta tahun 2020

KABUPATEN	PRIORITAS 1	PRIORITAS 2	PRIORITAS 3	PRIORITAS 4	PRIORITAS 5	PRIORITAS 6	PRIORITAS 7	INDEKS KAPASITAS DAERAH	KELAS KAPASITAS	NILAI	NILAI_ORI
KEPULAUAN SERIBU	0.62	0.97	0.56	0.97	0.43	0.46	0.46	0.55	SEDANG	2	1.7203
KOTA JAKARTA SELATAN	0.62	0.97	0.56	0.97	0.43	0.46	0.46	0.55	SEDANG	2	1.7203
KOTA JAKARTA TIMUR	0.62	0.97	0.56	0.97	0.43	0.46	0.46	0.55	SEDANG	2	1.7203
KOTA JAKARTA PUSAT	0.62	0.97	0.56	0.97	0.43	0.46	0.46	0.55	SEDANG	2	1.7203
KOTA JAKARTA BARAT	0.62	0.97	0.56	0.97	0.43	0.46	0.46	0.55	SEDANG	2	1.7203
KOTA JAKARTA UTARA	0.62	0.97	0.56	0.97	0.43	0.46	0.46	0.55	SEDANG	2	1.7203

### Total nilai IRBI Prov. DKI Jakarta tahun 2020

PROVINSI	KAB_KOTA	2020	2020 (30%)
DKI JAKARTA	KEPULAUAN SERIBU	37.7	56.7
DKI JAKARTA	KOTA JAKARTA SELATAN	51.4	52.2
DKI JAKARTA	KOTA JAKARTA TIMUR	73.9	75.1
DKI JAKARTA	KOTA JAKARTA PUSAT	56.0	56.9
DKI JAKARTA	KOTA JAKARTA BARAT	70.0	71.1
DKI JAKARTA	KOTA JAKARTA UTARA	71.1	72.2

**Lampiran 5. Lokasi pelaksanaan Ekspedisi Desa Tangguh Bencana Tsunami 2020**

<b>No</b>	<b>Provinsi</b>	<b>Kabupaten</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Desa</b>	
1	Aceh	Aceh Singkil	Singkil	Pulo Sarok	
2			Singkil Utara	Kampung Baru	
3			Pulau Banyak	Pulau Balai	
4			Pulau Banyak	Pulau Baguk	
5			Singkil Utara	Gosong Telaga Utara	
6			Singkil	Kilangan	
7			Singkil Utara	Gosong Telaga Selatan	
8			Kuala Baru	Kuala Baru Laut	
9			Singkil Utara	Gosong Telaga Timur	
10			Kuala Baru	Kuala Baru Sungai	
11			Aceh Selatan	Tapak Tuan	Lhok Bengkuang
12				Tapak Tuan	Pasar
13				Pasie Raja	Ladang Tuha

No	Provinsi	Kabupaten	Kecamatan	Desa
14			Meukek	Labuhan Tarok
15			Sawang	Ujung Pandang
16			Kluet Selatan	Suaq Bakong
17			Labuhan Haji Timur	Keumumu Hilir
18			Bakongan Timur	Ujung Pulo Rayeuk
19			Labuhan Haji Timur	Pasar Lama
20			Bakongan Timur	Pasi Seubadeh
21		Aceh Barat	Johan Pahlawan	Ujong Kalak
22			Johan Pahlawan	Kuta Padang
23			Johan Pahlawan	Rundeng
24			Johan Pahlawan	Ujong Baroh
25			Johan Pahlawan	suak Ribee
26			Johan Pahlawan	Kampung Belakang
27			Johan Pahlawan	Pasar Aceh

**BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA**

<b>No</b>	<b>Provinsi</b>	<b>Kabupaten</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Desa</b>
<b>28</b>			Meureubo	Paya Peunaga
<b>29</b>			Meureubo	Meureubo
<b>30</b>			Meureubo	Langung
<b>31</b>	Aceh	Aceh Besar	Mesjid Raya	Meunasah Keude
<b>32</b>			Baitussalam	Baet
<b>33</b>			Baitussalam	Klieng Cot Aron
<b>34</b>			Baitussalam	Lambada Lhok
<b>35</b>			Baitussalam	Cadek
<b>36</b>			Baitussalam	Cot Paya
<b>37</b>			Mesjid Raya	Neuheun
<b>38</b>			Mesjid Raya	Ladong
<b>39</b>			Sampoiniet	Meunasah Kulam
<b>40</b>			Mesjid Raya	Meunasah Mon
<b>41</b>		Aceh Barat Daya	Susoh	Padang Baru
<b>42</b>			Susoh	Geulima Jaya

No	Provinsi	Kabupaten	Kecamatan	Desa
43			Susoh	Palak Kerambil
44			Susoh	Ladang
45			Susoh	Padang Panjang
46			Manggeng	Lhok Pawoh
47			Setia	Kuta Murni
48			Tangan-Tangan	Padang Kawa
49			Tangan-Tangan	Blang Padang
50			Tangan-Tangan	Padang Bakjok
51		Aceh Jaya	Krueng Sabe	Keutapang
52			Krueng Sabe	Gampong Blang
53			Krueng Sabe	Sentosa
54			Krueng Sabe	Bahagia
55			Krueng Sabe	Mon Mata
56			Setia Bakti	Lhok Timon
57			Indra Jaya	Ujong Muloh

**BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA**

<b>No</b>	<b>Provinsi</b>	<b>Kabupaten</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Desa</b>
<b>58</b>			Teunom	Paya Baro
<b>59</b>			Indra Jaya	Kuala
<b>60</b>			Sampoiniet	Crak Mong
<b>61</b>		Kota Banda Aceh	Kuta Alam	Lambaro Skep
<b>62</b>			Kuta Alam	Lampulo
<b>63</b>			Syiah Kuala	Jeulingke
<b>64</b>			Syiah Kuala	Rukoh
<b>65</b>			Kuta Raja	Jawa
<b>66</b>			Syiah Kuala	Lamgugob
<b>67</b>			Meuraxa	Lampaseh Aceh
<b>68</b>			Meuraxa	Alue Deah Tengah
<b>69</b>			Kuta Alam	Lamdingin
<b>70</b>			Meuraxa	Glumpang
<b>71</b>		Sumatera	Mandailing Natal	Natal
<b>72</b>	Utara		Muara Batang Gadis	Tabuyung

No	Provinsi	Kabupaten	Kecamatan	Desa
73			Batahan	Sari Kenanga
74			Natal	Panggautan
75			Muara Batang Gadis	Batu Mundom
76			Muara Batang Gadis	Sikapas
77			Natal	Pasar I Natal
78			Muara Batang Gadis	Pasar Singkuang II
79			Muara Batang Gadis	Pasar Singkuang I
80			Batahan	Kuala Batahan
81		Tapanuli Tengah	Sarudik	Pasir bidang
82			Pandan	Hajoran
83			Pandan	Lubuk Tukko
84			Pandan	Kalangan
85			Pandan	Pandan
86			Sorkam Barat	Pasar Sorkam

**BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA**

<b>No</b>	<b>Provinsi</b>	<b>Kabupaten</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Desa</b>
<b>87</b>			Barus	Pasar Tarandam
<b>88</b>			Tapian Nauli	Tapian Nauli I
<b>89</b>			Sarudik	Sarudik
<b>90</b>			Tapian Nauli	Tapian Nauli II
<b>91</b>	Sumatera Barat	Padang Pariaman	Sungai Limau	Guguak Kuranji Hilir
<b>92</b>			Sungai Limau	Koto Tinggi Kuranji Hilir
<b>93</b>			Batang Gasan	Gasan Padang
<b>94</b>			Batang Gasan	Malai V Suku
<b>95</b>			Ulakan Tapakis	Ulakan
<b>96</b>			Sungai Limau	Pilubang
<b>97</b>			Nan Sabaris	Kurai Taji
<b>98</b>			Nan Sabaris	Sunua Barat
<b>99</b>			Ulakan Tapakis	Manggopoh Palak Gadang
<b>100</b>			Ulakan Tapakis	Tapakis

No	Provinsi	Kabupaten	Kecamatan	Desa
101		Kota Padang	Koto Tengah	Pasir Nan Tigo
102			Kota Tengah	Padang Sarai
103			Padang Utara	Air Tawar Barat
104			Koto Tengah	Parupuk Tabing
105			Padang Utara	Ulak Karang Selatan
106			Bungus Teluk Kabung	Bungus Barat
107			Padang Utara	Ulak Karang Utara
108			Bungus Teluk Kabung	Bungus Selatan
109			Padang Utara	Lolong Belanti
110			Lubuk Begalung	Gates Nan XX
111		Kota Pariaman	Pariaman Tengah	Pauh Barat
112			Pariaman Utara	Naras I
113			Pariaman Utara	Balai Naras

**BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA**

<b>No</b>	<b>Provinsi</b>	<b>Kabupaten</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Desa</b>
<b>114</b>			Pariaman Utara	Ampalu
<b>115</b>			Pariaman Tengah	Pasir
<b>116</b>			Pariaman Tengah	Kampung Perak
<b>117</b>			Pariaman Utara	Manggung
<b>118</b>			Pariaman Tengah	Kampung Pondok
<b>119</b>			Pariaman Tengah	Karan Aur
<b>120</b>			Pariaman Utara	Naras Hilir

## Lampiran 6. Angka Kematian

No	Provinsi	Kota/ Kabupaten	Kejadian Bencana	Tahun	Bulan	Tanggal	MD	Hilang	Terdampak	Durasi Tanggap Darurat	Angka Kematian/ 100000/ Wilayah
1	ACEH	ACEH BARAT	BANJIR	2020	7	27	1	0	11700	7	1.221001221
2	ACEH	ACEH BESAR	BANJIR	2020	5	8	1	0	1360	14	5.25210084
3	ACEH	ACEH SELATAN	BANJIR DAN TANAH LONGSOR	2020	4	23	0	0	104	7	0
4	ACEH	ACEH SELATAN	BANJIR DAN TANAH LONGSOR	2020	11	23	0	0	383	14	0
5	ACEH	ACEH JAYA	BANJIR	2020	7	28	0	0	6749	7	0
6	ACEH	ACEH TIMUR	ANGIN PUTING BELIUNG	2020	7	2	0	0	120	14	0
7	ACEH	ACEH UTARA	ANGIN PUTING BELIUNG	2020	6	9	0	0	156	7	0
8	ACEH	LANGSA	BANJIR	2020	11	5	0	0	2900	7	0
9	ACEH	ACEH SINGKIL	BANJIR	2020	11	4	0	0	3195	7	0
10	ACEH	ACEH TENGGARA	ANGIN PUTING BELIUNG	2020	9	27	0	0	165	7	0
11	ACEH	BENER MERIAH	ANGIN KENCANG	2020	8	2	0	0	120	7	0
12	ACEH	ACEH SELATAN	BANJIR	2020	1	28	0	0	5515	7	0
13	ACEH	ACEH SELATAN	BANJIR	2020	11	23	0	0	383	7	0
14	ACEH	ACEH SELATAN	BANJIR	2020	5	3	0	0	139	7	0
15	ACEH	ACEH UTARA	BANJIR	2020	12	3	5	0	94413	28	0.189138602
16	ACEH	ACEH SELATAN	ANGIN KENCANG, GELOMBANG PASANG, ABRASI	2020	5	15	0	0	0	7	0
17	ACEH	ACEH TIMUR	BANJIR	2020	12	4	1	0	86724	14	0.082363096
18	SUMATERA UTARA	TAPANULI TENGAH	BANJIR	2020	1	28	9	0	10981	7	11.70853552
19	SUMATERA UTARA	KOTA MEDAN	BANJIR	2020	12	3	5	2	31197	14	1.60271821
20	SUMATERA UTARA	LANGKAT	BANJIR, LONGSOR	2020	12	3	0	0	0	28	0
21	SUMATERA UTARA	KOTA BINJAI	BANJIR	2020	12	4	0	0	10982	14	0
22	SUMATERA UTARA	DELI SERDANG	BANJIR	2020	12	4	5	0	807	14	44.25562046
23	SUMATERA UTARA	KOTA TEBING TINGGI	BANJIR	2020	12	4	0	0	14663	14	0
24	SUMATERA UTARA	BATUBARA	BANJIR	2020	12	4	0	0	996	14	0
25	SUMATERA UTARA	SERDANG BEDAGAI	BANJIR	2020	12	4	0	0	0	14	0
26	SUMATERA UTARA	ASAHAN	BANJIR	2020	12	4	0	0	0	14	0
27	SUMATERA UTARA	LABUHAN BATU UTARA	BANJIR	2020	12	4	0	0	0	14	0
28	SUMATERA UTARA	LANGKAT	BANJIR	2020	12	6	0	0	11916	14	0

## BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

No	Provinsi	Kota/ Kabupaten	Kejadian Bencana	Tahun	Bulan	Tanggal	MD	Hilang	Terdampak	Durasi Tanggap Darurat	Angka Kematian/ 100000/ Wilayah
29	SUMATERA UTARA	SERDANG BEDAGAI	BANJIR	2020	11	23	0	0	25297	28	0
30	SUMATERA UTARA	KOTA BINJAI	BANJIR	2020	9	30	0	0	4235	14	0
31	SUMATERA UTARA	KOTA TEBING TINGGI	BANJIR	2020	11	27	0	0	26680	14	0
32	SUMATERA UTARA	KOTA BINJAI	BANJIR	2020	11	30	0	0	4235	14	0
33	SUMATERA UTARA	KARO	ERUPSI GUNUNGAPI	2020			0	0	0	366	0
34	SUMATERA BARAT	Kabupaten Tanah Datar	Banjir dan Tanah Longsor	2020	1	18	0	0	50	7	0
35	SUMATERA BARAT	Kabupaten Dharmasraya	Banjir dan Tanah Longsor	2020	1	21	0	0	2308	12	0
36	SUMATERA BARAT	Kabupaten Solok	Longsor	2020	2	9	0	0	2232	7	0
37	SUMATERA BARAT	Kabupaten Pasaman	Banjir Bandang	2020	2	18	2	1	9746	14	2.19870423
38	SUMATERA BARAT	Kab Pasaman Barat	Banjir	2020	3	9	0	0	860	14	0
39	SUMATERA BARAT	Kab Pasaman Barat	Banjir	2020	3	17	0	0	860	7	0
40	SUMATERA BARAT	Kab Tanah Datar	Banjir dan Tanah Longsor	2020	4	4	2	0	400	15	33.33333333
41	SUMATERA BARAT	Kab Pasaman	Banjir Bandang dan Longsor	2020	4	7	0	0	680	61	0
42	SUMATERA BARAT	Kab Kep Mentawai	Banjir	2020	5	2	0	0	7184	10	0
43	SUMATERA BARAT	Kab Pasaman Barat	Banjir	2020	9	14	0	0	160	7	0
44	SUMATERA BARAT	Kab Pesisir Selatan	Banjir dan Tanah Longsor	2020	9	24	0	0	5548	14	0
45	SUMATERA BARAT	Kab Solok Selatan	Banjir dan Tanah Longsor	2020	11	2	0	0	133	14	0
46	Sumatera Barat	Kabupaten Agam	Tanah Longsor	2020	1	9	0	0	26182	30	0
47	Sumatera Barat	Kabupaten Agam	Tanah Longsor	2020	1	13	0	0	13332	30	0
48	Sumatera Barat	Kabupaten Agam	Tanah Longsor	2020	1	22	0	0	33654	30	0
49	Sumatera Barat	Kabupaten Agam	Tanah Longsor	2020	1	23	0	0	33654	30	0
50	Sumatera Barat	Kabupaten Agam	Banjir Bandang	2020	1	26	0	0	19882	90	0
51	Sumatera Barat	Kabupaten Agam	Tanah Longsor	2020	2	2	0	0	16175	30	0
52	Sumatera Barat	Kabupaten Agam	Tanah Longsor	2020	2	19	0	0	33654	30	0
53	Sumatera Barat	Kabupaten Agam	Tanah Longsor	2020	2	14	0	0	23179	30	0
54	Sumatera Barat	Kabupaten Agam	Banjir	2020	3	17	0	0	75198	30	0
55	Sumatera Barat	Kabupaten Agam	Banjir	2020	4	15	0	0	31117	75	0
56	Sumatera Barat	Kabupaten Agam	Banjir	2020	6	4	0	0	350309	30	0
57	Sumatera Barat	Kabupaten Agam	Tanah Longsor	2020	5	25	0	0	13332	45	0

LAPORAN KINERJA TAHUN 2020

No	Provinsi	Kota/ Kabupaten	Kejadian Bencana	Tahun	Bulan	Tanggal	MD	Hilang	Terdampak	Durasi Tanggap Darurat	Angka Kematian/ 100000/ Wilayah
58	Sumatera Barat	Kabupaten Agam	Banjir	2020	7	14	0	0	75198	30	0
59	Sumatera Barat	Kabupaten Agam	Banjir dan Tanah Longsor	2020	7	23	0	0	75198	30	0
60	Sumatera Barat	Kabupaten Agam	Banjir	2020	7	2	0	0	33654	50	0
61	Sumatera Barat	Kabupaten Agam	Banjir	2020	8	13	0	0	31117	30	0
62	Sumatera Barat	Kabupaten Agam	Tanah Longsor	2020	8	13	0	0	33654	30	0
63	Sumatera Barat	Kabupaten Agam	Tanah Longsor, Banjir dan Banjir Bandang	2020	8	30	0	0	75198	50	0
64	Sumatera Barat	Kabupaten Agam	Tanah Longsor	2020	9	7	0	0	13332	30	0
65	Sumatera Barat	Kabupaten Agam	Tanah Longsor	2020	10	19	0	0	26182	30	0
66	Sumatera Barat	Kabupaten Agam	Banjir	2020	10	15	0	0	36913	90	0
67	Sumatera Barat	Kabupaten Agam	Banjir, Banjir Bandang, Tanah Longsor	2020	11	1	0	0	64123	15	0
68	Sumatera Barat	Kabupaten Agam	Tanah Longsor	2020	11	17	0	0	75198	30	0
69	Sumatera Barat	Kabupaten Agam	Banjir	2020	11	25	0	0	75198	30	0
70	Sumatera Barat	Kabupaten Agam	Banjir Bandang	2020	3	13	0	0	26182	30	0
71	Sumatera Barat	Kabupaten Agam	Banjir Bandang	2020	7	21	0	0	35309	20	0
72	BENGKULU	KAUR	TANAH RETAK	2020	3	10	0	0		14	0
73	BANTEN	KOTA TANGERANG	BANJIR	2020	1	1	6	0	53931	14	0.7946662
74	BANTEN	KOTA TANGERANG SELATAN	BANJIR	2020	1	1	4	0	65001	14	0.439553677
75	BANTEN	KAB LEBAK	BANJIR	2020	1	1	9	2	11656	14	6.740856947
76	BANTEN	KAB SERANG	BANJIR	2020	1	7	0	0	5010	14	0
77	BANTEN	KAB LEBAK	BANJIR DAN TANAH LONGSOR	2020	12	6	4	2	16568	14	2.586742085
78	JAWA BARAT	CIANJUR	TANAH LONGSOR	2020	1	6	0	0	0	21	0
79	JAWA BARAT	CIANJUR	TANAH LONGSOR	2020	1	7	0	0	0	21	0
80	JAWA BARAT	CIANJUR	TANAH LONGSOR	2020	3	16	0	0	0	21	0
81	JAWA BARAT	CIANJUR	TANAH LONGSOR	2020	4	23	0	0	0	21	0
82	JAWA BARAT	CIANJUR	BANJIR DAN TANAH LONGSOR	2020	3	24	0	0	164	14	0
83	JAWA BARAT	CIANJUR	BANJIR DAN TANAH LONGSOR	2020	4	21	0	0	0	45	0
84	JAWA BARAT	CIANJUR	TANAH LONGSOR	2020	5	5	0	0	0	21	0
85	JAWA BARAT	CIANJUR	TANAH LONGSOR	2020	6	4	0	0	87	7	0
86	JAWA BARAT	CIANJUR	BANJIR DAN TANAH LONGSOR	2020	6	11	0	0	0	21	0
87	JAWA BARAT	CIANJUR	BANJIR	2020	6	11	0	0	0	45	0
88	JAWA BARAT	CIANJUR	BANJIR	2020	6	29	0	0	0	30	0
89	JAWA BARAT	CIANJUR	BANJIR DAN TANAH LONGSOR	2020	9	17	0	0	0	30	0
90	JAWA BARAT	CIANJUR	BANJIR DAN TANAH LONGSOR	2020	10	6	0	0	0	30	0
91	JAWA BARAT	KOTA BEKASI	BANJIR	2020	1	1	12	0	366274	14	0.234016845

## BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

No	Provinsi	Kota/ Kabupaten	Kejadian Bencana	Tahun	Bulan	Tanggal	MD	Hilang	Terdampak	Durasi Tanggap Darurat	Angka Kematian/ 100000/ Wilayah
92	JAWA BARAT	BEKASI	BANJIR	2020	1	1	1	0	3123	7	4.574356159
93	JAWA BARAT	BOGOR	BANJIR DAN TANAH LONGSOR	2020	1	1	13	0	35738	30	1.212528215
94	JAWA BARAT	KOTA DEPOK	BANJIR	2020	1	1	3	0	2976	14	7.200460829
95	JAWA BARAT	BANDUNG	BANJIR	2020	4	1	1	0	101644	7	0.140546557
96	JAWA BARAT	CIAMIS	BANJIR DAN TANAH LONGSOR	2020	10	28	0	0	14532	7	0
97	JAWA BARAT	GARUT	BANJIR BANDANG DAN TANAH LONGSOR	2020	10	13	0	0	9542	7	0
98	JAWA BARAT	KARAWANG	BANJIR, TANAH LONGSOR DAN PUTTING BELIUNG	2020	3	25	0	0	81473	14	0
99	JAWA BARAT	TASIKMALAYA	BANJIR DAN TANAH LONGSOR	2020	7	10	0	0	0	14	0
100	JAWA BARAT	TASIKMALAYA	BANJIR DAN TANAH LONGSOR	2020	10	14	0	0	0	14	0
101	JAWA BARAT	TASIKMALAYA	BANJIR DAN TANAH LONGSOR	2020	11	23	0	0	0	14	0
102	JAWA BARAT	PANGANDARAN	BANJIR	2020	10	27	2	0	6270	8	3.987240829
103	JAWA BARAT	SUKABUMI	BANJIR	2020	9	21	3	0	1107	7	38.71467286
104	JAWA BARAT	BANDUNG BARAT	BANJIR DAN TANAH LONGSOR	2020	1	1	0	0	1411	7	0
105	JAWA BARAT	INDRAMAYU	BANJIR DAN TANAH LONGSOR	2020	1	1	0	0		7	0
106	JAWA BARAT	CIREBON	BANJIR	2020	2	8	0	0	11180	14	0
107	JAWA BARAT	BEKASI	BANJIR DAN TANAH LONGSOR	2020	2	25	0	0	3123	7	0
108	JAWA BARAT	GARUT	TANAH LONGSOR	2020	12	3	0	0	911	7	0
109	JAWA BARAT	SUKABUMI	KEBAKARAN	2020	10	8	0	0	71	4	0
110	JAWA BARAT	SUKABUMI	GEMPA BUMI	2020	3	11	0	0	2994	7	0
111	JAWA BARAT	SUMEDANG	BANJIR DAN TANAH LONGSOR	2020	6	2	0	0		27	0
112	JAWA TENGAH	MAGELANG	LETUSAN GUNUNG MERAPI	2020	11	5	0	0	212	39	0
113	JAWA TENGAH	KOTA PEKALONGAN	BANJIR	2020	2	19	2	0	15,054	14	0.94896468
114	JAWA TENGAH	KLATEN	LETUSAN GUNUNG MERAPI	2020	11	5	0	0	305	28	0
115	JAWA TENGAH	BANJARNEGARA	TANAH LONGSOR	2020	10	28	0	0	10	7	0
116	JAWA TENGAH	BANJARNEGARA	TANAH LONGSOR	2020	12	3	0	0	327	7	0
117	JAWA TENGAH	BANJARNEGARA	TANAH LONGSOR	2020	11	17	0	0	36	7	0
118	JAWA TENGAH	BANJARNEGARA	TANAH LONGSOR	2020	10	20	0	0	31	7	0
119	JAWA TENGAH	BANYUMAS	TANAH LONGSOR	2020	11	17	5	0	15,280	60	0.545375218
120	JAWA TENGAH	CILACAP	BANJIR DAN TANAH LONGSOR	2020	11	17	2	0	77,700	14	0.183857327
121	JAWA TENGAH	DEMAK	BANJIR	2020	1	9	0	0	12,089	14	0
122	JAWA TENGAH	CILACAP	BANJIR	2020	10	26	0	0	6,830	14	0
123	JAWA TENGAH	CILACAP	BANJIR	2020	11	15	0	0	2,188	14	0
124	JAWA TENGAH	CILACAP	TANAH LONGSOR	2020	11	18	0	0	56	14	0
125	JAWA TENGAH	CILACAP	TANAH LONGSOR	2020	11	21	0	0	10	14	0
126	JAWA TENGAH	CILACAP	BANJIR	2020	11	29	0	0	266	14	0

No	Provinsi	Kota/ Kabupaten	Kejadian Bencana	Tahun	Bulan	Tanggal	MD	Hilang	Terdampak	Durasi Tanggap Darurat	Angka Kematian/ 100000/ Wilayah
127	JAWA TENGAH	CILACAP	BANJIR DAN TANAH LONGSOR	2020	12	1	0	0	2,750	14	0
128	JAWA TENGAH	BANJARNEGARA	TANAH LONGSOR	2020	2	20	0	0	20	7	0
129	JAWA TENGAH	PURWOREJO	BANJIR DAN TANAH LONGSOR	2020	10	26	0	0	32	7	0
130	JAWA TENGAH	KEBUMEN	BANJIR	2020	10	26	0	0	2,107	14	0
131	JAWA TENGAH	KEBUMEN	PUTING BELIUNG	2020	11	5	0	0	64	14	0
132	JAWA TENGAH	MAGELANG	BANJIR	2020	2	29	0	0	211	14	0
133	JAWA TENGAH	MAGELANG	TANAH LONGSOR	2020	3	5	0	0	240	14	0
134	JAWA TENGAH	BLORA	KEKERINGAN	2020	8	10	0	0	191,256	120	0
135	JAWA TENGAH	KOTA PEKALONGAN	BANJIR	2020	5	31	0	0	2,972	14	0
136	JAWA TENGAH	KOTA PEKALONGAN	BANJIR	2020	6	3	0	0	224	14	0
137	JAWA TENGAH	KOTA PEKALONGAN	CUACA EKSTRIM	2020	12	11	0	0	2,850	20	0
138	JAWA TENGAH	GROBOGAN	BANJIR	2020	1	8	2	0	29,512	7	0.968129187
139	JAWA TENGAH	SRAGEN	KEKERINGAN	2020	9	2	0	0	7,497	90	0
140	JAWA TENGAH	KENDAL	TANAH LONGSOR	2020	2	20	0	0	1,000	30	0
141	JAWA TENGAH	BREBES	BANJIR	2020	1	8	0	0	13,341	30	0
173	JAWA TIMUR	BONDOWOSO	BANJIR, TANAH LONGSOR DAN ANGIN	2020	1	29	0	0	8	14	0
174	JAWA TIMUR	BONDOWOSO	BANJIR BANDANG	2020	1	29	0	0	1551	89	0
175	JAWA TIMUR	NGANJUK	LONGSOR	2020	1	27	0	0	1	75	0
176	JAWA TIMUR	NGANJUK	BANJIR	2020	1	6	0	0	24	60	0
177	JAWA TIMUR	NGANJUK	LONGSOR	2020	2	4	0	0	1	30	0
178	JAWA TIMUR	NGANJUK	BANJIR	2020	2	28	0	1	77993	7	0.183166621
179	JAWA TIMUR	NGANJUK	BANJIR BANDANG DAN TANAH LONGSOR	2020	3	3	0	0	1	14	0
180	JAWA TIMUR	NGANJUK	KEKERINGAN	2020	9	13	0	0	3036	79	0
181	JAWA TIMUR	KOTA BLITAR	ANGIN KENCANG	2020	2	7	0	0	1	21	0
182	JAWA TIMUR	SIDOARJO	BANJIR	2020	2	19	0	0	2420	42	0
183	JAWA TIMUR	LUMAJANG	BANJIR	2020	2	22	0	0	4427	30	0
184	JAWA TIMUR	LUMAJANG	LETUSAN GUNUNG SEMERU	2020	12	1	0	1	5527	14	1.292357001
185	JAWA TIMUR	MALANG	BANJIR DAN TANAH LONGSOR	2020	2	27	0	0	1	30	0
186	JAWA TIMUR	MALANG	BANJIR, TANAH LONGSOR DAN ANGIN PUTING BELIUNG	2020	3	1	0	0	141	121	0
187	JAWA TIMUR	JEMBER	BANJIR, TANAH LONGSOR DAN ANGIN	2020	2	22	0	0	2555	14	0
188	JAWA TIMUR	JEMBER	BANJIR DAN TANAH LONGSOR	2020	3	2	0	0	280	14	0
189	JAWA TIMUR	MOJOKERTO	KEKERINGAN DAN KEBAKARAN HUTAN	2020	7	30	0	0	26725	127	0
190	JAWA TIMUR	PACITAN	BANJIR DAN TANAH LONGSOR	2020	10	27	0	0	220	32	0

## BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

No	Provinsi	Kota/ Kabupaten	Kejadian Bencana	Tahun	Bulan	Tanggal	MD	Hilang	Terdampak	Durasi Tanggap Darurat	Angka Kematian/ 100000/ Wilayah
191	JAWA TIMUR	PACITAN	BANJIR DAN TANAH LONGSOR	2020	11	15	0	0	125	30	0
192	JAWA TIMUR	TRENGGALEK	BANJIR DAN TANAH LONGSOR	2020	10	27	0	0	16	66	0
193	JAWA TIMUR	BANGKALAN	BANJIR	2020	12	10	1	0	16560	7	0.862663906
194	KALIMANTAN SELATAN	TANAH LAUT	BANJIR	2020	7	13	0	0	7233	14	0
195	KALIMANTAN SELATAN	KOTA BARU	BANJIR	2020	7	13	0	0	950	7	0
196	KALIMANTAN SELATAN	HULU SUNGAI UTARA	BANJIR	2020	2	11	0	0	53642	14	0
197	KALIMANTAN SELATAN	TANAH BUMBU	BANJIR	2020	9	3	0	0	13021	7	0
198	KALIMANTAN SELATAN	BALANGAN	BANJIR	2020	11	2	0	0	3520	10	0
199	KALIMANTAN TENGAH	GUNUNG MAS	BANJIR	2020	4	18	3	3	36688	7	2.336303034
200	KALIMANTAN TENGAH	KOTAWARINGIN BARAT	TANAH LONGSOR	2020	11	18	3	7	373	30	89.36550492
201	KALIMANTAN TENGAH	LAMANDAU	BANJIR, LONGSOR & ANGIN	2020	9	6	1	0	11444	10	0.873820343
202	KALIMANTAN TENGAH	KOTAWARINGIN BARAT	BANJIR	2020	6	22	1	0	25055	28	0.142543547
203	KALIMANTAN TENGAH	KATINGAN	BANJIR	2020	9	7	0	0	6863	30	0
204	KALIMANTAN TENGAH	KOTAWARINGIN BARAT	Banjir	2020	9	11	0	0	3979	14	0
205	KALIMANTAN TENGAH	LAMANDAU	BANJIR, LONGSOR & ANGIN	2020	6	21	0	0	11444	7	0
206	KALIMANTAN TENGAH	SERUYAN	BANJIR	2020	9	7	0	0	4366	7	0
207	KALIMANTAN TIMUR	KOTA SAMARINDA	BANJIR	2020	5	22	4	4	44678	14	1.278993177
208	NUSA TENGGARA BARAT	BIMA	KEKERINGAN	2020	7	1	0	0	39175	90	0
209	D I YOGYAKARTA	BANTUL	BANJIR, TANAH LONGSOR DAN ANGIN	2020	3	3	0	0	15	14	0
210	KALIMANTAN BARAT	KAPUAS HULU	BANJIR, ANGIN PUTING BELIUNG DAN TANAH LONGSOR	2020	9	14	0	0	121247	14	0
211	KALIMANTAN BARAT	LANDAK	BANJIR, ANGIN PUTING BELIUNG DAN TANAH LONGSOR	2020	9	3	0	0	9564	30	0
212	KALIMANTAN BARAT	MELAWI	BANJIR, ANGIN PUTING BELIUNG DAN TANAH LONGSOR	2020	7	10	1	0	47899	15	0.13918175
213	KALIMANTAN BARAT	MELAWI	BANJIR, ANGIN PUTING BELIUNG DAN TANAH LONGSOR	2020	9	1	2	0	88418	30	0.075399428
214	KALIMANTAN BARAT	MEMPAWAH	BANJIR, ANGIN PUTING BELIUNG DAN TANAH LONGSOR	2020	9	8	0	0	30820	14	0

No	Provinsi	Kota/ Kabupaten	Kejadian Bencana	Tahun	Bulan	Tanggal	MD	Hilang	Terdampak	Durasi Tanggap Darurat	Angka Kematian/ 100000/ Wilayah
215	KALIMANTAN BARAT	SANGGAU	BANJIR BANDANG	2020	7	8	0	0	1265	15	0
216	KALIMANTAN BARAT	SINTANG	BANJIR, ANGIN PUTING BELIUNG DAN TANAH LONGSOR	2020	7	10	2	0	57304	28	0.124648491
217	KALIMANTAN BARAT	SINTANG	BANJIR, ANGIN PUTING BELIUNG DAN TANAH LONGSOR	2020	9	14	0	0	37288	28	0
218	KALIMANTAN BARAT	KOTA PONTIANAK	ANGIN PUTING BELIUNG	2020	7	17	0	0	800	14	0
219	KALIMANTAN BARAT	KOTA SINGKAWANG	BANJIR, TANAH LONGSOR DAN ANGIN PUTING BELIUNG	2020	11	24	1	0	156	14	45.78754579
220	KALIMANTAN BARAT	SEKADAU	BANJIR, ANGIN PUTING BELIUNG DAN TANAH LONGSOR	2020	1	1	0	0	1	45	0
221	KALIMANTAN BARAT	SEKADAU	BANJIR, ANGIN PUTING BELIUNG DAN TANAH LONGSOR	2020	10	9	0	0	1	14	0
222	KALIMANTAN BARAT	KETAPANG	BANJIR	2020	6	19	0	0	11216	44	0
223	KALIMANTAN BARAT	KETAPANG	BANJIR	2020	9	22	0	0	6828	14	0
224	GORONTALO	BONE BOLANGO	BANJIR	2020	9	7	3	1	456	14	62.6566416
225	GORONTALO	BONE BOLANGO	BANJIR DAN LONGSOR	2020	7	3	1	0	1898	14	3.763359928
226	GORONTALO	BONE BOLANGO	BANJIR BANDANG	2020	6	11	0	0	6004	14	0
227	GORONTALO	BONE BOLANGO	BANJIR DAN LONGSOR	2020	7	24	0	0	910	14	0
228	MALUKU UTARA	KEPULAUAN SULA	BANJIR	2020	7	4	0	0	488	7	0
229	MALUKU UTARA	HALMAHERA UTARA	BANJIR	2020	7	28	0	0	1330	7	0
230	MALUKU UTARA	KEPULAUAN MOROTAI	BANJIR	2020	10	15	0	0	400	14	0
231	MALUKU UTARA	PULAU MOROTAI	GELOMBANG PASANG DAN ABRASI	2020	10	15	0	0	400	14	0
232	MALUKU UTARA	PULAU TALIABU	BANJIR DAN LONGSOR	2020	6	29	0	0	2800	28	0
233	NUSA TENGGARA TIMUR	LEMBATA	ERUPSI ILI LEWOTOLOK	2020	11	30	0	0	9028	14	0
234	NUSA TENGGARA TIMUR	SIKKA	BANJIR ROB	2020	6	4	0	0	824	14	0
235	NUSA TENGGARA TIMUR	TIMOR TENGAH UTARA	KEKERINGAN	2020	4	1	0	0	742657	275	0
236	PAPUA	PANIAI	TANAH LONGSOR	2020	7	28	4	0	182	7	313.9717425
237	PAPUA	DEIYAI	BANJIR DAN LONGSOR	2020	7	13	0	0	2693	14	0

## BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

No	Provinsi	Kota/ Kabupaten	Kejadian Bencana	Tahun	Bulan	Tanggal	MD	Hilang	Terdampak	Durasi Tanggap Darurat	Angka Kematian/ 100000/ Wilayah
238	PAPUA BARAT	KOTA SORONG	BANJIR DAN LONGSOR	2020	7	16	6	0	8856	15	4.516711834
239	SULAWESI BARAT	MAMASA	BANJIR DAN LONGSOR	2020	9	7	0	0	52	7	0
240	SULAWESI SELATAN	BANTAENG	BANJIR LONGSOR	2020	6	12	1	0	34575	14	0.206590228
241	SULAWESI SELATAN	BULUKUMBA	TANAH LONGSOR	2020	4	19	4	0	296	14	96.52509653
242	SULAWESI SELATAN	JENEPONTO	BANJIR DAN TANAH LONGSOR	2020	6	13	4	0	23408	14	1.220583927
243	SULAWESI SELATAN	LUWU UTARA	BANJIR DAN TANAH LONGSOR	2020	7	14	39	9	15994	60	5.001875703
244	SULAWESI SELATAN	WAJO	BANJIR	2020	6	6	0	0	50349	42	0
245	SULAWESI TENGAH	PARIGI MOUTONG	BANJIR	2020	6	11	0	0	4470	132	0
246	SULAWESI TENGAH	POSO	BANJIR DAN TANAH LONGSOR	2020	4	29	0	0	4184	14	0
247	SULAWESI TENGAH	TOLITOLI	BANJIR DAN LONGSOR	2020	7	9	0	0	2976	21	0
248	SULAWESI TENGGARA	KONAWE	BANJIR DAN LONGSOR	2020	6	20	0	0	12416	35	0
249	SULAWESI TENGGARA	KONAWE SELATAN	BANJIR DAN LONGSOR	2020	7	17	0	0	920	14	0
250	SULAWESI TENGGARA	KONAWE UTARA	BANJIR	2020	6	17	0	0	3691	14	0
251	SULAWESI TENGGARA	KONAWE UTARA	BANJIR	2020	11	23	0	0	0	14	0
252	SULAWESI UTARA	BOLAANG MONGONDOW	BANJIR	2020	3	4	1	0	496	28	7.200460829
253	SULAWESI UTARA	BOLAANG MONGONDOW SELATAN	BANJIR DAN TANAH LONGSOR	2020	7	24	1	0	23689	56	0.075381582
254	SULAWESI UTARA	BOLAANG MONGONDOW UTARA	BANJIR	2020	3	4	2	0	6894	14	2.072195284
255	SULAWESI UTARA	KEPULAUAN SANGIHE	BANJIR DAN LONGSOR	2020	1	3	3	0	870	14	24.63054187
256	SULAWESI UTARA	KEPULAUAN TALAUD	GEMPA BUMI	2020	9	9	0	0	456	14	0
257	SULAWESI UTARA	BOLAANG MONGONDOW	BANJIR DAN TANAH LONGSOR	2020	7	25	0	0	1180	44	0
Angka Kematian Nasional							<b>188</b>	<b>33</b>	<b>4694364</b>	5814	<b>3.687694</b>

## Lampiran 7. Daftar Bantuan Logistik dan Peralatan di Tiap BPBD Tahun 2020

No	Lokasi	Logistik		Peralatan	
		Jumlah	Satuan	Set	Unit
	<b>Aceh</b>				
1	Kab. Aceh Barat				
	Tenda Pengungsi			2	
2	Kab. Aceh Jaya				
	Tenda Pengungsi			2	
3	Kab. Aceh Singkil				
	Motor Trail 250cc				2
4	Kab. Aceh Timur				
	Motor Trail 250cc				2
5	Kab. Aceh Utara				
	Motor Trail 250cc				2
6	Kab. Bireuen				
	Motor Trail 250cc				2
7	Provinsi Aceh				
	Tenda keluarga			2	
	Tenda Pengungsi			4	
	Perlengkapan Sekolah	80	Paket		
	Matras	180	Lembar		
	Sandang	325	Paket		
	Paket Perlengkapan Keluarga	275	Paket		
	Tenda Gulung	80	Lembar		
	Lauk Pauk	480	Paket		
	Makanan Siap Saji	480	Paket		
	Makanan Tambahan Gizi	480	Paket		
	Paket Perlengkapan Bayi	229	Paket		
	Paket Kebersihan Keluarga	190	Paket		
	Sarung Tangan Kain (Pendek) 2018	20	Pasang		
	Kantong Mayat (2018)	30	Lembar		
	Kontainer Plastik (2018)	10	Unit		
	<b>Sumatera Utara</b>				
1	Kab. Asahan				
	Motor Trail 250cc				2
2	Kab. Deli Serdang				
	Tenda Pengungsi			2	

## BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

No	Lokasi	Logistik		Peralatan		
		Jumlah	Satuan	Set	Unit	
3	Kab. Labuhan Batu					
	Mobil Rescue				1	
	Tenda Pengungsi			2		
4	Kab. Labuhan Batu Utara					
	Motor Trail 250cc				2	
5	Kab. Nias Barat					
	Tenda Pengungsi			2		
6	Kab. Simalungun					
	Motor Trail 250cc				2	
7	Kota Sibolga					
	Tenda Pengungsi			2		
8	Provinsi Sumatera Utara					
	Tenda keluarga			2		
	Kantong Mayat	55	Lembar			
	Perlengkapan Sekolah	140	Paket			
	Matras	330	Lembar			
	Sandang	875	Paket			
	Paket Perlengkapan Keluarga	757	Paket			
	Selimut	520	Lembar			
	Tenda Gulung	200	Lembar			
	Lauk Pauk	720	Paket			
	Makanan Siap Saji	720	Paket			
	Makanan Tambahan Gizi	720	Paket			
	Paket Perlengkapan Bayi	630	Paket			
	Paket Kebersihan Keluarga	300	Paket			
	Sarung Tangan Kain (Pendek) 2018	50	Pasang			
	Kontainer Plastik (2018)	10	Unit			
		<b>Sumatera Barat</b>				
	1	Kab. Lima Puluh Kota				
		Mobil Pickup				1
	2	Kab. Pasaman Barat				
Tenda Pengungsi				2		
3	Kab. Sijunjung					
	Truk Serbaguna				1	
4	Kab. Tanah Datar					
	Mobil Tangki Air				1	
5	Kota Padang					

No	Lokasi	Logistik		Peralatan	
		Jumlah	Satuan	Set	Unit
	Tenda Pengungsi			2	
6	Kota Padang Panjang				
	Mobil Rescue				1
7	Kota Pariaman				
	Tenda Pengungsi			2	
8	Kota Solok				
	Mobil Pickup				1
9	Provinsi Sumatera Barat				
	Tenda keluarga			2	
	Truk Serbaguna				1
	<b>Riau</b>				
1	Kab. Bengkalis				
	Tenda Pengungsi			2	
2	Kab. Indragiri Hilir				
	Mobil Pickup				1
3	Kab. Kep. Meranti				
	Mobil Rescue				1
	Tenda Pengungsi			2	
4	Kab. Pelalawan				
	Motor Trail 250cc				2
5	Kab. Rokan Hilir				
	Mobil Pickup				1
6	Kab. Rokan Hulu				
	Motor Trail 250cc				2
7	Kab. Siak				
	Mobil Pickup				1
8	Kota Pekanbaru				
	Mobil Pickup				1
9	Provinsi Riau				
	Tenda keluarga			2	
	Truk Avtur				1
	Perlengkapan Sekolah	100	Paket		
	Matras	180	Lembar		
	Sandang	425	Paket		
	Paket Perlengkapan Keluarga	353	Paket		
	Selimut	400	Lembar		

## BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

No	Lokasi	Logistik		Peralatan	
		Jumlah	Satuan	Set	Unit
	Tenda Gulung	90	Lembar		
	Lauk Pauk	600	Paket		
	Makanan Siap Saji	600	Paket		
	Makanan Tambahan Gizi	600	Paket		
	Paket Perlengkapan Bayi	294	Paket		
	Paket Kebersihan Keluarga	240	Paket		
	Sarung Tangan Kain (Pendek) 2018	26	Pasang		
	Kantong Mayat (2018)	39	Lembar		
	Kontainer Plastik (2018)	10	Unit		
	<b>Jambi</b>				
1	Kab. Sarolangun				
	Mobil Tangki Air				1
2	Kab. Tanjung Jabung Barat				
	Tenda Pengungsi			2	
3	Kab. Tanjung Jabung Timur				
	Tenda Pengungsi			2	
4	Provinsi Jambi				
	Tenda keluarga			2	
	Truk Avtur				1
	Tenda Pengungsi			4	
	Kantong Mayat	30	Lembar		
	Perlengkapan Sekolah	20	Paket		
	Matras	150	Lembar		
	Sandang	225	Paket		
	Paket Perlengkapan Keluarga	150	Paket		
	Selimut	240	Lembar		
	Tenda Gulung	30	Lembar		
	Lauk Pauk	420	Paket		
	Makanan Siap Saji	420	Paket		
	Makanan Tambahan Gizi	420	Paket		
	Paket Perlengkapan Bayi	200	Paket		
	Paket Kebersihan Keluarga	150	Paket		
	Sarung Tangan Kain (Pendek) 2018	10	Pasang		
	Kontainer Plastik (2018)	10	Unit		
	<b>Sumatera Selatan</b>				
1	Kab. Banyuasin				
	Mobil Tangki Air				1

No	Lokasi	Logistik		Peralatan	
		Jumlah	Satuan	Set	Unit
2	Kab. Empat Lawang				
	Motor Trail 250cc				2
3	Kab. Ogan Ilir				
	Mobil Pickup				1
4	Kab. Ogan Komering Ulu				
	Motor Trail 250cc				2
5	Kab. Lahat				
	Mobil Pick Up				1
6	Kab. Muara Enim				
	Motor Trail 250cc				2
7	Kab. Musi Rawas				
	Tenda Pengungsi				2
8	Kab. Musi Rawas Utara				
	Tenda Pengungsi				2
9	Provinsi Sumatera Selatan				
	Tenda keluarga			2	
	Truk Avtur				1
	Kantong Mayat	45	Lembar		
	Perlengkapan Sekolah	120	Paket		
	Matras	210	Lembar		
	Sandang	500	Paket		
	Paket Perlengkapan Keluarga	439	Paket		
	Selimut	520	Lembar		
	Tenda Gulung	100	Lembar		
	Paket Perlengkapan Bayi	365	Paket		
	Paket Kebersihan Keluarga	290	Paket		
	Sarung Tangan Kain (Pendek) 2018	32	Pasang		
	Kontainer Plastik (2018)	10	Unit		
	Tenda Pengungsi	4	Set		
	<b>Bengkulu</b>				
1	Kota Bengkulu				
	Truk Serbaguna				1
2	Provinsi Bengkulu				
	Tenda Keluarga			2	
	<b>Lampung</b>				
1	Kab. Lampung Barat				

## BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

No	Lokasi	Logistik		Peralatan	
		Jumlah	Satuan	Set	Unit
	Truk Serbaguna				1
2	Kab. Lampung Timur				
	Tenda Pengungsi			2	
3	Kab. Pesawaran				
	Tenda Pengungsi			2	
4	Kab. Waykanan				
	Mobil Pickup				1
5	Kab. Tanggamus				
	Tenda Pengungsi			2	
6	Provinsi Lampung				
	Tenda keluarga			2	
	Kantong Mayat	45	Lembar		
	Perlengkapan Sekolah	120	Paket		
	Matras	210	Lembar		
	Sandang	500	Paket		
	Paket Perlengkapan Keluarga	440	Paket		
	Selimut	520	Lembar		
	Tenda Gulung	110	Lembar		
	Lauk Pauk	720	Paket		
	Makanan Siap Saji	720	Paket		
	Makanan Tambahan Gizi	720	Paket		
	Paket Perlengkapan Bayi	366	Paket		
	Paket Kebersihan Keluarga	290	Paket		
	Sarung Tangan Kain (Pendek) 2018	32	Pasang		
	Kontainer Plastik (2018)	15	Unit		
	<b>Bangka Belitung</b>				
1	Kab. Belitung Timur				
	Mobil Rescue				1
2	Kota. Pangkal Pinang				
	Mobil Tangki Air				1
	Tenda Pengungsi			2	
3	Provinsi Bangka Belitung				
	Tenda keluarga			2	
	Kantong Mayat	30	Lembar		
	Perlengkapan Sekolah	40	Paket		
	Matras	150	Lembar		
	Sandang	225	Paket		

No	Lokasi	Logistik		Peralatan	
		Jumlah	Satuan	Set	Unit
	Paket Perlengkapan Keluarga	150	Paket		
	Selimut	240	Lembar		
	Tenda Gulung	30	Lembar		
	Lauk Pauk	420	Paket		
	Makanan Siap Saji	420	Paket		
	Makanan Tambahan Gizi	420	Paket		
	Paket Perlengkapan Bayi	200	Paket		
	Sarung Tangan Kain (Pendek) 2018	10	Pasang		
	Paket Kebersihan Keluarga (2018)	100	Paket		
	Paket Perlengkapan Bayi (2018)	20	Paket		
	Kontainer Plastik (2018)	10	Unit		
	<b>Kepulauan Riau</b>				
1	Provinsi Kepulauan Riau				
	Tenda keluarga			2	
	Perlengkapan Sekolah	40	Paket		
	Matras	120	Lembar		
	Sandang	225	Paket		
	Paket Perlengkapan Keluarga	150	Paket		
	Selimut	240	Lembar		
	Tenda Gulung	30	Lembar		
	Makanan Siap Saji	420	Paket		
	Paket Perlengkapan Bayi	200	Paket		
	Paket Kebersihan Keluarga	150	Paket		
	Sarung Tangan Kain (Pendek) 2018	15	Pasang		
	Kontainer Plastik (2018)	10	Unit		
	<b>DKI Jakarta</b>				
1	Provinsi DKI Jakarta				
	Tenda keluarga			2	
	Kantong Mayat	55	Lembar		
	Perlengkapan Sekolah	120	Paket		
	Matras	300	Lembar		
	Sandang	575	Paket		
	Paket Perlengkapan Keluarga	510	Paket		
	Selimut	600	Lembar		
	Tenda Gulung	130	Lembar		
	Lauk Pauk	840	Paket		

## BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

No	Lokasi	Logistik		Peralatan	
		Jumlah	Satuan	Set	Unit
	Makanan Siap Saji	840	Paket		
	<b>Makanan Tambahan Gizi</b>	<b>420</b>	<b>Paket</b>		
	Paket Perlengkapan Bayi	425	Paket		
	Paket Kebersihan Keluarga	340	Paket		
	Sarung Tangan Kain (Pendek) 2018	37	Pasang		
	Paket Perlengkapan Bayi (2018)	20	Paket		
	Kontainer Plastik (2018)	10	Unit		
	<b>Jawa Barat</b>				
1	Kab. Bekasi				
	Mobil Pickup				1
2	Kab. Ciamis				
	Tenda Pengungsi			2	
3	Kab. Indramayu				
	Mobil Tangki Air				1
4	Kab. Pangandaran				
	Mobil Rescue				1
5	Kab. Subang				
	Mobil Rescue				1
6	Kab. Tasikmalaya				
	Truk Serbaguna				1
7	Kab Cirebon				
	Tenda Pengungsi			2	
8	Kab. Bogor				
	Pelampung				8
9	Kota Bekasi				
	Tenda Pengungsi			2	
10	Kota Sukabumi				
	Tenda Pengungsi			2	
11	Kota Tasikmalaya				
	Tenda Pengungsi			2	
12	Kota Cimahi				
	Tenda Pengungsi			2	
13	Kota Cirebon				
	Mobil Pickup				1
14	Provinsi Jawa Barat				
	Pelampung				8
	Tenda keluarga			2	

No	Lokasi	Logistik		Peralatan	
		Jumlah	Satuan	Set	Unit
	Perlengkapan Sekolah	560	Paket		
	Matras	480	Lembar		
	Sandang	2.200	Paket		
	Paket Perlengkapan Keluarga	2.323	Paket		
	Selimut	1.920	Lembar		
	Tenda Gulung	600	Lembar		
	Paket Perlengkapan Bayi	1.365	Paket		
	Paket Kebersihan Keluarga	1.210	Paket		
	Rompi Proyek (2018)	10	Buah		
	<b>Sarung Tangan Kain (Pendek) 2018</b>	<b>143</b>	<b>Pasang</b>		
	Paket Perlengkapan Bayi (2018)	20	Paket		
	Kontainer Plastik (2018)	35	Unit		
	<b>Jawa Tengah</b>				
1	Kab. Batang				
	Tenda Pengungsi			2	
2	Kab. Brebes				
	Mobil Tangki Air				1
3	Kab. Cilacap				
	Tenda Pengungsi			2	
4	Kab. Demak				
	Truk Serbaguna				1
5	Kab. Karanganyar				
	Mobil Pickup				1
6	Kab. Kendal				
	Mobil Pickup				1
7	Kab. Pati				
	Mobil Tangki Air				1
8	Kab. Pemasang				
	Mobil Tangki Air				1
9	Kab. Rembang				
	Mobil Pickup				1
10	Kab. Tegal				
	Mobil Tangki Air				1
11	Kota Pekalongan				
	Tenda Pengungsi			2	
12	Kota Semarang				

## BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

No	Lokasi	Logistik		Peralatan	
		Jumlah	Satuan	Set	Unit
	Truk Serbaguna				1
13	Provinsi Jawa Tengah				
	Tenda keluarga			2	
	Kantong Mayat	80	Lembar		
	Perlengkapan Sekolah	380	Paket		
	Matras	390	Lembar		
	Sandang	1.950	Paket		
	Paket Perlengkapan Keluarga	1.900	Paket		
	Selimut	1.800	Lembar		
	Tenda Gulung	480	Lembar		
	Paket Perlengkapan Bayi	1.000	Paket		
	Paket Kebersihan Keluarga	1.000	Paket		
	Rompi Proyek (2018)	10	Buah		
	Sarung Tangan Kain (Pendek) 2018	125	Pasang		
	Paket Perlengkapan Bayi (2018)	20	Paket		
	Kontainer Plastik (2018)	35	Unit		
	<b>D.I. Yogyakarta</b>				
1	Kota Jogjakarta				
	Mobil Pickup				1
2	Provinsi D.I. Yogyakarta				
	Tenda keluarga			2	
	Paket Perlengkapan Keluarga	191	Paket		
	Paket Perlengkapan Bayi	200	Paket		
	Paket Kebersihan Keluarga	150	Paket		
	<b>35</b>				
	<b>Jawa Timur</b>				
1	Kab. Bangkalan				
	Mobil Pickup				1
2	Kab. Banyuwangi				
	Mobil Tangki Air				1
3	Kab. Blitar				
	Mobil Tangki Air				1
4	Kab. Gresik				
	Mobil Pickup				1
5	Kab. Lamongan				
	Mobil Pickup				1
6	Kab. Lumajang				

No	Lokasi	Logistik		Peralatan	
		Jumlah	Satuan	Set	Unit
	Motor Trail 250cc				2
7	Kab. Magetan				
	Tenda Pengungsi			2	
8	Kab. Malang				
	Mobil Rescue				1
9	Kab. Mojokerto				
	Tenda Pengungsi			2	
10	Kab. Pacitan				
	Tenda Pengungsi			2	
11	Kab. Pasuruan				
	Motor Trail 250cc				2
12	Kab. Sidoarjo				
	Mobil Tangki Air				1
13	Kota Malang				
	Tenda Pengungsi			2	
14	Kota Pasuruan				
	Tenda Pengungsi			2	
15	Provinsi Jawa Timur				
	Tenda keluarga			2	
	Paket Perlengkapan Bayi	1.000	Paket		
	Paket Kebersihan Keluarga	810	Paket		
	<b>Banten</b>				
1	Kab. Lebak				
	Pelampung				8
2	Kab. Pandeglang				
	Mobil Tangki Air				1
3	Kota Cilegon				
	Truk Serbaguna				1
4	Kota Tangerang Selatan				
	Pelampung				8
5	Kota Serang				
	Tenda Pengungsi			2	
6	Provinsi Banten				
	Mobil Pickup				1
	Pelampung				8
	Tenda keluarga			2	

## BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

No	Lokasi	Logistik		Peralatan	
		Jumlah	Satuan	Set	Unit
	Tenda Pengungsi			2	
	Kantong Mayat	75	Lembar		
	Perlengkapan Sekolah	180	Paket		
	Matras	300	Lembar		
	Sandang	775	Paket		
	Paket Perlengkapan Keluarga	660	Paket		
	Paket Perlengkapan Bayi	550	Paket		
	Paket Kebersihan Keluarga	440	Paket		
	Kontainer Plastik (2018)	20	Unit		
	<b>Bali</b>				
1	Kab. Buleleng				
	Motor Trail 250cc				2
2	Kab. Gianyar				
	Tenda Pengungsi			2	
3	Kab. Jembrana				
	Mobil Rescue				1
	Tenda Pengungsi			2	
4	Kab. Tabanan				
	Motor Trail 250cc				2
5	Provinsi Bali				
	Tenda keluarga			2	
	Kantong Mayat	35	Lembar		
	Perlengkapan Sekolah	60	Paket		
	Matras	150	Lembar		
	Sandang	275	Paket		
	Paket Perlengkapan Keluarga	224	Paket		
	Selimut	280	Lembar		
	Tenda Gulung	60	Lembar		
	Lauk Pauk	420	Paket		
	Makanan Siap Saji	420	Paket		
	Makanan Tambahan Gizi	420	Paket		
	Paket Perlengkapan Bayi	200	Paket		
	Paket Kebersihan Keluarga	150	Paket		
	Sarung Tangan Kain (Pendek) 2018	20	Pasang		
	Kontainer Plastik (2018)	10	Unit		
	<b>Nusa Tenggara Barat</b>				
1	Kab. Lombok Barat				

No	Lokasi	Logistik		Peralatan	
		Jumlah	Satuan	Set	Unit
	Truk Serbaguna				1
2	Kab. Lombok Utara				
	Motor Trail 250cc				2
3	Kab. Sumbawa				
	Tenda Pengungsi			2	
4	Provinsi Nusa Tenggara Barat				
	Tenda keluarga			2	
	Kantong Mayat	35	Lembar		
	Perlengkapan Sekolah	60	Paket		
	Sandang	325	Paket		
No	Lokasi	Logistik	Peralatan	Set	Unit
		Jumlah	Satuan		
	Paket Perlengkapan Keluarga	249	Paket		
	Lauk Pauk	420	Paket		
	Makanan Siap Saji	420	Paket		
	Makanan Tambahan Gizi	420	Paket		
	Paket Perlengkapan Bayi	208	Paket		
	Paket Kebersihan Keluarga	170	Paket		
	Sarung Tangan Kain (Pendek) 2018	18	Pasang		
	Kontainer Plastik (2018)	15	Unit		
	<b>Nusa Tenggara Timur</b>				
1	Kab. Alor				
	Mobil Tangki Air				1
2	Kab. Belu				
	Mobil Tangki Air				1
3	Kab. Ende				
	Flexible Tank 5.000 Galon				1
	Motor Trail 250cc				2
4	Kab. Flores Timur				
	Motor Trail 250cc				1
5	Kab. Kupang				
	Tenda Pengungsi			2	
6	Kab. Lembata				
	Tenda Pengungsi			2	
7	Kab. Malaka				
	Mobil Tangki Air				1

**BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA**

No	Lokasi	Logistik		Peralatan	
		Jumlah	Satuan	Set	Unit
	Tenda Pengungsi			2	
8	Kab. Manggarai				
	Motor Trail 250cc				2
9	Kab. Manggarai Barat				
	Flexible Tank 5.000 Galon				1
	Motor Trail 250cc				1
10	Kab. Manggarai Timur				
	Mobil Tangki Air				1
11	Kab. Nagekeo				
	Motor Trail 250cc				2
12	Kab. Ngada				
	Flexible Tank 5.000 Galon				1
	Motor Trail 250cc				1
13	Kab. Sikka				
	Flexible Tank 5.000 Galon				1
	Motor Trail 250cc				2
14	Kota Kupang				
	Flexible Tank 5.000 Galon				1
	Motor Trail 250cc				1
15	Provinsi Nusa Tenggara Timur				
	Flexible Tank 5.000 Galon				1
	Motor Trail 250cc				10
	Tenda keluarga			2	
	Kantong Mayat	30	Lembar		
	Perlengkapan Sekolah	80	Paket		
	Matras	120	Lembar		
	Sandang	300	Paket		
	Paket Perlengkapan Keluarga	269	Paket		
	Selimut	320	Lembar		
	Tenda Gulung	70	Lembar		
	Lauk Pauk	450	Paket		
	Makanan Siap Saji	450	Paket		
	Makanan Tambahan Gizi	450	Paket		
	Paket Perlengkapan Bayi	224	Paket		
	Paket Kebersihan Keluarga	180	Paket		
	Sarung Tangan Kain (Pendek) 2018	20	Pasang		
	Kontainer Plastik (2018)	10	Unit		

No	Lokasi	Logistik		Peralatan	
		Jumlah	Satuan	Set	Unit
	<b>Kalimantan Barat</b>				
1	Kab. Bengkayang				
	Mobil Tangki Air				1
2	Kab. Kayong Utara				
	Motor Trail 250cc				2
3	Kab. Ketapang				
	Truk Serbaguna				1
4	Kab. Kubu Raya				
	Motor Trail 250cc				2
5	Kab. Landak				
	Mobil Tangki Air				1
6	Kab. Melawi				
	Mobil Pickup				1
7	Kab. Sambas				
	Mobil Rescue				1
8	Kota Pontianak				
	Mobil Pickup				1
9	Kota Singkawang				
	Mobil Tangki Air				1
	Tenda Pengungsi			2	
10	Provinsi Kalimantan Barat				
	Tenda keluarga			2	
	Truk Avtur				1
	Kantong Mayat	30	Lembar		
	Perlengkapan Sekolah	60	Paket		
	Matras	120	Lembar		
	Sandang	300	Paket		
	Paket Perlengkapan Keluarga	241	Paket		
	Selimut	280	Lembar		
	Tenda Gulung	60	Lembar		
	Lauk Pauk	420	Paket		
	Makanan Siap Saji	420	Paket		
	Makanan Tambahan Gizi	420	Paket		
	Paket Perlengkapan Bayi	201	Paket		
	Paket Kebersihan Keluarga	160	Paket		
	Sarung Tangan Kain (Pendek) 2018	18	Pasang		

## BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

No	Lokasi	Logistik		Peralatan	
		Jumlah	Satuan	Set	Unit
	Kontainer Plastik (2018)	10	Unit		
	<b>Kalimantan Tengah</b>				
1	Kab. Kapuas				
	Mobil Tangki Air				1
2	Kab. Katingan				
	Tenda Pengungsi			2	
3	Kab. Kotawaringin Barat				
	Tenda Pengungsi			2	
4	Kab. Kotawaringin Timur				
	Tenda Pengungsi			2	
5	Kota Palangkaraya				
	Mobil Pickup				1
6	Provinsi Kalimantan Tengah				
	Tenda keluarga			2	
	Truk Avtur				1
	Kantong Mayat	30	Lembar		
	Perlengkapan Sekolah	40	Paket		
	Matras	120	Lembar		
	Paket Perlengkapan Keluarga	150	Paket		
	Selimut	240	Lembar		
	Tenda Gulung	30	Lembar		
	Lauk Pauk	420	Paket		
	Makanan Siap Saji	420	Paket		
	Makanan Tambahan Gizi	420	Paket		
	Paket Perlengkapan Bayi	200	Paket		
	Paket Kebersihan Keluarga	150	Paket		
	Sarung Tangan Kain (Pendek) 2018	10	Pasang		
	Sandang (2018)	199	Paket		
	Kontainer Plastik (2018)	10	Unit		
	<b>Kalimantan Selatan</b>				
1	Kab. Barito Kuala				
	Truk Serbaguna				1
2	Kab. KotaBaru				
	Mobil Pickup				1
	Motor Trail 250cc				2
3	Kab. Tanah Bumbu				
	Motor Trail 250cc				2

No	Lokasi	Logistik		Peralatan	
		Jumlah	Satuan	Set	Unit
4	Kab. Tanah Laut				
	Mobil Tangki Air				1
5	Kota Banjarbaru				
	Tenda Pengungsi			2	
6	Provinsi Kalimantan Selatan				
	Tenda keluarga			2	
	Kantong Mayat	55	Lembar		
	Perlengkapan Sekolah	60	Paket		
	Matras	150	Lembar		
	Sandang	250	Paket		
	Paket Perlengkapan Keluarga	208	Paket		
	Selimut	400	Lembar		
	Tenda Gulung	50	Lembar		
	Lauk Pauk	420	Paket		
	Makanan Siap Saji	420	Paket		
	Makanan Tambahan Gizi	420	Paket		
	Paket Perlengkapan Bayi	200	Paket		
	Paket Kebersihan Keluarga	150	Paket		
	Helm (MSA) 2018	16	Buah		
	Rompi Proyek (2018)	16	Buah		
	Sarung Tangan Kain (Pendek) 2018	15	Pasang		
	<b>Tikar (2018)</b>	-	<b>Lembar</b>		
	Paket Perlengkapan Bayi (2018)	40	Paket		
	Kontainer Plastik (2018)	10	Unit		
	<b>Kalimantan Timur</b>				
1	Kab. Berau				
	Mobil Tangki Air				1
2	Kab. Kutai Barat				
	Motor Trail 250cc				2
3	Kab. Paser				
	Motor Trail 250cc				2
4	Kab. Penajam Pasir Utara				
	Mobil Tangki Air				1
5	Kota Balikpapan				
	Truk Serbaguna				1
6	Kota Samarinda				

**BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA**

No	Lokasi	Logistik		Peralatan	
		Jumlah	Satuan	Set	Unit
	Mobil Pickup				1
7	Provinsi Kalimantan Timur				
	Tenda keluarga			2	
	Kantong Mayat	35	Lembar		
	Perlengkapan Sekolah	60	Paket		
	Matras	120	Lembar		
	Sandang	225	Paket		
	Paket Perlengkapan Keluarga	186	Paket		
	Selimut	240	Lembar		
	Tenda Gulung	50	Lembar		
	Lauk Pauk	420	Paket		
	Makanan Siap Saji	420	Paket		
	Makanan Tambahan Gizi	420	Paket		
	Paket Perlengkapan Bayi	200	Paket		
	Paket Kebersihan Keluarga	150	Paket		
	Sarung Tangan Kain (Pendek) 2018	14	Pasang		
	Kontainer Plastik (2018)	10	Unit		
	<b>Kalimantan Utara</b>				
1	Kab. Nunukan				
	Mobil Tangki Air				1
2	Kab. Tanah Tidung				
	Mobil Rescue				1
	Tenda Pengungsi			2	
3	Provinsi Kalimantan Utara				
	Tenda keluarga			2	
	Kantong Mayat	30	Lembar		
	Perlengkapan Sekolah	40	Paket		
	Matras	120	Lembar		
	Sandang	225	Paket		
	Paket Perlengkapan Keluarga	150	Paket		
	Selimut	240	Lembar		
	Tenda Gulung	30	Lembar		
	Lauk Pauk	420	Paket		
	Makanan Siap Saji	420	Paket		
	Makanan Tambahan Gizi	420	Paket		
	Paket Perlengkapan Bayi	200	Paket		
	Paket Kebersihan Keluarga	150	Paket		

No	Lokasi	Logistik		Peralatan	
		Jumlah	Satuan	Set	Unit
	Sarung Tangan Kain (Pendek) 2018	10	Pasang		
	Kontainer Plastik (2018)	10	Unit		
	<b>Sulawesi Utara</b>				
1	Kab. Bolaang Mongondow				
	Motor Trail 250cc				2
2	Kab. Kepulauan Sangihe				
	Motor Trail 250cc				2
3	Kab. Minahasa Selatan				
	Motor Trail 250cc				2
4	Kab. Minahasa Tenggara				
	Motor Trail 250cc				2
5	Kab. Minahasa Utara				
	Motor Trail 250cc				2
6	Kab. Siau Tagulandang Biaro				
	Motor Trail 250cc				2
7	Kota Bitung				
	Mobil Pickup				1
8	Kota Manado				
	Motor Trail 250cc				2
9	Provinsi Sulawesi Utara				
	Tenda keluarga			2	
	Motor Trail				4
	Kantong Mayat	30	Lembar		
	Perlengkapan Sekolah	60	Paket		
	Matras	120	Lembar		
	Sandang	275	Paket		
	Paket Perlengkapan Keluarga	231	Paket		
	Selimut	280	Lembar		
	Tenda Gulung	60	Lembar		
	Lauk Pauk	420	Paket		
	Makanan Siap Saji	420	Paket		
	Makanan Tambahan Gizi	420	Paket		
	Paket Perlengkapan Bayi	200	Paket		
	Paket Kebersihan Keluarga	150	Paket		
	Sarung Tangan Kain (Pendek) 2018	17	Pasang		
	Kontainer Plastik (2018)	10	Unit		

## BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

No	Lokasi	Logistik		Peralatan	
		Jumlah	Satuan	Set	Unit
	<b>Sulawesi Tengah</b>				
1	Kab. Banggai				
	Motor Trail 250cc				2
2	Kab. Banggai Kepulauan				
	Motor Trail 250cc				2
3	Kab. Donggala				
	Truk Serbaguna				1
4	Kab. Morowali				
	Mobil Pickup				1
5	Kab. Morowali Utara				
	Mobil Rescue				1
	Tenda Pengungsi			2	
6	Kab. Parigi Moutong				
	Mobil Pickup				1
7	Kab. Poso				
	Mobil Pickup				1
8	Kab. Sigi				
	Motor Trail 250cc				2
9	Kab. Tojo Una-Una				
	Mobil Tangki Air				1
10	Kab. Toli - Toli				
	Motor Trail 250cc				2
11	Kota Palu				
	Motor Trail 250cc				2
12	Provinsi Sulawesi Tengah				
	Tenda keluarga			2	
	Kantong Mayat	35	Lembar		
	Perlengkapan Sekolah	40	Paket		
	Matras	120	Lembar		
	Sandang	250	Paket		
	Paket Perlengkapan Keluarga	151	Paket		
	Selimut	821	Lembar		
	Tenda Gulung	40	Lembar		
	Lauk Pauk	420	Paket		
	Makanan Siap Saji	420	Paket		
	Makanan Tambahan Gizi	420	Paket		
	Paket Perlengkapan Bayi	200	Paket		

No	Lokasi	Logistik		Peralatan	
		Jumlah	Satuan	Set	Unit
	Paket Kebersihan Keluarga	150	Paket		
	Sarung Tangan Kain (Pendek) 2018	16	Pasang		
	Kontainer Plastik (2018)	10	Unit		
	<b>Sulawesi Selatan</b>				
1	Kab. Bantaeng				
	Mobil Pickup				1
2	Kab. Barru				
	Motor Trail 250cc				2
3	Kab. Bone				
	Motor Trail 250cc				2
4	Kab. Bulukumba				
	Motor Trail 250cc				2
5	Kab. Gowa				
	Mobil Pickup				1
6	Kab. Jeneponto				
	Tenda Pengungsi			2	
7	Kab. Luwu Timur				
	Motor Trail 250cc				2
8	Kab. Luwu Utara				
	Motor Trail 250cc				2
9	Kab. Maros				
	Mobil Pickup				1
10	Kab. Pangkajene Kepulauan				
	Motor Trail 250cc				2
11	Kab. Pinrang				
	Motor Trail 250cc				2
12	Kab. Sinjai				
	Motor Trail 250cc				2
13	Kab. Toraja Utara				
	Mobil Tangki Air				1
14	Kab. Kepulauan Selayar				
	Tenda Pengungsi			2	
15	Kota Pare-Pare				
	Tenda Pengungsi			2	
16	Kota Makassar				
	Motor Trail 250cc				2

**BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA**

No	Lokasi	Logistik		Peralatan	
		Jumlah	Satuan	Set	Unit
17	Kota Palopo				
	Motor Trail 250cc				2
18	Provinsi Sulawesi Selatan				
	Tenda keluarga			2	
	Perlengkapan Sekolah	120	Paket		
	Matras	300	Lembar		
	Selimut	600	Lembar		
	Tenda Gulung	110	Lembar		
	Makanan Siap Saji	720	Paket		
	Paket Kebersihan Keluarga	400	Paket		
	Helm (MSA) 2018	16	Buah		
	Rompi Proyek (2018)	16	Buah		
	Sarung Tangan Kain (Pendek) 2018	31	Pasang		
	Karung (2018)	200	Lembar		
	Kontainer Plastik (2018)	14	Unit		
	<b>Sulawesi Tenggara</b>				
1	Kab. Bombana				
	Motor Trail 250cc				2
2	Kab. Buton				
	Motor Trail 250cc				2
3	Kab. Buton Tengah				
	Tenda Pengungsi			2	
4	Kab. Kolaka				
	Motor Trail 250cc				2
5	Kab. Kolaka Utara				
	Tenda Pengungsi			2	
6	Kab. Konawe				
	Mobil Pickup				1
	Pelampung				16
7	Kab. Konawe Kepulauan				
	Mobil Rescue				1
	Tenda Pengungsi			2	
8	Kab. Konawe Selatan				
	Motor Trail 250cc				2
9	Kab. Konawe Utara				
	Motor Trail 250cc				2
	Pelampung				16

No	Lokasi	Logistik		Peralatan	
		Jumlah	Satuan	Set	Unit
10	Kab. Muna				
	Motor Trail 250cc				2
11	Kab. Muna Barat				
	Mobil Rescue				1
12	Kota Kendari				
	Mobil Pickup				1
13	Provinsi Sulawesi Tenggara				
	Tenda keluarga			2	
	Kantong Mayat	30	Lembar		
	Perlengkapan Sekolah	40	Paket		
	Matras	120	Lembar		
	Sandang	250	Paket		
	Paket Perlengkapan Keluarga	150	Paket		
	Selimut	240	Lembar		
	Tenda Gulung	30	Lembar		
	Lauk Pauk	420	Paket		
	Makanan Siap Saji	420	Paket		
	Makanan Tambahan Gizi	420	Paket		
	Paket Perlengkapan Bayi	200	Paket		
	Paket Kebersihan Keluarga	150	Paket		
	Sarung Tangan Kain (Pendek) 2018	10	Pasang		
	Kontainer Plastik (2018)	10	Unit		
	<b>Gorontalo</b>				
1	Kab. Gorontalo				
	Truk Serbaguna				1
2	Kab. Pohuwato				
	Motor Trail 250cc				2
3	Kota Gorontalo				
	Mobil Pickup				1
4	Provinsi Gorontalo				
	Tenda keluarga			2	
	Kantong Mayat	30	Lembar		
	Perlengkapan Sekolah	40	Paket		
	Matras	120	Lembar		
	Sandang	225	Paket		
	Paket Perlengkapan Keluarga	150	Paket		

**BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA**

No	Lokasi	Logistik		Peralatan	
		Jumlah	Satuan	Set	Unit
	Selimut	240	Lembar		
	Tenda Gulung	30	Lembar		
	Lauk Pauk	420	Paket		
	Makanan Siap Saji	420	Paket		
	Makanan Tambahan Gizi	420	Paket		
	Paket Perlengkapan Bayi	200	Paket		
	Paket Kebersihan Keluarga	150	Paket		
	Sarung Tangan Kain (Pendek) 2018	10	Pasang		
	Kontainer Plastik (2018)	10	Unit		
	<b>Sulawesi Barat</b>				
1	Kab. Majene				
	Tenda Pengungsi			2	
2	Kab. Mamuju				
	Truk Serbaguna				1
3	Kab. Mamuju Utara				
	Motor Trail 250cc				2
4	Kab. Polewali Mandar				
	Truk Serbaguna				1
5	Provinsi Sulawesi Barat				
	Tenda keluarga			2	
	Kantong Mayat	30	Lembar		
	Perlengkapan Sekolah	40	Paket		
	Matras	120	Lembar		
	Sandang	225	Paket		
	Paket Perlengkapan Keluarga	150	Paket		
	Selimut	240	Lembar		
	Tenda Gulung	30	Lembar		
	Lauk Pauk	420	Paket		
	Makanan Siap Saji	420	Paket		
	Makanan Tambahan Gizi	420	Paket		
	Paket Perlengkapan Bayi	200	Paket		
	Paket Kebersihan Keluarga	150	Paket		
	Sarung Tangan Kain (Pendek) 2018	10	Pasang		
	Kontainer Plastik (2018)	10	Unit		
	<b>Maluku</b>				
1	Kab. Buru				
	Motor Trail 250cc				2

No	Lokasi	Logistik		Peralatan		
		Jumlah	Satuan	Set	Unit	
2	Kab. Buru Selatan					
	Motor Trail 250cc				2	
3	Kab. Kepulauan Aru					
	Motor Trail 250cc				2	
4	Kab. Maluku Barat Daya					
	Motor Trail 250cc				2	
5	Kab. Maluku Tengah					
	Motor Trail 250cc				2	
	Pelampung				16	
6	Kab. Maluku Tenggara					
	Motor Trail 250cc				2	
7	Kab. Seram Bagian Timur					
	Motor Trail 250cc				2	
8	Kota Tual					
	Motor Trail 250cc				2	
9	Provinsi Maluku					
	Tenda keluarga			2		
	Kantong Mayat	35	Lembar			
	Perlengkapan Sekolah	40	Paket			
	Matras	150	Lembar			
	Sandang	225	Paket			
	Paket Perlengkapan Keluarga	150	Paket			
	Selimut	259	Lembar			
	Tenda Gulung	30	Lembar			
	Lauk Pauk	420	Paket			
	Makanan Siap Saji	420	Paket			
	Makanan Tambahan Gizi	420	Paket			
	Paket Perlengkapan Bayi	200	Paket			
	Paket Kebersihan Keluarga	150	Paket			
	Sarung Tangan Kain (Pendek) 2018	10	Pasang			
	Kontainer Plastik (2018)	10	Unit			
	<b>Maluku Utara</b>					
	1	Kab. Halmahera Selatan				
		Mobil Tangki Air				1
		Pelampung				16
2	Kab. Halmahera Timur					

## BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

No	Lokasi	Logistik		Peralatan	
		Jumlah	Satuan	Set	Unit
	Motor Trail 250cc				2
3	Kab. Halmahera Utara				
	Motor Trail 250cc				2
4	Kab. Kep. Sula				
	Mobil Tangki Air				1
5	Kab. Pulau Morotai				
	Motor Trail 250cc				2
6	Kab. Pulau Taliabu				
	Mobil Rescue				1
	Tenda Pengungsi			2	
7	Kota Ternate				
	Motor Trail 250cc				2
8	Kota Tidore Kepulauan				
	Motor Trail 250cc				2
9	Provinsi Maluku Utara				
	Mobil Pickup				1
	Pelampung				16
	Tenda keluarga			2	
	Perlengkapan Sekolah	40	Paket		
	Matras	150	Lembar		
	Sandang	225	Paket		
	Paket Perlengkapan Keluarga	150	Paket		
	Selimut	240	Lembar		
	Tenda Gulung	30	Lembar		
	Lauk Pauk	420	Paket		
	Makanan Siap Saji	420	Paket		
	Makanan Tambahan Gizi	420	Paket		
	Paket Perlengkapan Bayi	200	Paket		
	Paket Kebersihan Keluarga	150	Paket		
	Sarung Tangan Kain (Pendek) 2018	10	Pasang		
	Kontainer Plastik (2018)	10	Unit		
	<b>Papua</b>				
1	Kab. Mappi				
	Mobil Rescue				1
2	Kab. Nabire				
	Tenda Pengungsi			2	
3	Kab. Paniai				

No	Lokasi	Logistik		Peralatan	
		Jumlah	Satuan	Set	Unit
	Mobil Pickup				1
4	Kab. Puncak Jaya				
	Mobil Rescue				1
	Tenda Pengungsi			2	
5	Kota Jayapura				
	Pelampung				16
	<b>Papua Barat</b>				
1	Kab. Kaimana				
	Tenda Pengungsi			2	
	Mobil Rescue				1
2	Kab. Manokwari Selatan				
	Tenda Pengungsi			2	
	Truk Serbaguna				1
3	Kab. Pegunungan Arfak				
	Tenda Pengungsi			2	
4	Kab. Raja Ampat				
	Mobil Tangki Air				1
5	Kab. Sorong Selatan				
	Mobil Tangki Air				1
6	Kab. Teluk Bintuni				
	Mobil Rescue				1
7	Provinsi Papua Barat				
	Tenda keluarga			2	
	Kantong Mayat	30	Lembar		
	Perlengkapan Sekolah	40	Paket		
	Matras	120	Lembar		
	Paket Perlengkapan Keluarga	150	Paket		
	Selimut	240	Lembar		
	Tenda Gulung	30	Lembar		
	Paket Perlengkapan Bayi	200	Paket		
	Paket Kebersihan Keluarga	150	Paket		
	Sarung Tangan Kain (Pendek) 2018	10	Pasang		
	Sandang (2018)	200	Paket		
	Kontainer Plastik (2018)	10	Unit		



**BNPB**